

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan percepatan pencapaian target perencanaan maka diperlukan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil riset dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berbasis bukti;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi, perlu disusun acuan tata kelola aset dan inovasi dalam bentuk dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

4. Peraturan

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2025-2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan transisi bagi Daerah dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dengan akhir masa jabatan kepala Daerah tahun 2022 atau 2023, dan bagi daerah otonom baru.
7. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah yang selanjutnya disebut RIPJPID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistematis, komprehensif dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Pasal

Pasal 2

- (1) RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.
- (2) RIPJPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya.

Pasal 3

- (1) RIPJPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i pendahuluan;
 - b. bab ii gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Daerah;
 - c. bab iii tantangan dan peluang riset dan inovasi di Daerah;
 - d. bab iv analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di Daerah;
 - e. bab v strategi riset dan inovasi di Daerah;
 - f. bab vi peta jalan riset dan inovasi di Daerah; dan
 - g. bab vii penutup.
- (2) RIPJPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA



PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAREPARE

LAPORAN AKHIR

**RENCANA INDUK
DAN PETA JALAN
PEMAJUAN IPTEK**

K O T A P A R E P A R E
T a h u n 2 0 2 5 - 2 0 2 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare
Jl. Jenderal Sudirman No.76, Bumi Harapan, Kota Parepare

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kota Parepare untuk periode 2025-2029. Dokumen ini disusun berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan setiap daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kota Parepare Tahun 2025-2029 ini disusun dengan memperhatikan arah pembangunan nasional serta kebutuhan dan tantangan lokal. Dalam dokumen ini, kami berfokus pada penguatan riset dan inovasi daerah, sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan Kota Parepare menghadapi era digitalisasi dan globalisasi. Perencanaan yang disusun diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kami menyadari bahwa riset dan inovasi merupakan pilar penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen ini juga mencakup Rencana Induk dan Peta Jalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dirancang untuk memperkuat ekosistem inovasi di Kota Parepare. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan bagi pengembangan program-program riset yang relevan, inovatif, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare, yang telah mengkoordinasikan proses perencanaan ini dengan baik. Kami berharap Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kota Parepare Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Parepare.

Parepare, September 2024
Wali Kota Parepare

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	x
BAB 1 Pendahuluan.....	13
1.1. Latar Belakang	14
1.2. Dasar Hukum	17
1.3. Maksud dan Tujuan	19
1.4. Metode Penyusunan Dokumen	19
1.5. Sistematika Dokumen.....	20
BAB 2 Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah	23
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	24
2.1.1. Aspek Geografi, Administrasi dan Geografis Wilayah.....	24
2.1.2. Kondisi Fisik Wilayah	26
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	54
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	54
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	63
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	79
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	80
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia	85
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	86
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi.....	87
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	87
2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi	87
2.4.2. Nilai SAKIP	87
2.4.3. Indeks Pelayanan Publik	88
2.4.4. Indeks Inovasi Daerah.....	88
2.4.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	89
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	90
2.5.1. Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025.....	90

2.5.2. Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025-2029	91
2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	92
2.6.1. Proyeksi Demografi	93
2.6.2. Proyeksi Peduduk Menurut Kelompok Umur	98
2.6.3. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	102
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	110
2.7.1. Kawasan Perkebunan Rakyat	111
2.7.2. Kawasan Pertanian	111
2.7.3. Kawasan Perikanan	112
2.7.4. Kawasan Perutukan Industri	112
2.7.5. Kawasan Pariwisata	113
2.7.6. Sistem Perkotaan	114
2.7.7. Produk Unggulan Daerah.....	124
BAB 3 Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah.....	140
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	142
3.2. Isu Strategis Daerah	153
3.2.1. Isu Strategis Nasional	153
3.2.2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	167
3.3. Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang	171
3.3.1. Sumber Daya Manusia.....	172
3.3.2. Alternatif Pendanaan	173
3.3.3. Kemitraan dan Kolaborasi.....	174
3.3.4. Pendekatan Lintas Sektor	175
3.3.5. Regulasi	176
BAB 4 Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.....	178
4.1. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah	181
4.2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah.....	184
4.3. Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah.....	185
4.4. Budaya Riset dan Inovasi di Daerah.....	186
4.5. Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah	188
4.6. Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global	191
4.6.1. Geopolitik dan Geoekonomi Dunia.....	191

4.6.2. *Volatility, Uncertainty, Complexity* dan *Ambiguity* (VUCA). 193

4.6.3. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana. 194

BAB 5 Strategi Riset dan Inovasi Daerah.....196

5.1. Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah..... 198

5.2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah 200

5.3. Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah 201

5.4. Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah 203

5.5. Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah..... 205

5.6. Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global 206

5.7. Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah ...207

BAB 6 Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah.....211

6.1. Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Parepare Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah 213

6.2. Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Parepare Dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah 219

Daftar Tabel

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kota Parepare Menurut Kecamatan dan Kelurahan.....	26
Tabel 2. 2. Topografi Kota Parepare Ditinjau Dari Ketinggiannya.....	27
Tabel 2. 3. Kondisi Kemiringan Lereng Wilayah Kota Parepare	28
Tabel 2. 4. Formasi Geologi Struktur Batuan Wilayah Kota Parepare	29
Tabel 2. 5. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Tanah Dalam Tahun 2018–2022	31
Tabel 2. 6. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Permukaan Tahun 2018–2022.....	32
Tabel 2. 7. Data Produksi, Distribusi dan Kebocoran Teknis Penyediaan Air Bersih yang dikelola PDAM Kota Parepare Tahun 2022.....	32
Tabel 2. 8. Jumlah dan Hari Hujan Tahun 2021 Kota Parepare	34
Tabel 2. 9. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Tahun 2021 Kota Parepare	34
Tabel 2. 10. Rata-rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Tahun 2021 Kota Parepare	35
Tabel 2. 11. Curah Hujan Tahun 2022 Kota Parepare.....	35
Tabel 2. 12. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan Kota Parepare Tahun 2018-2022.....	36
Tabel 2. 13. Penutupan Lahan Wilayah Kota Parepare	38
Tabel 2. 14. Komposisi Penggunaan Lahan	40
Tabel 2. 15. Titik Rawan Bencana dan Lokasi Evakuasi di Kota Parepare.....	41
Tabel 2. 16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2017-2023	42
Tabel 2. 17. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Parepare tahun 2021-2023.....	44
Tabel 2. 18. Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Parepare Tahun 2021-2023 (%)	44
Tabel 2. 19. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%).....	46
Tabel 2. 20. Konsumsi Listrik per Kapita Kota Parepare tahun 2013- 2023 (kWh)	46
Tabel 2. 21. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Parepare Tahun 2013-2023 (%).....	47
Tabel 2. 22. Indeks Ketahanan Pangan Kota Parepare tahun 2013- 2023	48
Tabel 2. 23. Skor Pola Pangan Harapan Kota Parepare Tahun 2013- 2023	48

Tabel 2. 24. Kapasitas Air Baku Kota Parepare Tahun 2013-2023 (m ³ /detik).....	50
Tabel 2. 26. Indeks Risiko Bencana.....	50
Tabel 2. 27. Persentase Penurunan Emisi GRK.....	50
Tabel 2. 29. Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2013-2023.....	51
Tabel 2. 30. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Parepare Tahun 2013-2023 ...	51
Tabel 2. 31. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2023.....	52
Tabel 2. 32. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2023.....	53
Tabel 2. 33. Kondisi Kemiskinan Kota Parepare 2018-2022.....	63
Tabel 2. 34. Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Parepare Tahun 2013-2023.....	73
Tabel 2. 35. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%).....	74
Tabel 2. 36. Usia Harapan Hidup.....	77
Tabel 2. 37. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup).....	77
Tabel 2. 38. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%).....	78
Tabel 2. 39. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%).....	78
Tabel 2. 40. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	78
Tabel 2. 41. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%).....	78
Tabel 2. 42. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	79
Tabel 2. 43. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%).....	79
Tabel 2. 44. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga.....	79
Tabel 2. 45. Indeks Perlindungan Anak.....	79
Tabel 2. 47. Tingkat Inflasi (%).....	80
Tabel 2. 48. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%).....	83
Tabel 2. 49. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%).....	83
Tabel 2. 50. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan orang)	83
Tabel 2. 52. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD.....	84
Tabel 2. 53. Indeks Kapasitas Inovasi.....	84
Tabel 2. 54. Kualitas air permukaan (BOD).....	84
Tabel 2. 55. Indeks Kualitas udara (NO ₂).....	84
Tabel 2. 56. Kualitas Tutupan Lahan.....	85
Tabel 2. 57. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB).....	85

Tabel 2. 58. Net Ekspor Barang dan Jasa (BPS, PDRB Kab/Kota Menurut Pengeluaran 2018-2022)	85
Tabel 2. 59. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%).....	85
Tabel 2. 60. Angka Ketergantungan Tahun 2020-2024	85
Tabel 2. 61. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca/numerasi	85
Tabel 2. 62. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun).....	86
Tabel 2. 63. Harapan Lama Sekolah	86
Tabel 2. 64. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidik Tinggi	86
Tabel 2. 66. Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan..	86
Tabel 2. 67. Indeks Layanan infrastruktur	87
Tabel 2. 70. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.....	87
Tabel 2. 71. Indeks Reformasi Birokrasi.....	87
Tabel 2. 72. Tabel Indeks Pelayanan Publik.....	88
Tabel 2. 73. Indeks Inovasi Daerah	88
Tabel 2. 74. Indeks SPBE	89
Tabel 2. 75. Indeks Reformasi Hukum.....	89
Tabel 2. 76. Indeks survey penilaian integritas.....	90
Tabel 2. 78. Indeks maturitas.....	90
Tabel 2. 79. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Laki-laki	93
Tabel 2. 80. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan	94
Tabel 2. 81. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Parepare.....	94
Tabel 2. 82. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Parepare	95
Tabel 2. 83. Distribusi Penduduk Kota Parepare Menurut Kelompok Umur, tahun 2023- 2045.....	98
Tabel 2. 84. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur, Tahun 2025-2029.....	98
Tabel 2. 85. Proyeksi kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Parepare	103
Tabel 2. 86. Data Sumber Air Baku.....	103
Tabel 2. 87. Data Pelayanan Air Minum dan Wilayah Pelayanannya	105

Tabel 2. 88. Proyeksi kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Parepare	106
Tabel 2. 89. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	107
Tabel 2. 90. Proyeksi Prasarana Pengelolaan Persampahan	107
Tabel 2. 91. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Parepare	109
Tabel 2. 92. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Parepare	110
Tabel 2. 93 Sebaran perumahan dan permukiman (LH dan SP) Prioritas.....	123
Tabel 2. 94. PDRB KOTA PAREPARE	127
Tabel 2. 95. LQ TANPA TAMBANG.....	130
Tabel 2. 96. SHIFT SHARE KOTA PAREPARE	133
Tabel 2. 97. SHIFT SHARE.....	136

Daftar Gambar

Gambar 2. 1. Peta Batas Administrasi Wilayah Kota Parepare.....	25
Gambar 2. 2. Peta Topografi Kota Parepare.....	27
Gambar 2. 3. Peta Kemiringan Lereng Kota Parepare.....	28
Gambar 2. 4. Peta Geologi Wilayah Kota Parepare	30
Gambar 2. 5. Peta Curah Hujan Kota Parepare Tahun 2022	36
Gambar 2. 6. Peta Penutupan Lahan Tahun 2014 Kota Parepare	39
Gambar 2. 7. Peta Penutupan Lahan Tahun 2018 Kota Parepare	39
Gambar 2. 8. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022 Kota Parepare	40
Gambar 2. 9. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2022	53
Gambar 2. 10. Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 (persen)	56
Gambar 2. 11. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Se- Ajatappareng Tahun 2018-2023	56
Gambar 2. 12. Nilai PDRB per Kapita Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023.....	58
Gambar 2. 13. Perbandingan PDRB per Kapita se-Ajatappareng Tahun 2018-2023	59
Gambar 2. 14. Indeks Gini Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2022	60
Gambar 2. 15. Perbandingan Indeks Gini se-Ajatappareng Tahun 2018-2023	60
Gambar 2. 16. Kondisi Kemiskinan Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 (Persen)	61
Gambar 2. 17. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2018- 2023.....	62
Gambar 2. 18. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Parepare Dengan Daerah Lain se- Ajatappareng Tahun 2018- 2023	63
Gambar 2. 19. Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013- 2023	65
Gambar 2. 20. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023.....	66

Gambar 2. 21. Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023.....	67
Gambar 2. 22. Angka Umur Harapan Hidup Kota Parepare Tahun 2013-2023	68
Gambar 2. 23. Perbandingan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 (Rp. 000).....	69
Gambar 2. 24. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013-2023	70
Gambar 2. 25. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023.....	71
Gambar 2. 26. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Ajatappareng tahun 2018-2023.....	72
Gambar 2. 27. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Parepare tahun 2013-2023	73
Gambar 2. 28. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Parepare tahun 2018-2022.....	75
Gambar 2. 29. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Parepare tahun 2013-2023.....	76
Gambar 2. 30. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Parepare tahun 2013-2023.....	77
Gambar 2. 31. Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kota Parepare tahun 2018-2022 (Rupiah).....	80
Gambar 2. 32. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Parepare 2018-2023	81
Gambar 2. 33. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Parepare Tahun 2018-2023.....	83
Gambar 2. 34. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Parepare, tahun 2025–2045	95
Gambar 2. 35. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Parepare	96
Gambar 2. 36. Rasio Jenis Kelamin	97
Gambar 2. 37. Pertumbuhan Penduduk Kota Parepare Hasil Proyeksi, Tahun 2025–2045	97
Gambar 2. 38. Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 0– 14 Tahun, Tahun 2025– 2045	99
Gambar 2. 39. Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 15-64 Tahun, 2025– 2045	100
Gambar 2. 40. Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 65 tahun keatas Tahun, 2025– 2045	100
Gambar 2. 41. Proyeksi Rasio Ketergantungan Kota Parepare Tahun 2025– 2045.....	101
Gambar 2. 42. Peta Rencana Pola Ruang Kota Parepare.....	114
Gambar 2. 43. . Rencana Struktur Ruang Kota Parepare	118

Gambar 2. 44. Arah pengembangnan Lingkungan Hunian Bacukiki	121
Gambar 2. 45. Arah pengembangnan Lingkungan Hunian Soreang.....	121
Gambar 2. 46. Arah pengembangnan Lingkungan Hunian Ujung	122
Gambar 2. 47. Arah pengembangnan Lingkungan Hunian Bacukiki Barat.....	122
Gambar 2. 48. . Lingkungan Hunian Bacukiki Barat.....	124
Gambar 2. 49. . Lingkungan Hunian Bacukiki	124



BAB 1

Pendahuluan

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

RIPJPID TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan tersebut adalah memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan itu, maka dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Kota Parepare merupakan bagian integral dari kerangka perencanaan pembangunan daerah yang sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya integrasi antara sistem

pembangunan nasional dan daerah, Kota Parepare memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan, termasuk dalam bidang IPTEK, selaras dengan regulasi tersebut.

Riset dan inovasi memainkan peran krusial dalam transformasi dan pembangunan suatu daerah, menggerakkan kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi secara signifikan. Dengan memfokuskan pada inovasi, sebuah daerah dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang mendalam, tidak hanya dalam skala lokal tetapi juga di tingkat regional dan global. Inovasi ini bukan hanya tentang menciptakan produk dan layanan baru, tetapi juga tentang memecahkan tantangan lokal yang unik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui riset, daerah dapat mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dengan memperkuat infrastruktur pengetahuan dan keterampilan teknis. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ilmuwan dan inovator lokal, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan mendesak. Selain itu, riset dan inovasi memberikan dorongan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan membuka pintu untuk sektor baru dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Melalui kolaborasi yang erat antara universitas, industri, dan pemerintah, ide-ide baru dapat diterjemahkan menjadi praktik yang nyata, menciptakan rantai nilai tambahan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tunggal yang rentan. Lebih dari sekadar menciptakan teknologi baru, riset juga menyebarkan pengetahuan yang dapat memperbaiki sistem kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta meningkatkan kebijakan publik. Ini semua berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat lokal, meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan, dan memungkinkan mereka untuk merasakan manfaat langsung dari kemajuan yang dihasilkan. Dengan demikian, riset dan inovasi bukan hanya menjadi faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga dalam membangun fondasi yang kokoh untuk masyarakat yang inklusif dan berdaya saing di era globalisasi ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2025-2029, yang akan disusun menggunakan pendekatan teknokratik, harus mencerminkan strategi yang jelas untuk kemajuan IPTEK di masa depan, dengan fokus pada pertumbuhan yang didorong oleh inovasi dan teknologi. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, di mana Rancangan

Teknokratik RPJMD disusun sebelum pemilihan kepala daerah, dan menjadi salah satu acuan bagi calon kepala daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program prioritas.

Pentingnya penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK ini tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga pada kebutuhan strategis Kota Parepare untuk mempersiapkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peta Jalan IPTEK ini akan menjadi panduan strategis bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, dalam mengembangkan program-program yang inovatif dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK akan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perangkat daerah, tenaga ahli, dan akademisi, untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. Langkah-langkah ini mencakup pembentukan tim penyusun, orientasi substansi perencanaan, diskusi bersama perangkat daerah untuk mendapatkan saran sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta konsultasi dengan para ahli dalam bidang IPTEK untuk memastikan roadmap yang disusun relevan dan aplikatif.

Dengan adanya Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK ini, diharapkan Kota Parepare dapat memperkuat fondasi inovasi teknologi yang mendukung pencapaian target pembangunan jangka panjang serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Roadmap ini juga akan menjadi salah satu dokumen penting yang mendukung visi dan misi calon kepala daerah dalam Pilkada 2024, serta memastikan kesinambungan pembangunan IPTEK di Kota Parepare untuk lima tahun ke depan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare memegang peranan kunci dalam proses penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi di daerah, BAPPEDA memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang disusun tidak hanya berbasis pada data yang akurat, tetapi juga didukung oleh riset mendalam dan pendekatan inovatif. BAPPEDA bertanggung jawab untuk mengintegrasikan aspek IPTEK ke dalam RPJMD dan memastikan bahwa peta jalan yang disusun selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan tantangan lokal yang dihadapi oleh Kota Parepare.

Pentingnya penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK ini tidak hanya

terletak pada kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga pada kebutuhan strategis Kota Parepare untuk mempersiapkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. BAPPEDA akan berperan sebagai fasilitator dalam mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta, untuk berkolaborasi dalam penyusunan peta jalan yang komprehensif. Dengan peran sentralnya, BAPPEDA akan mengelola proses riset, mengumpulkan data kinerja pembangunan, serta mengarahkan kebijakan inovasi yang dapat memperkuat daya saing daerah.

Proses penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK akan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perangkat daerah, tenaga ahli, dan akademisi, untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. Langkah-langkah ini mencakup pembentukan tim penyusun, orientasi substansi perencanaan, diskusi bersama perangkat daerah untuk mendapatkan saran sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta konsultasi dengan para ahli dalam bidang IPTEK untuk memastikan roadmap yang disusun relevan dan aplikatif.

Dengan adanya Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK yang disusun oleh BAPPEDA, diharapkan Kota Parepare dapat memperkuat fondasi inovasi teknologi yang mendukung pencapaian target pembangunan jangka panjang serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Roadmap ini juga akan menjadi salah satu dokumen penting yang mendukung visi dan misi calon kepala daerah dalam Pilkada 2024, serta memastikan kesinambungan pembangunan IPTEK di Kota Parepare untuk lima tahun ke depan. Peran BAPPEDA dalam hal ini sangat krusial dalam memastikan bahwa perencanaan berbasis teknologi, riset, dan inovasi dapat mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148)
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

- j) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
- k) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045
- l) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di Kota Parepare. Dokumen ini diharapkan menjadi peta jalan yang dapat menyelaraskan agenda-agenda riset dan inovasi di Kota Parepare sehingga tercipta keterpaduan, keberlanjutan, serta ketepatan sasaran dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Adapun beberapa tujuan dari dokumen ini antara lain:

- 1) Menganalisis gambaran umum dan kondisi riset di Kota Parepare.
- 2) Mengidentifikasi tema prioritas riset dan inovasi daerah Kota Parepare.
- 3) Mengkaji tantangan serta peluang riset dan inovasi daerah di Kota Parepare.
- 4) Menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset serta inovasi daerah Kota Parepare.
- 5) Merumuskan strategi untuk meningkatkan dan memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Kota Parepare.
- 6) Menyusun peta jalan untuk program kegiatan prioritas riset dan inovasi yang relevan, terintegrasi, dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare.

1.4. Metode Penyusunan Dokumen

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan metode campuran (mix method) dengan pendekatan Evidence Based Policy (EBP). EBP adalah pendekatan yang menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia terkait hasil program untuk

memandu pengambilan keputusan di setiap tahap proses kebijakan dan di berbagai tingkatan pemerintahan (The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation, 2014). EBP merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan data dan fakta (LAN, 2015).

Konsep ini menganjurkan pendekatan yang lebih rasional, ketat, dan sistematis. Pengambilan keputusan berbasis EBP didasarkan pada premis bahwa kebijakan harus diinformasikan oleh bukti yang ada dan mencakup analisis yang rasional. Kebijakan yang didasarkan pada bukti sistematis dianggap mampu memberikan hasil yang lebih baik (Sutcliffe dan Court, 2005). Bukti yang akurat sebagai dasar kebijakan diperoleh dari hasil riset. Pendekatan ini dianggap menguntungkan karena mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang permasalahan penelitian, sehingga dapat menangkap kompleksitas fenomena yang diteliti secara holistik.

Dalam metode mix method, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif, kemudian mengintegrasikan hasilnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek penelitian. Metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai konteks dan makna fenomena yang diteliti, sedangkan metode kuantitatif menitikberatkan pada pengukuran objektif dan analisis statistik untuk menentukan pola atau hubungan. Penggunaan metode mix method dengan pendekatan Evidence Based Policy (EBP) memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang kaya dan beragam, yang dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, khususnya dalam konteks Kota Parepare.

1.5. Sistematika Dokumen

Penjelasan singkat isi masing-masing Bab dari Dokumen RIPJ PID, yaitu terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang latarbelakang , dasar hukum dan tujuan sasaran Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJ PID) Kota Parepare.

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah

Bab ini menjelaskan Gambaran umum daerah: aspek geografi; kependudukan; ketenagakerjaan; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing daerah; produk unggulan daerah. Kemudian Gambaran/ kondisi Riset dan Inovasi di Daerah yang meliputi:

- a) Kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy),
- b) Kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah saat ini (dalam konteks pengembangan produk unggulan daerah, PUD);
- c) Kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah saat ini (dalam konteks penyelesaian permasalahan utama daerah yang dipilih)

Bab III Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Tantangan dan peluang yang penting dan sangat menentukan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang;

- a) Peluang dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang;
- b) Kondisi kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang diharapkan.
- c) Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang diharapkan (PUD dan Permasalahan utama daerah).

Bab IV Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

Analisis kesenjangan (gap analysis) kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), dan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi (PUD dan Permasalahan Utama) saat ini dan kondisi yang diharapkan.

Bab V Strategi Riset dan Inovasi di Daerah

Bab ini menjelaskan Strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan Strategi pengembangan produk unggulan daerah dan atau penyelesaian permasalahan prioritas/ utama daerah melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD.

Bab VI Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah

Bab ini berisi tentang sasaran strategis dan fokus kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), dan Sasaran strategis dan fokus pengembangan produk unggulan daerah dan/ atau penyelesaian permasalahan utama daerah melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah

Bab VII Program Indikatif

Berisi tentang Program Indikatif kajian untuk menghasilkan rekomendasi berbasis

bukti (evidence-based policy) dan Indikasi program pengembangan produk unggulan dan/ atau penyelesaian permasalahan prioritas/utama daerah melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah.

Bab VIII Penutup

Berisi Kesimpulan dan saran dari penyusunan rencana induk dan peta jalan riset dan inovasi di daerah sebagai landasan penyusunan dokumen teknokratis RPJMD.



BAB 2

Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Gambaran Umum Daerah

Kota Parepare adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebagai kota yang strategis di pesisir barat Sulawesi Selatan, Parepare berfungsi sebagai pusat perdagangan dan layanan jasa yang berkembang pesat. Kota ini memiliki pelabuhan yang menjadi gerbang utama untuk distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah di sekitar Sulawesi dan sekitarnya. Selain sektor perdagangan, Parepare juga dikenal dengan potensi wisata baharinya, yang menawarkan pemandangan pantai yang indah serta warisan sejarah dan budaya yang kaya. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, Kota Parepare berupaya menjadi pusat ekonomi regional yang berdaya saing dan inovatif, serta menjadi tempat yang nyaman untuk hidup, bekerja, dan berinvestasi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, ditunjang oleh berbagai sektor seperti industri, pariwisata, dan jasa, membuat kota ini terus menarik perhatian baik dari pelaku usaha maupun penduduk yang ingin menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Kota Parepare menjadi panduan utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Parepare untuk merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam RPJPD ini, gambaran umum kondisi Kota Parepare akan menjadi landasan penting untuk memahami tantangan, peluang, dan arah pembangunan yang diinginkan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum kondisi daerah dengan cakupan tujuh aspek, yakni: (1) Aspek geografi dan demografi; (2) Aspek kesejahteraan masyarakat; (3) Aspek daya saing; (4) Aspek pelayanan umum; (5) Evaluasi hasil RPJPD Tahun 2025-2029; (6) Tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan (7) Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi, Administrasi dan Geografis Wilayah

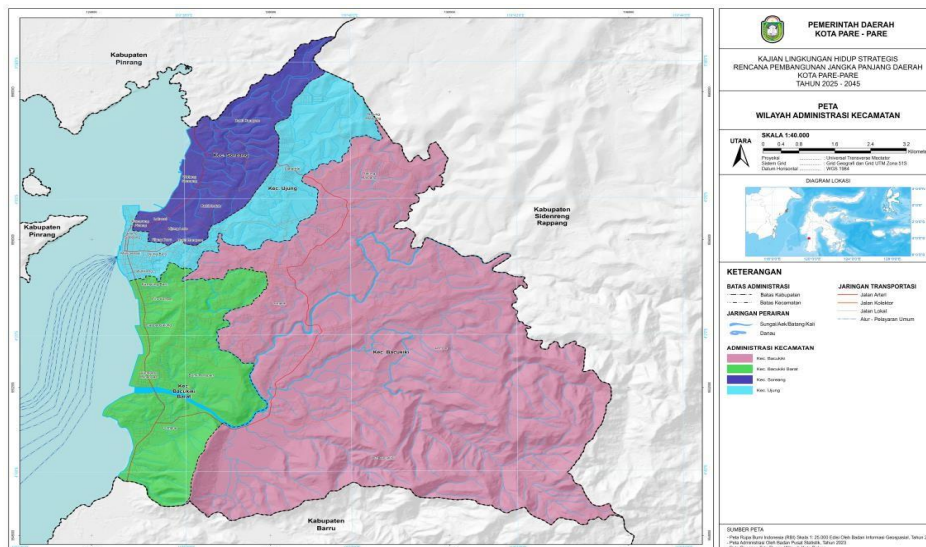
Kota Parepare merupakan salah satu kota dari 24 Kabupaten/Kota yang berada di Sulawesi Selatan dan merupakan pusat distribusi barang dan jasa di bagian tengah Sulawesi Selatan dan menjangkau wilayah Sulawesi Barat.

Berdasarkan data luas wilayah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Kota Parepare memiliki luas wilayah sebesar 89.670 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 155.380 jiwa. Luas Wilayah Indikatif, PBW sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW- BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. Perbaikan nama Kota Pare Pare menjadi Parepare, sesuai: UU No. 4 Tahun 2022; dan Surat Sekda Kota Parepare No. 100/758/Pem Terdiri atas 4 kecamatan dan 22 Kelurahan, yaitu:

- 1) Kecamatan Bacukiki terdiri dari 4 kelurahan yaitu: kel. Lompoe, kel. WT. Bacukiki, kel. Lemoe, dan kel. Galung Maloang;
- 2) Kecamatan Ujung terdiri dari 5 kelurahan yaitu: kel. Labukkang, kel. Ujung Sabbang, kel. Ujung Bulu, kel. Lapadde, dan kel. Mallusetasi;
- 3) Kecamatan Soreang terdiri dari 7 kelurahan yaitu: kel. Lakessi, kel. Ujung Baru, kel. Watang Soreang, kel. Kampung Pisang, kel. Ujung Lare, kel. Bukit Indah, dan kel. Bukin Harapan;
- 4) Kecamatan Bacukiki Barat terdiri dari 6 kelurahan yaitu: kel. Kampung Baru, kel. Cappa Galung, kel. Lumpue, kel. Tiro Sompe, kel. Sumpang Minangae, dan Bumi Harapan.

Secara Administrasi Kota Parepare terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Parepare terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang dan Kecamatan Ujung. Secara geografis, Kota Parepare terletak antara 4° 1' 33.445" LS dan 119° 39'58.216" BT.



Sumber : KLHS RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2029

Gambar 2. 1. Peta Batas Administrasi Wilayah Kota Parepare

Wilayah Kota Parepare di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah barat yaitu berbatasan dengan Teluk Parepare/Selat Makassar. Secara administratif terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan dan 22 Kelurahan sesuai tabel berikut ini:

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kota Parepare Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Bacukiki	66,70
2	Bacukiki Barat	13,00
3	Ujung	11,30
4	Soreang	8,33
TOTAL LUAS WILAYAH		99,33

Sumber : BPS Kota Parepare 2023

Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara- Selatan maupun arah Timur-Barat. Terletak di teluk menghadap ke Selat Makassar. Secara geografis, Kota Parepare terletak antara 3°57'39"- 4°04'49" Lintang Selatan dan 119° 36'24"-119°43'40" Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia Bagian Tengah.

2.1.2. Kondisi Fisik Wilayah

A. Topografi

Dari aspek topografi Wilayah Kota Parepare memiliki kondisi topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Sebagian besar wilayah Kota Parepare berada di dataran rendah dan dataran tinggi yang berbukit-bukit. Kota ini juga memiliki pantai yang menghadap ke selat Makassar di bagian Barat. Di sekitar kota ini terdapat beberapa bukit dan perbukitan yang dapat mempengaruhi struktur dan perkembangan kota.

Kondisi topografi yang beragam ini memberikan keanekaragaman dalam penggunaan lahan dan potensi untuk berbagai jenis kegiatan ekonomi dan pariwisata. Sebagian besar wilayah Kota Parepare terletak di dataran rendah, terutama di sepanjang pesisir pantai. Dataran rendah ini mencakup area perkotaan dan pemukiman penduduk. Sebagian kecil wilayah Kota Parepare, terdapat pegunungan atau lereng pegunungan. Lereng pegunungan ini dapat menjadi objek wisata alam yang menarik dan sering kali memiliki pemandangan yang indah. Kota Parepare memiliki garis pantai yang menghadap ke Selat Makassar. Sedangkan di

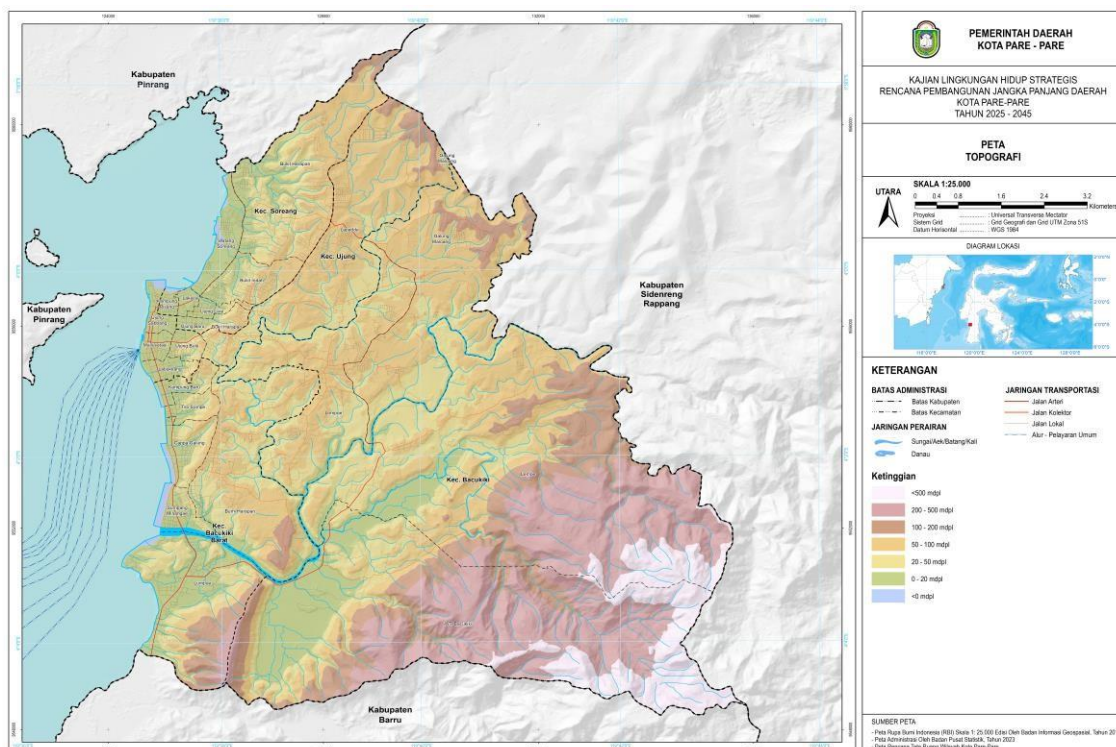
bagian pesisir biasanya lebih datar dan memiliki pantai berpasir. Aktivitas nelayan juga umum di daerah pesisir ini.

Topografi Kota Parepare berada pada ketinggian wilayah antrara 0 hingga >500 mdpl. Sebagian besar kondisi topografi Kota Parepare yang mencakup seluruh kecamatan dengan ketinggian 50 hingga 100 mdpl seluas 2.812,44 hektar. Adapun Kecamatan Bacukiki yang memiliki kondisi topografi tertinggi hingga >500 mdpl seluas 529,47 hektar. Selengkapnya pet dan sebaran luasan topografi dapat dilihat pada peta dan tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 2. Topografi Kota Parepare Ditinjau Dari Ketinggiannya

Kecamatan	Topografi (ha)							Luas (ha)
	<0 mdpl	0 - 20 mdpl	20 - 50 mdpl	50 - 100 mdpl	100 - 200 mdpl	200 - 500 mdpl	>500 mdpl	
Bacukiki	0	494,53	1.046,51	1.594,84	803,10	1.465,47	529,47	5.933,93
Bacukiki Barat	31,86	385,79	433,32	357,30	125,67	27,17	0	1.361,11
Soreang	11,02	276,98	215,84	321,13	21,5	0	0	846,52
Ujung	4,65	108,38	184,13	539,17	55,63	0	0	891,95
Grand Total	47,53	1.265,69	1.879,79	2.812,44	1.005,95	1.492,64	529,47	9.033,52

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041



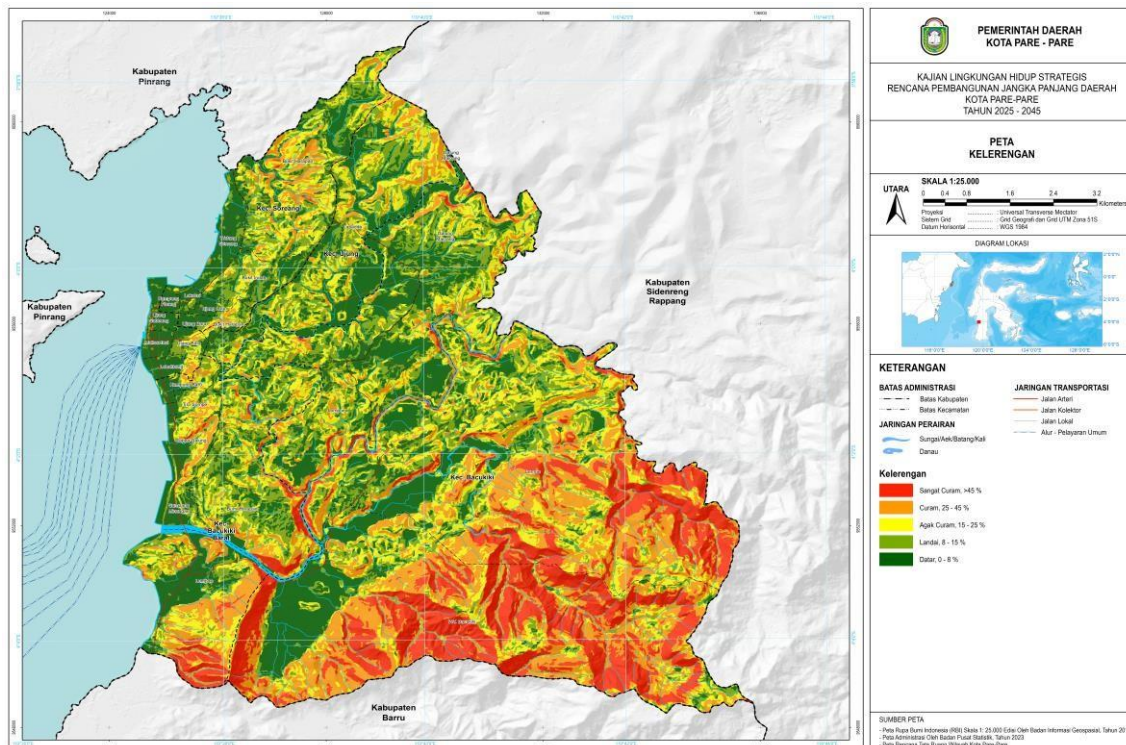
Sumber: KLHS RPJPD Kota Parepare 2025-2029
Gambar 2. 2. Peta Topografi Kota Parepare

Kota Parepare memiliki kondisi kemiringan lereng yang beragam di wilayahnya. Kota Parepare dapat dikarakteristikan dengan adanya kemiringan lereng dapat bervariasi dari datar hingga curam. Secara umum kondisi kemiringan lereng Kota Parepare didominasi oleh kemiringan lereng yang datar 0% hingga 25% dari seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Parepare cenderung lebih datar dengan kemiringan lereng yang lebih ringan. Sedangkan persentase kelerengn sangat curam tertinggi berada pada interval >40% yang berada pada Kecamatan Bacukiki. Secara detail kondisi kemringan lereng di Kota Parepare, yang diinterpresentasikan kelerengn dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 3. Kondisi Kemiringan Lereng Wilayah Kota Parepare

Kecamatan	Kemiringan Lereng (ha)					Luas (ha)
	Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat Curam	
Kec. Bacukiki	1.085,82	931,04	1.108,35	1.503,99	1.304,73	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	355,44	316,70	320,98	271,09	96,90	1.361,11
Kec. Soreang	301,38	245,92	201,60	95,45	2,18	846,52
Kec. Ujung	346,38	242,49	214,91	87,14	1,04	891,95
Grand Total	2.089,03	1.736,15	1.845,84	1.957,67	1.404,84	9.033,52

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041



Sumber: KLHS RPJPD Kota Parepare tahun 2025-2029
Gambar 2. 3. Peta Kemiringan Lereng Kota Parepare

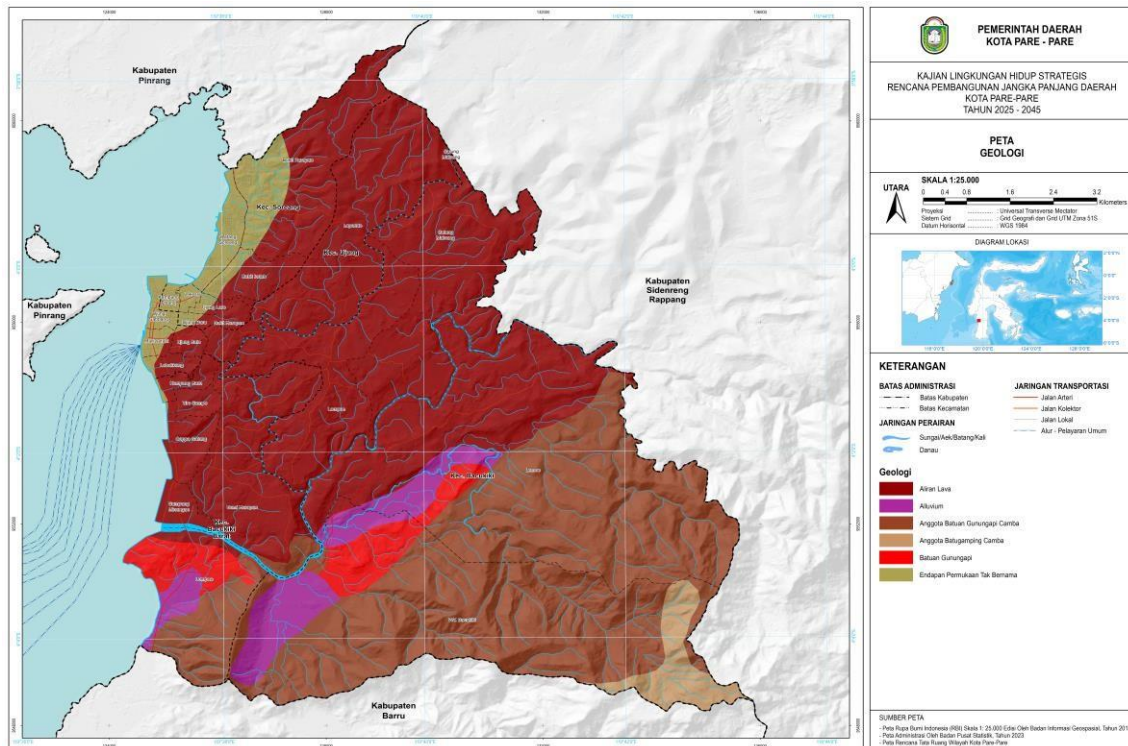
B. Geologi

Kondisi fisik struktur batuan geologi di Kota Parepare di dominasi oleh luas batuan Aliran Lava dengan luasan 4.493,17 hektar yang tersebar di seluruh wilayah kota Parepare. Batuan geologi aliran lava adalah jenis batuan vulkanik yang terbentuk ketika lava cair mengalir di permukaan Bumi dan kemudian mendingin dan membeku. Batuan aliran lava memiliki tekstur yang halus hingga kasar tergantung pada seberapa cepat lava mendingin. Ketika lava mendingin dengan cepat, seperti dalam aliran lava yang relatif tipis, batuan cenderung memiliki tekstur halus. Ketika lava mendingin lebih lambat, seperti dalam aliran lava yang tebal, batuan bisa memiliki tekstur yang lebih kasar. Batuan aliran lava biasanya memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi, yang membuatnya tahan terhadap erosi. Namun, teksturnya yang kasar dapat mempengaruhi kemampuan potong dan pemotongan batuan ini. Batuan aliran lava memiliki berbagai penggunaan, termasuk sebagai bahan bangunan, paving, dan bahan seni hiasan. Batu basal dari Hawaii sering digunakan dalam lanskap dan arsitektur, dan batuan aliran lava yang lebih keras juga digunakan dalam konstruksi jalan. Secara detail untuk peta dan persebaran luasan struktur batuan geologi pada Kota Parepare setiap kecamatan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 4. Formasi Geologi Struktur Batuan Wilayah Kota Parepare

Kecamatan	Geologi (Ha)					Luas (ha)
	Aliran Lava	Alluvium	Batuan Gunung api	Endapan Permukaan Tak Bernama	Formasi Camba	
Kec. Bacukiki	2.282,70	389,82	216,18		3.045,24	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	854,94	67,88	152,35	3,72	282,22	1.361,11
Kec. Soreang	533,64			312,88		846,52
Kec. Ujung	821,89			70,06		891,95
Grand Total	4.493,17	457,70	368,52	386,67	3.327,46	9.033,52

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041



Sumber: KLHS RPJPD Kota Parepare tahun 2025-2029
 Gambar 2. 4. Peta Geologi Wilayah Kota Parepare

C. Hidrologi

Air tanah adalah bagian air di alam yang ada di bawah permukaan tanah. Pembentukan air tanah terjadi selama siklus peredaran air di bumi yang dikenal sebagai daur hidrologi, yang merupakan proses alamiah di mana air di alam berpindah tempat secara berurutan dan terus menerus (Kodoatie, 2012). Beberapa sumber air digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Parepare antara lain:

- 1) Sungai dan Sungai Bawah Tanah: Sungai dan sungai bawah tanah seringkali menjadi sumber utama air bersih untuk pemukiman kota. Air dari sungai ini dapat diambil dan diolah untuk digunakan sebagai air minum dan pasokan air kota.
- 2) Sumur Gali: Banyak rumah di daerah perkotaan memiliki sumur gali untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sumur-sumur ini biasanya mengambil air dari akuifer di bawah tanah.
- 3) Sumber Air Gunung: Kota Parepare, seperti banyak kota di daerah pegunungan, mungkin memiliki akses ke sumber air dari pegunungan di sekitarnya. Sumber air gunung seringkali dianggap sebagai air yang jernih dan berkualitas tinggi.
- 4) Danau dan Waduk: Beberapa kota memiliki akses ke danau atau waduk besar

yang digunakan sebagai sumber air. Air dari danau atau waduk ini dapat diambil, diolah, dan didistribusikan ke kota.

- 5) Air Tanah: Air tanah yang berasal dari akuifer di bawah tanah juga dapat digunakan sebagai sumber air kota. Air ini mungkin perlu dipompa ke permukaan dan diolah sebelum digunakan.
- 6) Mata Air: Kota-kota di daerah pegunungan atau dataran tinggi sering memiliki mata air alami yang merupakan sumber air bersih. Mata air ini dapat dijaga dan dijadikan sumber air minum.

Sumber air permukaan di Kota Parepare berasal dari aliran air sungai yang melintas di Kota Parepare dengan sungai utama yaitu sungai Karajae yang mengalir dari arah timur ke arah barat kota dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai tersebut merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kota Parepare dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pengelolaan air bersih. Selain air permukaan, sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah air tanah dangkal dan tanah dalam. Sumber air tanah dalam yang saat ini masih berfungsi yaitu Sumur Dalam P-1f Harapan, Sumur Dalam P-1g Harapan, Sumur Dalam P-2 G Soreang, Sumur Dalam P-4 C Takkalao, Sumur Dalam P-4 D Takkalao, Sumur Dalam P-5 C Wekke'e, Sumur Dangkal Labatu, Sumur Dalam P-8 A Ladoma 2, Sumur Dalam P-9 A Lapadde, Sumur Dalam P-10 A Lanyer, Sumur Dalam P-11 A Tegal, Sumur Dalam P-12 A Gudang Obat, Sumur Dalam P-13a Gelora Mandiri. Gambaran perkembangan kapasitas air bawah tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Tanah Dalam Tahun 2018–2022

Instalasi Air Tanah Dalam	2018 (litr/dt)	2019 (litr/dt)	2020 (litr/dt)	2021 (litr/dt)	2022 (litr/dt)
Sumur Dalam P-1D Harapan					
Sumur Dalam P-1E Harapan					
Sumur Dalam P-1F Harapan	19,31	20,00	21,40	14,50	12,90
Sumur Dalam P-1G Harapan	18,47	8,60	7,43	4,70	5,30
Sumur Dalam P-2F Soreang	19,63				
Sumur Dalam P-2G Soreang	18,24	26,88	26,10	22,50	19,63
Sumur Dalam P-4C Takkalao	19,58	18,23	17,87	12,10	9,95
Sumur Dalam P-4D Takkalao	20,00	17,16	21,62	17,00	18,70
Sumur Dalam P-5C Wekke'e	19,52	21,20	20,73	17,20	19,45
Sumur Dangkal Labatu	3,51	3,31	3,25	3,25	3,10

Instalasi Air Tanah Dalam	2018 (ltr/dt)	2019 (ltr/dt)	2020 (ltr/dt)	2021 (ltr/dt)	2022 (ltr/dt)
Sumur Dalam P-6A Korem	17,77				
Sumur Dalam P-7A Laupe	8,21	8,01			
Sumur Dalam P-8A Ladoma 1	18,15	18,90	16,67		
Sumur Dalam P-8A Ladoma 2	18,27	12,20	17,68	15,50	16,85
Sumur Dalam P-9A Lapadde	20,00	16,60	14,48	14,20	16,60
Sumur Dalam P-10A Larianyareng	20,00	7,10	9,44	5,00	5,56
Sumur Dalam P-11A Tegal	20,00	19,00	18,37	15,80	14,78
Sumur Dalam P-12A Gudang Obat	20,00	17,00	19,39	13,70	14,30
Sumur Dalam P-13A Glora Mandiri	20,00	12,40	10,67	7,00	6,10
Jumlah	300,66	226,59	225,10	162,45	163,22

Sumber: Profil PDAM Kota Parepare tahun 2023

Gambaran perkembangan kapasitas produksi air permukaan dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2. 6. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Permukaan Tahun 2018-2022

Air Permukaan	2018 (ltr/dt)	2019 (ltr/dt)	2020 (ltr/dt)	2021 (ltr/dt)	2022 (ltr/dt)
IPA 1 Sungai Karajae	30,12	29,58	29,58	30,10	25,30
IPA 2 Sungai Karajae	30,18	27,38	27,38	21,30	17,20
IPA 3 Sungai Karajae	13,67	14,00	14,00	19,30	16,67
IPA 4 Sungai Karajae	16,79	21,16	21,16	17,30	14,17
IPA 5 Sungai Karajae	16,43	20,56	20,56	19,70	16,05
Jumlah	107,19	112,68	112,68	107,70	89,39

Sumber Data : Profil PDAM Kota Parepare tahun 2023

Gambaran perkembangan produksi air bersih, distribusi dan kebocoran teknis penyediaan air bersih yang dikelola PDAM Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 7. Data Produksi, Distribusi dan Kebocoran Teknis Penyediaan Air Bersih yang dikelola PDAM Kota Parepare Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
I	Data Produksi			
1	Kapasitas Produksi	ltr / dtk	252,61	
2	Kapasitas Desain	ltr / dtk	335,00	
3	Kapasitas Pasang	ltr / dtk	335,00	
4	Produk Aktual	ltr / thn		
II	Data Distribusi			
1	Kapasitas Distribusi	ltr / dtk	270,54	
2	Asumsi Kebutuhan Air	ltr / dtk	337,20	

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
3	Ratio Kebutuhan	%		
4	Air Terjual	m ³ / thn	4.6628.506	
5	Air Terdistribusi	m ³ / thn	7.345.739	
6	Total Penjualan Air	Rp	35.175.528.679	
7	Jumlah Mobil Tanki	unit	3,00	2 Baik, 1 Rusak
III	Data Kebocoran			
1	Kebocoran Teknis	%	36,99	

Sumber: Profil PDAM Kota Parepare tahun 2023

Ditinjau dari keadaan hidrologinya, Kota Parepare dalam memanfaatkan sumber air baku yang melayani masyarakat adalah air permukaan dari aliran air sungai KarajaE. Sungai ini mempunyai debit air 250 liter/detik pada saat normal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan daerah aliran sungai di Kota Parepare sangat mendesak dilakukan, terlebih lagi dengan wilayah yang terkait langsung dengannya, seperti kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan daerah resapan hujan.

Selain pemanfaatan air permukaan, pengembangan pemanfaatan air baku bagi sistem penyediaan air bersih di Kota Parepare juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman 100 meter yang terletak di dalam wilayah Kota Parepare. Oleh sebab itu untuk terus memperoleh manfaat sumber air baku dari air tanah yang terletak di wilayah Kota Parepare perlu diadakan penghijauan dan revegetasi daerah aliran air tanah.

D. Klimatologi

Iklim sebagai unsur lingkungan yang dapat memberikan informasi mengenai potensi suatu daerah, diantaranya bermanfaat untuk mendukung pengelolaan suatu kawasan kaitannya dengan kebutuhan air baik untuk pertumbuhan suatu tanaman maupun untuk rumah tangga. Unsur iklim yang terpenting adalah curah hujan, suhu, kelembaban udara dan kecepatan angin. Curah hujan dan had hujan rata-rata bulanan banyak digunakan untuk menilai besarnya erosivitas hujan dan klasifikasi iklim, sedangkan suhu dan kelembaban udara banyak digunakan untuk pemilihan jenis tanaman. Kajian klimatologi kaitannya untuk sektor pertanian dikenal dengan istilah agroklimat.

Kondisi klimatologi di Kota Parepare berdasarkan unsur iklim menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Maros tahun 2021, Sulawesi Selatan, Indonesia dapat bervariasi tergantung pada musim. Kota Parepare terletak di wilayah tropis dengan

dua musim utama yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung antara bulan November hingga Maret. Ini adalah periode ketika curah hujan di daerah ini cenderung tinggi. Suhu udara selama musim hujan berkisar antara 22°C hingga 32°C, dengan tingkat kelembaban yang lebih tinggi. Sedangkan Musim kemarau di Kota Parepare berlangsung antara bulan April hingga Oktober. Ini adalah periode ketika curah hujan biasanya lebih rendah. Suhu udara selama musim kemarau dapat meningkat hingga sekitar 34°C, dan tingkat kelembaban relatif cenderung lebih rendah. Selengkapnya mengenai kondisi iklim dan curah hujan di wilayah Kota Parepare yang tergambar dari curah hujan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 8. Jumlah dan Hari Hujan Tahun 2021 Kota Parepare

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	839,9	30	25,0
Februari	397,0	20	34,5
Maret	626,3	23	44,5
April	294,0	11	50,9
Mei	78,1	11	58,2
Juni	87,0	14	63,8
Juli	77,3	9	48,1
Agustus	104,2	8	68,4
September	82,5	11	57,2
Oktober	245,4	17	66,2
November	542,0	26	43,3
Desember	860,3	28	28,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare dalam Angka 2022

Tabel 2. 9. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Tahun 2021 Kota Parepare

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	22,8	27,2	31,2	68,0	87,7	99,0
Februari	23,2	27,5	31,9	67,0	86,9	99,0
Maret	22,7	27,8	32,6	69,0	85,9	98,0
April	23,2	28,5	32,2	55,0	79,0	99,0
Mei	23,4	29,4	34,0	51,0	74,7	98,0
Juni	22,4	28,8	34,5	47,0	76,8	97,0
Juli	20,5	28,3	34,0	40,0	76,7	97,0
Agustus	22,7	29,5	34,3	43,0	69,4	98,0
September	22,3	29,4	34,6	44,0	71,4	97,0
Oktober	23,6	29,0	33,5	54,0	78,5	98,0
November	23,6	28,3	32,6	63,0	82,4	98,0
Desember	23,0	27,7	32,6	58,0	84,5	99,0

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare dalam Angka 2022

Tabel 2. 10. Rata-rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Tahun 2021 Kota Parepare

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mbar)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	Calm	3,0	12,0	1.004,0	1.007,9	1.011,3
Februari	Calm	3,0	18,0	1.005,0	1.008,9	1.013,7
Maret	Calm	2,6	10,0	1.003,7	1.008,8	1.013,5
April	Calm	3,3	12,0	1.004,7	1.009,4	1.012,7
Mei	Calm	3,4	10,0	1.004,5	1.008,3	1.012,7
Juni	Calm	2,5	11,0	1.005,5	1.009,8	1.013,0
Juli	Calm	1,3	6,0	1.005,4	1.009,4	1.014,3
Agustus	Calm	4,0	14,0	1.005,4	1.009,6	1.013,9
September	Calm	1,8	12,0	1.005,3	1.009,0	1.012,8
Oktober	Calm	2,3	12,0	1.004,0	1.008,7	1.013,6
November	Calm	3,1	19,0	1.003,6	1.007,9	1.012,2
Desember	Calm	3,5	12,0	1.003,7	1.009,2	1.014,2

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare dalam Angka 2022

Kota Parepare memiliki kecepatan angin maksimum tertinggi pada bulan November dengan nilai 19,0 m/det. Sedangkan untuk tekanan udara memiliki nilai maksimum tertinggi pada bulan Juli dengan nilai 1014,3 mbar dengan nilai rata-rata tertinggi pada bulan Juni 1009,8 mbar.

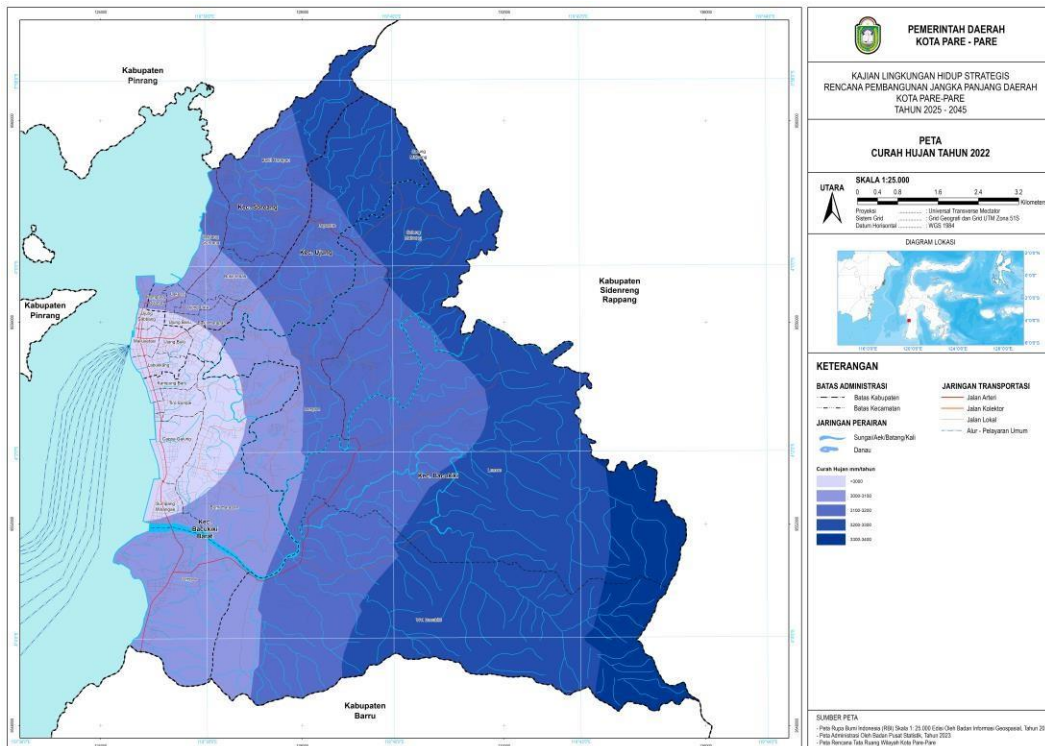
Adapun curah hujan rata-rata tahunan dari data *Rainfall Estimates from Rain Gauge and Satellite Observations (CHIRPS)* Kota Parepare yang tersebar diseluruh kecamatan.

Curah Hujan Pada tahun 2022 memiliki rata-rata curah hujan <3.000 hingga 3.400 mm/tahun. Rata-rata curah hujan yang dominan tersebar diseluruh Kecamatan Kota Parepare sebesar 3.200 - 3.300 mm/tahun seluas 3.309,76 ha dari total luas wilayah Kota Parepare. Curah hujan tertinggi dengan rata-rata 3.300-3.400 mm/tahun terdapat di Kecamatan Bacukiki seluas 592,60 ha. Selengkapnya untuk peta dan sebaran luas wilayah curah hujan Kota Parepare dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 11. Curah Hujan Tahun 2022 Kota Parepare

Kecamatan	Curah Hujan (ha) Tahun 2022					Luas (Ha)
	<3.000	3.000-3.100	3.100-3.200	3.200-3.300	3.300-3.400	
Kec. Bacukiki	19,12	449,71	2.063,64	2.808,85	592,60	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	444,58	891,53	25,00			1.361,11
Kec. Soreang	14,57	203,30	477,58	151,08		846,52
Kec. Ujung	158,04	85,23	298,85	349,83		891,95
Grand Total	636,32	1.629,76	2.865,07	3.309,76	592,60	9.033,52

Sumber: Data Curah Hujan Rainfall from Rain Gauge and Satellite Observations



Gambar 2. 5. Peta Curah Hujan Kota Parepare Tahun 2022

Wilayah Kota Parepare memiliki dua pola musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dari data curah hujan yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV menunjukkan bahwa curah hujan tahunan mencapai 5998 mm³/thn untuk 2 lokasi pos data hujan, yaitu Data Pos Hujan Bukit Harapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, dan Data Pos Hujan Bulu Dua Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki. Besar curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 249,9 mm³ dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan April dan tertinggi pada bulan November.

Tabel 2. 12. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan Kota Parepare Tahun 2018-2022

Tahun	2018		2019		2020		2021		2022	
Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
DATA POS HUJAN BUKIT HARAPAN KEL. BUKIT HARAPAN KEC. SOREANG										
Januari	210	13	144	18	721	20	313	21	284	10
Februari	213	16	204	15	482	17	172	14	280	17
Maret	170	11	108	11	205	14	315	19	189	10
April	193	11	58	11	154	16	90	9	69	14
Mei	177	9	33	4	91	13	87	4	209	14
Juni	169	16	44	8	91	9	51	8	114	13
Juli	40	3	-	-	85	11	117	9	86	13
Agustus	20	1	31	1	83	3	66	8	83	7
September	5	4	-	-	71	10	149	10	228	12

Tahun	2018		2019		2020		2021		2022	
Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Oktober	26	3	31	1	188	14	144	12	255	24
November	154	14	149	9	323	10	276	17	522	19
Desember	455	25	216	13	386	22	393	16	467	24
Total	1662	126	1018	76	2398	159	2173	147	2786	177
DATA POS HUJAN BULU DUA KEL. GALUNG MALOANG KEC. BACUKIKI										
Januari	596	12	37	7	473	7	334	14	197	7
Februari	226	10	80	5	226	7	269	10	503	14
Maret	94	7	125	7	251	10	357	7	474	13
April	228	7	128	5	96	4	119	4	43	6
Mei	124	7	19	1	112	7	131	3	222	11
Juni	140	7	45	7	72	5	60	3	93	6
Juli	17	4	13	1	52	5	44	4	75	5
Agustus	10	1	38	1	2	1	122	2	87	1
September	4	1	-	-	39	4	111	2	137	6
Oktober	21	2	1	1	168	7	138	3	217	11
November	80	5	137	8	UI	6	304	16	696	9
Desember	475	20	121	5	456	12	766	20	468	16
Total	2015	83	744	48	1947	75	2755	88	3212	105
Total Pos Bukit Harapan + Bulu Dua	3677	209	1762	124	4345	234	4928	235	5998	282

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV, 2023

Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV terkait data jumlah curah hujan dan hari hujan bulanan Kota Parepare tahun 2018-2022 bersumber dari data pos hujan. Di Kota Parepare terdapat dua pos ketersediaan peralatan perhitungan curah hujan yakni berlokasi di Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang dan Bulu Dua, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki.

E. Penggunaan Lahan

Zonasi Penggunaan Lahan, Teori ini mencakup konsep tentang zonasi penggunaan lahan dalam kota. Kota Parepare akan memiliki zona-zona yang berbeda untuk perumahan, perdagangan, industri, dan mungkin zona-zona khusus lainnya. Konsep ini membantu mengorganisir kota dan menentukan di mana aktivitas-aktivitas ekonomi dan sosial tertentu harus ditempatkan dalam kota.

Penutupan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati

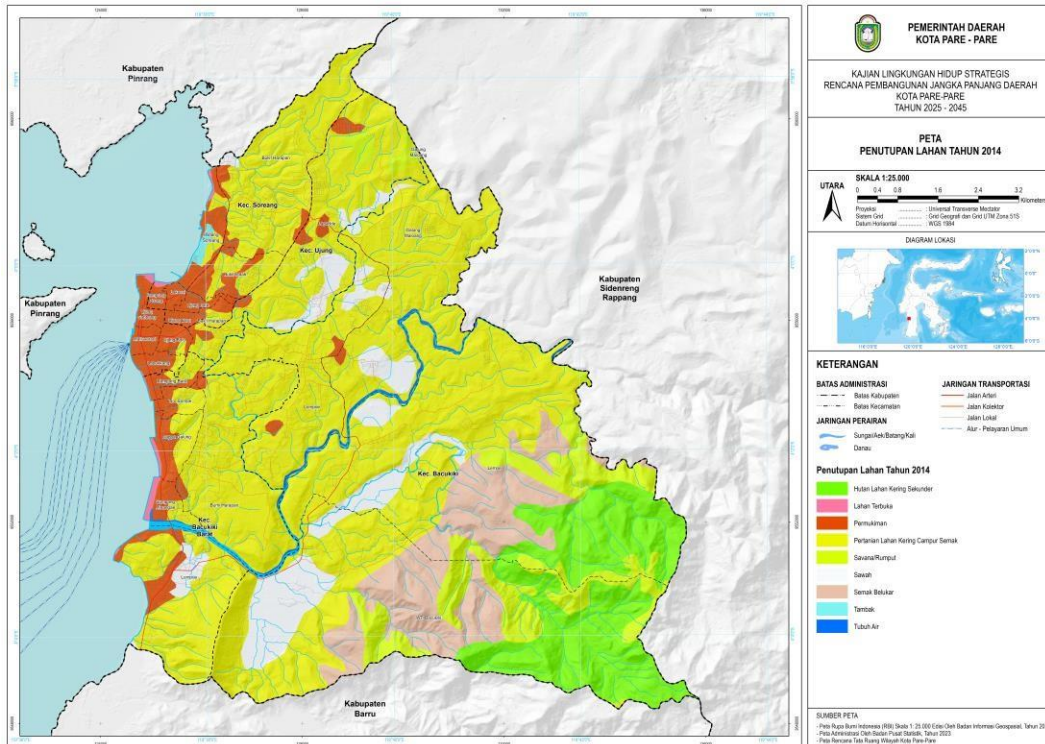
dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010). Identifikasi yang dilakukan untuk melihat kondisi penutupan lahan di Kota Parepare, menggunakan data penutupan lahan berdasarkan data KLHK Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wil. VII Makassar tahun 2014, 2018 dan 2022.

Berdasarkan data penutupan lahan Kota Parepare terjadi deforestasi penurunan luasan pada kelas penutupan hutan lahan kering sekunder seluas 96,88 hektar pada tahun 2014 hingga tahun 2022. Selain itu kelas penutupan lahan pertanian lahan kering campur semak juga mengalami pengurangan luasan seluas 2.229,50 hektar. Kemudian kelas penutupan lahan permukiman dan Sawah mengalami penambahan luasan yg secara signifikan dengan penambahan permukiman seluas 1.293,76 hektar dan Sawah 441,14 hektar. Dalam hal ini kebutuhan lahan pemukiman dan kebutuhan lahan sumber pangan yang semakin bertambah yang ditandai dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selengkapnya untuk peta dan luas perubahan penutupan lahan tahun 2014, 2018, 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

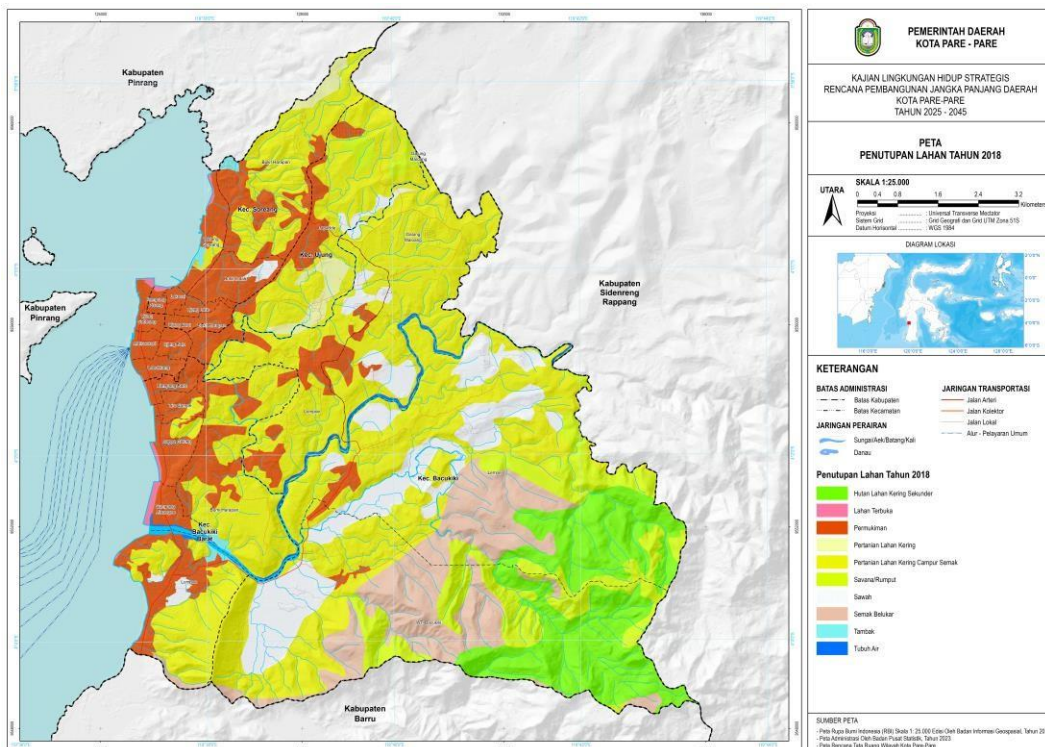
Tabel 2. 13. Penutupan Lahan Wilayah Kota Parepare

Penutupan Lahan	Penutupan Lahan			Perubahan		Persentase Perubahan	
	Tahun 2014	Tahun 2018	Tahun 2022	2014-2018	2018-2022	2014-2018	2018-2022
Hutan Lahan Kering Sekunder	1.054,02	992,84	957,15	-61,18	-35,70	-6%	-4%
Lahan Terbuka	28,18	28,18	28,18	0	0	0%	0%
Permukiman	594,33	1.421,49	1.888,10	+ 827,15	+ 466,61	>100%	33%
Pertanian Lahan Kering	-	104,86	109,59	+ 104,86	+ 4,73	>100%	5%
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	5.127,69	4.019,26	2.897,76	-1.108,43	-1.121,50	-22%	-28%
Savana/Rumput	659,43	692,20	1.438,94	+ 32,76	+ 746,74	5%	>100%
Sawah	631,68	821,66	1.072,82	+ 189,99	+ 251,15	30%	31%
Semak Belukar	840,86	836,68	478,85	-4,18	-357,83	0%	-43%
Tambak	15,59	32,54	76,98	+ 16,95	+ 44,43	>100%	>100%
Tubuh Air	81,74	83,82	85,15	+ 2,07	+ 1,33	3%	2%

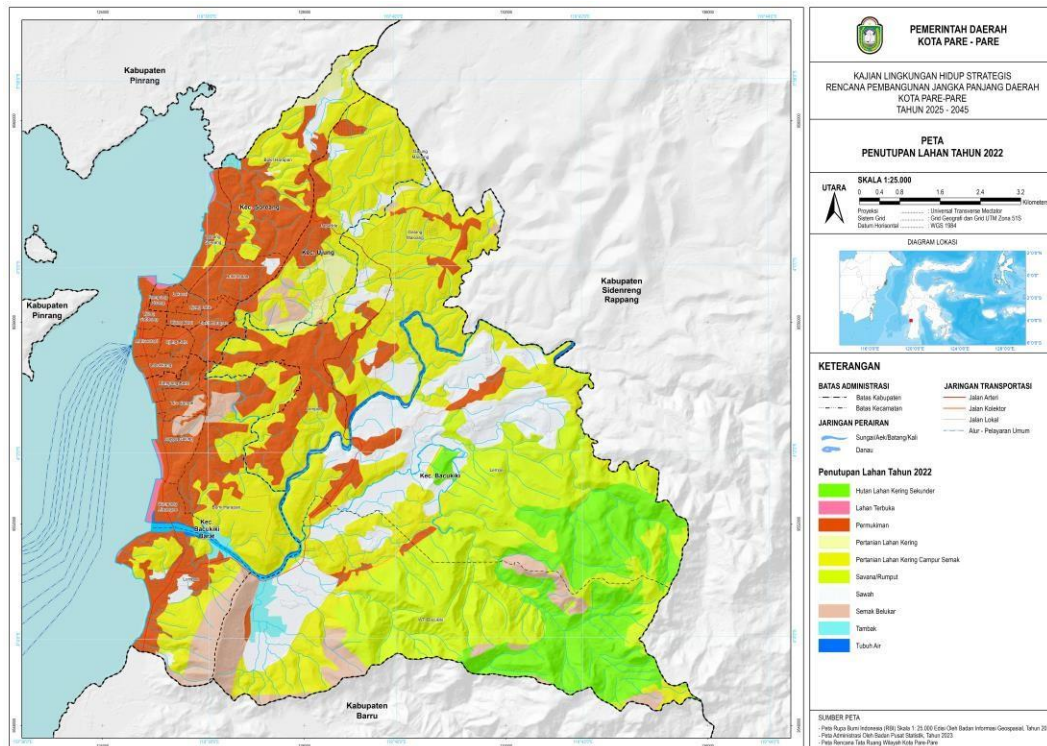
Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wil. VII Makassar (BPKHTL), Tahun 2014, 2018 dan 2022



Gambar 2. 6. Peta Penutupan Lahan Tahun 2014 Kota Parepare



Gambar 2. 7. Peta Penutupan Lahan Tahun 2018 Kota Parepare



Gambar 2. 8. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022 Kota Parepare

Penggunaan Lahan di Kota Parepare terdiri atas beberapa bagian diantaranya yaitu Lahan Hutan, Lahan Permukiman dan Lahan Ladang. Namun untuk lebih jelasnya komposisi penggunaan lahan di Kota Parepare pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 14. Komposisi Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luasan Ha	persentase
1	Bangunan Industri	33,39	0,34
2	Belukar	858,13	8,67
3	Hampanan Pasir Pantai	0,9813	0,01
4	Hutan Campuran	2.135,85	21,58
5	Jaringan Jalan	6,91	0,07
6	Ladang	4.290,13	43,34
7	Pelabuhan Laut	8,40	0,08
8	Perkebunan	105,22	1,06
9	Permukiman	1.169,02	11,81
10	Pertambangan	18,28	0,18
11	Peternakan	37,72	0,38
12	Sawah Irigasi	908,07	9,17
13	Sungai	79,28	0,8
14	Tambak Ikan	95,55	0,97
15	Tanah Kosong	147,24	1,49
16	Tempat Penimbunan Sampah	4,97	0,05
	Jumlah	9.933,22	100,00

Sumber data: Peta Revisi RTRW Kota Parepare_ Peta RBI Skala 1:25.000_Citra, Satelit SPOT7

F. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana alam diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, dan banjir. Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Potensi rawan bencana Kota Parepare, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk tanah longsor diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budi daya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut.
- 2) Untuk daerah rawan banjir dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya di kawasan yang sering terkena banjir terutama pada pusat kota dan bantaran sungai KarajaE.
- 3) Melaksanakan penanaman atau pengendalian disekitar pesisir pantai dengan tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang.
- 4) Menetapkan kawasan rawan bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran seperti membangun hidran-hidran air yang tersebar merata disepanjang jalan primer, kawasan perumahan dan permukiman serta kawasan yang diidentifikasi rawan bencana kebakaran.
- 5) Untuk rawan gempa bumi, gelombang tsunami dan gelombang pasang diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada sepanjang pesisir pantai Kota Parepare.

Titik rawan bencana dan lokasi evakuasi di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15. Titik Rawan Bencana dan Lokasi Evakuasi di Kota Parepare

Kecamatan	Rawan Bencana	Lokasi Evakuasi
Ujung	- Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Bulu (rawan longsor)	- Lapangan/Alun-alun A. Makkasau
	- Kawasan BTN Pepabri/BTN Lapadde (rawan longsor)	- SMAN 4
	- Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin)	- Polsek Ujung - Lapangan Korem
Bacukiki Barat	- Cappa Galung, (rawan longsor)	- Lapangan Upacara Kota
	- Kawasan SPPBE Lumpue (rawan kebakaran/ledakan)	- Lapangan Sumpang
	- Belakang SMKN 1 / SMPN 5, kampung	

Kecamatan	Rawan Bencana	Lokasi Evakuasi
	lapangape (rawan longsor) - Kawasan Kampung Baru / Kesuma Timur (rawan longsor) - Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin)	
Bacukiki	- Kawasan Mangimpuru/Lontangnge (rawan banjir dan longsor)	- Lapangan Lemoe - Lapangan Lompoe
Soreang	- Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Baru (rawan longsor) - Kawasan Depot Pertamina (rawan kebakaran) - Sekitar Bukit Indah/Ujung Baru (rawan longsor) - Belakang Kantor Kec. Soreang/SMA 3 (rawan longsor) - Kawasan Perumahan Sosial (rawan longsor) - Pesisir Pantai.	- Lapangan Sepak Bola Laupe (kampung duri) - Lapangan Lauleng - Lapangan Takkalao - Lapangan Kavelari - Lapangan Umbar

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

G. Kualitas Lingkungan Hidup

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH menggabungkan beberapa parameter lingkungan hidup seperti: Kualitas udara, Kualitas air, Keberlanjutan sumber daya alam, Kebersihan lingkungan, Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks tutupan lahan.

Berikut adalah capaian IKLH Kota Parepare sepuluh tahun terakhir (tahun 2013-2023), sebagai berikut:

Tabel 2. 16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2017-2023

Tahun	Capaian
2017	72,29
2018	68,17
2019	77,62
2020	78,04
2021	75,65

Tahun	Capaian
2022	75,50
2023	71,68

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa IKLH Kota Parepare sejak tahun 2013 sampai dengan 2023 cenderung fluktuasi yang tidak signifikan. Di tahun 2018, capaian IKLH turun ke angka 68,17. Hingga tahun 2023 menunjukkan angka 71,68, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

Tahun 2020, merupakan tahun dengan capaian tertinggi untuk periode 10 tahun terakhir yaitu 78,04.

2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri yang terhubung dengan septic tank. Fasilitas sanitasi ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT.

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.

Antara lain:

- Kloset menggunakan leher angsa
- Bangunan bawah menggunakan tangki septik atau IPALD
- Tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir
- Tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat

Akses sanitasi layak bersama adalah apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Keberadaan tangki septik yang memenuhi standar sangat penting untuk mencegah penularan penyakit, pencemaran air dan pencemaran lingkungan.

Berikut adalah capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kota Parepare:

Tabel 2. 17. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Parepare tahun 2021-2023

Tahun	Capaian
2022	43.764
2023	45.231

Capaian indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Parepare tahun 2018, 88,5% rumah tangga di Kota Parepare memiliki akses sanitasi. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional.

3) Pengelolaan Sampah

➤ Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah tertentu dalam periode waktu tertentu. Fasilitas pengelolaan sampah merupakan pendampingan dan konsultasi dalam proses pengelolaan sampah, yang terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Pengukuran timbulan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan menggunakan metode Load-count, yaitu sampah yang dikumpulkan oleh petugas gerobak dari sumber kemudian ditimbang satu gerobak sehingga diketahui masa sampah yang dihasilkan. Pengambilan sampel timbulan dilakukan selama 8 hari.

Pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah di suatu wilayah dalam satuan waktu tertentu.

Menurut Peraturan Walikota Parepare Nomor 22 Tahun 2019, pembatasan timbulan sampah sekali pakai merupakan salah satu peraturan yang berlaku di Parepare.

Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, jumlah timbulan sampah nasional mencapai 21,1 juta ton.

Tabel 2. 18. Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Parepare Tahun 2021-2023 (%)

Tahun	Capaian
2021	90,13
2022	91,36
2023	91,39

Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan 35,93 juta ton timbulan sampah, yang merupakan peningkatan 22,04% dari tahun 2021.

Kota Parepare memiliki Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai. Peraturan BPK juga mengatur pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan sampah dari fasilitas umum, sosial, dan lainnya.

➤ Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Ada beberapa sistem pengumpulan sampah rumah tangga yang dilakukan sampai saat ini berdasarkan kondisi dan kultur masyarakat. Pada umumnya sistem pengumpulan sampah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tiap rumah tangga menyediakan tempat atau wadah sampah tertutup yang dilapisi kantong plastik, yang berisi sampah yang tidak dapat dimanfaatkan
- 2) Pengumpulan dari pintu ke pintu (*door to door service*) yang dilakukan atas swadaya masyarakat sendiri atau dilakukan oleh petugas dinas kebersihan kota. Pool gerobak sampah dikumpulkan dalam beberapa gerobak yang dikumpulkan dari setiap kepala keluarga ditingkat RT/RW dan diangkat oleh petugas setiap hari dan dikumpulkan di dipo sampah.
- 3) Dipo adalah tempat penampungan sampah sementara yang meliputi satu kelurahan kurang dari 30.000 warga, dengan daya tampung sampah sekitar 150 M³
- 4) *Pool container* biasanya terletak dipinggir jalan di sebuah lokasi permukiman dan memiliki volume kurang dari 6-10 M³

Tempat sampah ini berbentuk sebuah bak penampungan besi yang langsung diangkat oleh truk kebersihan dengan sistem hidrolik. Sistem truk kompaktor yang berkeliling di sekitar rumah warga dan berfungsi sebagai tempat penampungansampah sementara.

Tabel 2. 19. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)

Tahun	Capaian
2021	95,8
2022	96,5
2023	96,1

H. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

1) Ketahanan Energi

Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

Konsumsi listrik per kapita (kWh per kapita) adalah produksi pembangkit listrik dan gabungan panas dan pembangkit listrik dikurangi kerugian transmisi, distribusi, dan transformasi serta penggunaan sendiri oleh pembangkit listrik dan panas, dibagi dengan populasi pertengahan tahun. Data energi dikumpulkan oleh Badan Energi Internasional (IEA).

Konsumsi listrik per kapita adalah total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah, dibagi dengan jumlah penduduknya.

Konsumsi energi listrik di Indonesia tidak saja hanya dipengaruhi oleh banyaknya penduduk dalam suatu wilayah tetapi faktor aktifitas ekonomi penduduk yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsumsi listrik per kapita di Indonesia pada 2023 adalah

1.285 kilowatt-jam per kapita (kWh/kapita), meningkat dari

1.173 kWh/kapita pada 2022. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia terus meningkat sejak 2017.

Aktivitas ekonomi merupakan salah satu faktor penentu utama penggunaan energi, sedangkan langkah-langkah efisiensi energi juga dapat membantu mengurangi jejak energi.

Tabel 2. 20. Konsumsi Listrik per Kapita Kota Parepare tahun 2013- 2023 (kWh)

Tahun	Capaian
2019	116.387.070
2020	120.641.625
2021	122.379.984
2022	124.987.523

Tahun	Capaian
2023	133.416.417

2) Ketahanan Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, juga dikenal sebagai Prevalence of Undernourishment (PoU), adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu yang tidak mengkonsumsi energi yang cukup untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Konsep ini diukur dari asupan energi yang berada di bawah kebutuhan energi minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan diukur sebagai persentase penduduk yang mengkonsumsi kalori per hari di bawah 70% AKG. Semakin banyak persentase masyarakat miskin di kabupaten/kota tersebut, maka kemungkinan besar prevalensi ketidacukupan konsumsinya juga tinggi.

Tabel 2. 21. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Parepare Tahun 2013-2023 (%)

Tahun	Capaian
2017	3,83
2018	4,4
2019	3,64
2020	5,95
2021	3,92
2022	6,71
2023	6,37

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP diukur berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan negara setiap saat. Ketahanan pangan dicapai melalui empat pilar yaitu: Ketersediaan pangan (produksi dan import), Cadangan pangan, Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyediaan pangan tersebut.

Lima variabel yang berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan, yakni: Persentase produksi padi, Rata-rata pengeluaran perkapita, Indeks daya beli,

Persentase luas panen, Kepadatan penduduk.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Parepare adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP 2021 tingkat kabupaten/kota dan provinsi merupakan pemutakhiran IKP 2020 yang telah disusun sebelumnya oleh Badan Ketahanan Pangan.

Tabel 2. 22. Indeks Ketahanan Pangan Kota Parepare tahun 2013- 2023

Tahun	Capaian
2020	78,56
2021	79,10
2022	79,10
2023	83,07

Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100, dan semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Skor PPH dihitung dengan menjumlahkan seluruh skor PPH aktual dari masing-masing kelompok pangan. Perhitungan ini menggunakan rumus: Skor PPH = skor PPH kelompok padi – padian + ... + skor PPH kelompok lain.

Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun, serta vitamin dan mineral/zat pengatur).

Total skor PPH didapatkan dengan menjumlahkan seluruh skor PPH aktual dari masing-masing kelompok pangan. Pangan yang dikonsumsi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok pangan yang mengacu pada standar PPH, yaitu sebagai berikut: Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan hewani, Minyak dan lemak, Buah dan biji.

Tabel 2. 23. Skor Pola Pangan Harapan Kota Parepare Tahun 2013- 2023

Tahun	Capaian
2018	85
2019	86
2020	86
2021	88
2022	88

Tahun	Capaian
2023	89

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Parepare tahun 2023 adalah 89.

3) Ketahanan air

Ketahanan air adalah konsep yang lebih luas daripada ketersediaan air, yaitu upaya mendapatkan air, keamanan dari daya rusak, dan penyediaan air yang berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan. Ketahanan air mencakup tiga pilar dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Ketahanan air juga dilengkapi dengan dua pilar pendukung yaitu pengembangan sistem informasi SDA dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Ketahanan air sangat vital dalam kehidupan manusia, dan terkait erat dengan ketahanan pangan dan energi. Masyarakat dunia telah sependapat bahwa ketahanan air perlu diperhatikan, baik untuk pengelolaan sumber daya air, juga dalam pembangunan berkelanjutan pada umumnya, namun belum ada kesepakatan mengenai bagaimana mendefinisikan ketahanan air.

Kapasitas Air Baku (m³/detik)*

Kapasitas air baku adalah konsep yang berkaitan dengan perencanaan penyediaan air bersih, yang harus memenuhi konsep 3K yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air yang perlu atau tidak perlu diolah menjadi air bersih. Air baku meliputi air hujan, air tanah, air sumur resapan, dan air badan seperti danau dan sungai.

Kapasitas air baku PDAM Kota Parepare, Sulawesi Selatan, adalah 50 liter per detik. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekitar 50 ribu jiwa.

PDAM Parepare memiliki lima unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Sungai Karajae, Jalan Moh. Yusuf, dengan kapasitas terpasang sebagai berikut: IPA 1: 40 liter/detik, IPA 2: 40 liter/detik, IPA 3: 40 liter/detik, IPA 4: 40 liter/detik, IPA 5:

20 liter/detik.

PDAM Parepare juga memiliki dua sumur dalam dengan kapasitas 20 liter per detik.

Tabel 2. 24. Kapasitas Air Baku Kota Parepare Tahun 2013-2023 (m³/detik)

Tahun	Capaian
2018	407,85
2019	339,27
2020	337,78
2021	270,15
2022	253,11
2023	337

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Konsep akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat dengan mengolah sumber air baku sesuai dengan baku mutu yang telah di tentukan. Air yang telah melalui proses pengolahan akan didistribusikan ke masyarakat agar mendapatkan air bersih.

Air yang layak minum adalah air yang:

- Berwarna jernih
- Tidak berbau
- Rasanya tawar
- Tidak terpapar sinar matahari secara langsung
- Bebas dari sumber pencemaran, seperti binatang yang membawa penyakit, logam atau bahan kimia lainnya

4) Indeks Risiko Bencana

Tabel 2. 25. Indeks Risiko Bencana

Tahun	Capaian
2019	155,2
2020	155,2
2021	0,3
2022	0,42
2023	141,26

5) Persentase Penurunan Emisi GRK

Tabel 2. 26. Persentase Penurunan Emisi GRK

Tahun	Capaian
2021	0,3
2022	0,42
2023	0,41

I. Kondisi Demografi

Berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistika, melihat tabel di bawah, pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Parepare adalah sebanyak 118.842 jiwa kemudian

meningkat 11.000 jiwa pada tahun 2010 menjadi 129.262. Jumlah penduduk sejak tahun 2010 ke 2019 bertambah rata-rata sebanyak 1000 hingga 2500 penduduk pertahun. Namun, pada tahun 2020 terjadi penambahan penduduk sebanyak 6.274 jiwa dari tahun sebelumnya atau meningkat menjadi 151.454 jiwa. Jumlah angka pada tahun 2021 adalah 152.922 jiwa. Tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah penduduk Kota Parepare menjadi 154,854 per satuan ribu jiwa.

Tabel 2. 27. Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2013-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Parepare
2009	118.842
2010	129.262
2011	130.582
2012	132.048
2013	135.200
2014	136.903
2015	138.699
2016	140.423
2017	142.097
2018	143.710
2019	145.178
2020	151.454
2021	152.922
2022	154.854
2023	158.425*

*Proyeksi Penduduk Kota Parepare Sumber: pareparekota.bps.go.id

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2013 adalah Kecamatan Soreang dengan jumlah penduduk mencapai 45.551 jiwa, kemudian menyusul Kecamatan Bacukiki barat dengan jumlah penduduk 40.908 jiwa, kemudian menyusul Kecamatan Ujung dengan jumlah penduduk 33.570 jiwa dan terakhir Kecamatan Bacukiki dengan jumlah Penduduk terkecil sebesar 15.171 jiwa. Hingga tahun 2022, Kecamatan Soreang tetap menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi dengan jumlah penduduk sebanyak 47.033 jiwa. Kemudian Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 45.934 jiwa, Kecamatan Ujung dengan jumlah penduduk 33.758 jiwa dan Kecamatan Bacukiki 28.129 jiwa. Untuk jumlah penduduk berdasarkan distribusi (menurut kecamatan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 28. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Parepare Tahun 2013-2023

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN DISTRIBUSI				
	BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	UJUNG	SOREANG	PAREPARE
2013	15.171	40.908	33.570	45.551	135.200
2014	16.753	41.697	33.684	44.769	136.903
2015	17.349	42.313	34.006	45.031	138.699

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN DISTRIBUSI				
	BACUKIKI	BACUKIKI BARAT	UJUNG	SOREANG	PAREPARE
2016	17.953	42.900	34.305	45.265	140.423
2017	18.567	43.480	34.586	45.464	142.097
2018	19.190	44.033	34.847	45.640	143.710
2019	21.680	45.130	34.170	47.280	148.260
2020	25.511	45.197	33.843	46.903	151.454
2021	26.327	45.660	33.863	47.072	152.922
2022	28.129	45.934	33.758	47.033	154.854
2023	27.424	47.733	36.479	48.673	160.309

Sumber: BPS Kota Parepare; KLHS RPJPD Kota Parepare tahun 2025-2029

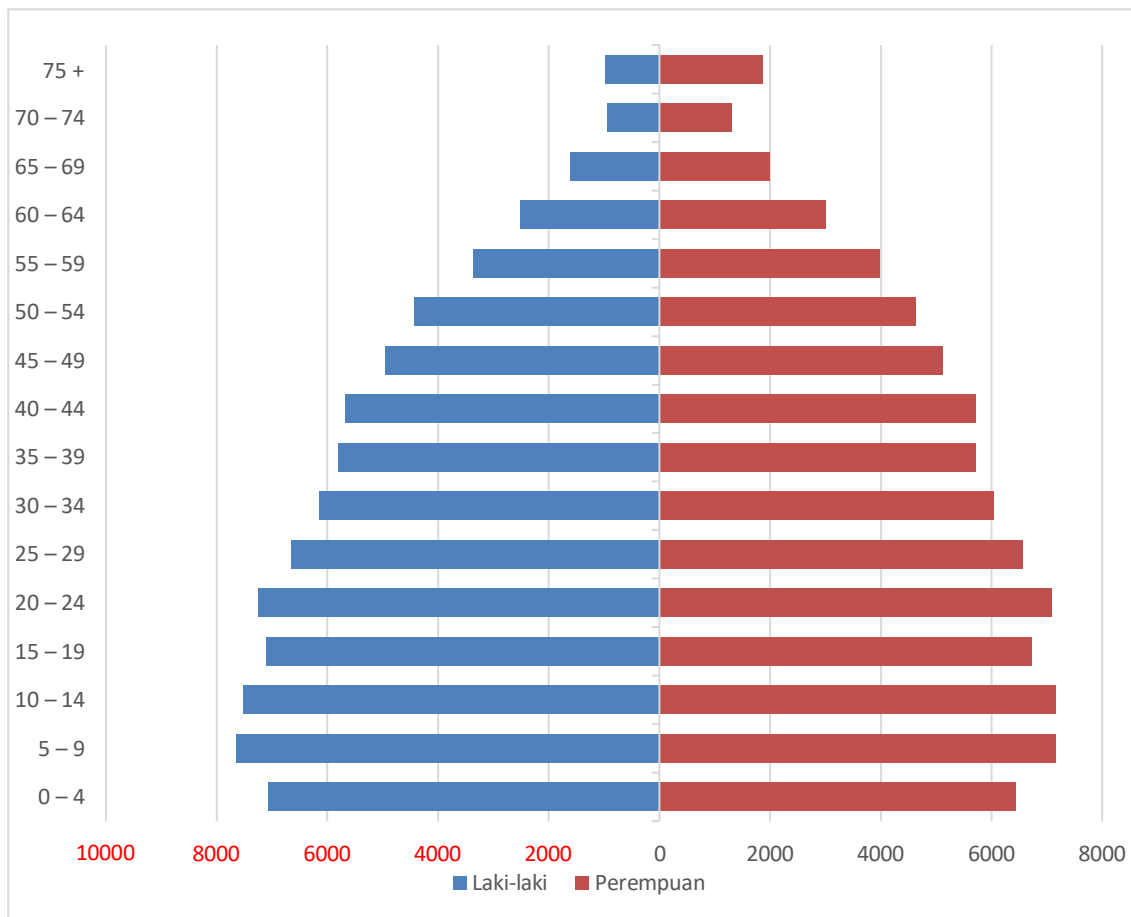
Tabel 2. 29. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2023

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Orang/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bacukiki	17,11	99,13	411
Bacukiki Barat	29,78	97,97	3.672
Ujung	22,76	98,62	3.228
Soreang	30,36	100,24	5.843
Parepare	100,00	99,00	1.614

Sumber: BPS Kota Parepare Tahun 2023

Pada tabel ini lebih lanjut menggambarkan kepadatan Penduduk Kota Parepare, dimana kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Soreang dengan tingkat kepadatan 5.646 Orang/km² dengan persentase penduduk mencapai 30,78 persen dari total penduduk Kota Parepare. Disusul Kecamatan Bacukiki Barat dengan tingkat kepadatan 3.533 Orang/km² dengan persentase penduduk mencapai 29,66 persen. Kecamatan Ujung dengan tingkat kepadatan 2.987 Orang/km² dan persentase penduduk mencapai 21,80 persen. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Bacukiki yaitu 422 Orang/km² dengan persentase penduduk mencapai 18,16 persen. Tingkat kepadatan Kota Parepare pada tahun 2022 mencapai 1.559 Orang/km².

Untuk dapat melihat kondisi kependudukan suatu daerah tergambar pada jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Parepare terkategori sebagai tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.



Gambar 2. 9. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2022

Tabel 2. 30. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/ Sex (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	-7078	6.442	13.520
5 - 9	-7644	7.171	14.815
10 - 14	-7521	7.160	14.681
15 - 19	-7114	6.730	13.844
20 - 24	-7259	7.100	14.359
25 - 29	-6660	6.558	13.218
30 - 34	-6148	6.053	12.201
35 - 39	-5806	5.717	11.523
40 - 44	-5689	5.719	11.408
45 - 49	-4954	5.122	10.076
50 - 54	-4440	4.630	9.070

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/ Sex (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
55 - 59	-3374	3.988	7.362
60 - 64	-2527	2.998	5.525
65 - 69	-1609	1.985	3.594
70 - 74	-945	1.316	2.261
75 +	-985	1.867	2.852
Jumlah	-79753	80.556	160.309

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2023

Pada tabel ini terlihat bahwa kelompok umur 0-4 tahun merupakan kelompok umur dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 14.949 jiwa atau 9,65 persen dari populasi, kemudian disusul kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 13.707 jiwa atau 8,85 persen dari populasi, dan kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 13.398 jiwa atau 8,65 persen dari populasi. Juga terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk Laki-laki. Penduduk perempuan mencapai 78.066 jiwa atau 50,41 persen sedangkan laki-laki mencapai 76.788 jiwa atau 49,5 persen.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

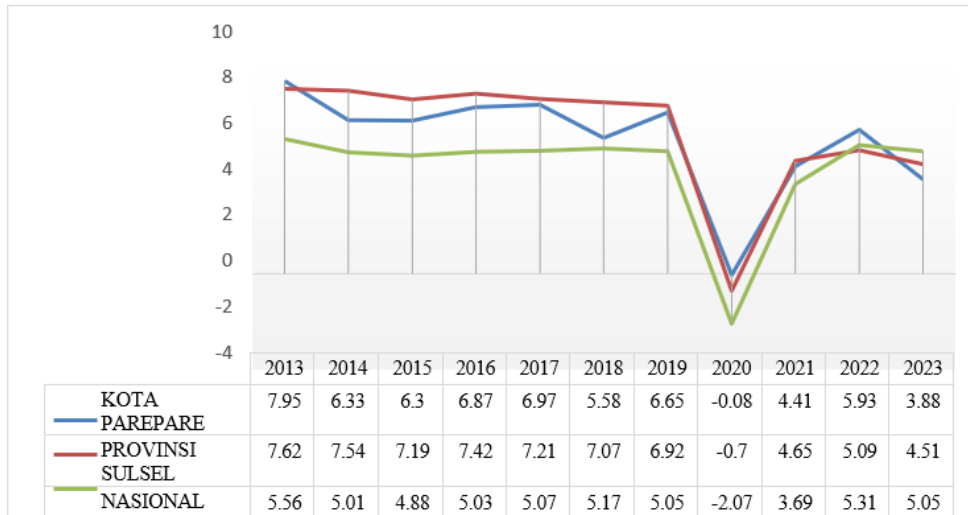
A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 1994 hingga tahun 2003, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan 1993 sebagai tahun dasar dan tahun 2004-2012 pertumbuhannya dihitung berdasarkan tahun dasar 2000. Namun pada tahun 2013 hingga saat ini, pertumbuhan dihitung dengan harga konstan 2010. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kota Parepare turun 1,62 poin dari tahun sebelumnya. Angka ini jauh lebih tinggi dari penurunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang masing-masing turun 0,08 dan 0,55 poin dari tahun 2013. Pada tahun 2015 kembali turun ke angka 6,3 kemudian turun lagi 10 poin pada dua tahun berikutnya menjadi 5,03 di tahun 2016 dan 5,07 di tahun 2017.

Laju pertumbuhan ekonomi baik ditingkat Nasional maupun regional cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tumbuh menjadi 5,58% (provinsi 7,07% dan nasional 5,17%), sebelum kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 6,65% (provinsi 6,92% dan nasional 5,05%). Selanjutnya pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi disemua tingkatan mengalami kontraksi yang cukup dalam sebagai dampak dari pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare -0,08%, lebih tinggi dibanding dengan Sulawesi Selatan sebesar -0,07% dan nasional sebesar -2,07. Sedangkan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional dan Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Parepare-SulSel-Nasional mengalami peningkatan positif menjadi 4,41-4,65-3,69. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi daerah Kota Parepare mencapai 5,93 merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 5,09 dan Nasional yaitu 5,31. Pertumbuhan ekonomi pada 2022 ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan real estate serta belanja pembangunan pemerintah.

Kinerja Ekonomi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2020 menghadapi tekanan yang sangat berat akibat pandemi COVID-19 yang dimulai di awal tahun hingga saat ini ditahun 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi berkelanjutan. Namun, dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Parepare dalam menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 mampu menahan laju kelesuan ekonomi Kota Parepare sehingga terkontraksi tidak terlalu dalam. Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional, sehingga kontraksi ekonomi yang dialami secara nasional dan regional sangat mempengaruhi ekonomi Kota Parepare.

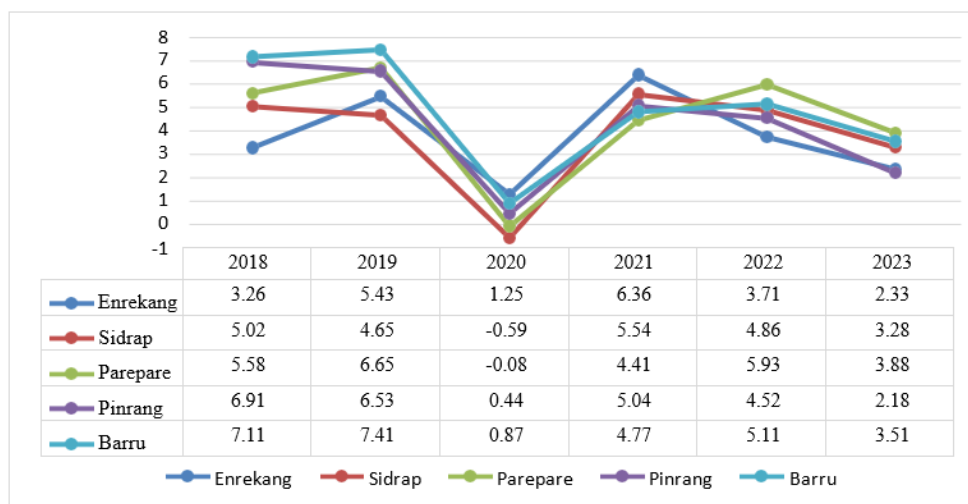
Menilik 10 (sepuluh) tahun Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare terhadap angka capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id

Gambar 2. 10. Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 (persen)

Berikut merupakan data grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah se-Ajatappareng tahun 2019-2023.



Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Gambar 2. 11. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Se- Ajatappareng Tahun 2018-2023

Kinerja Ekonomi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2020 menghadapi tekanan yang sangat berat akibat pandemi COVID-19 yang dimulai di awal tahun hingga saat ini ditahun 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi berkelanjutan. Namun, dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Parepare dalam menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 mampu menahan laju kelesuan ekonomi Kota Parepare sehingga terkontraksi tidak terlalu dalam. Pertumbuhan ekonomi Kota

Parepare sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional, sehingga kontraksi ekonomi yang dialami secara nasional dan regional sangat mempengaruhi ekonomi Kota Parepare.

B. PDRB Per Kapita

Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah yaitu PDRB per Kapita, PDRB per Kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan Masyarakat merupakan salahsatu sasaran pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan baik yang bersifat mendukung maupun yang langsung dirasakan oleh Masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan. PDRB per kapita adalah salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran kependudukan disuatu daerah dalam waktu tertentu.

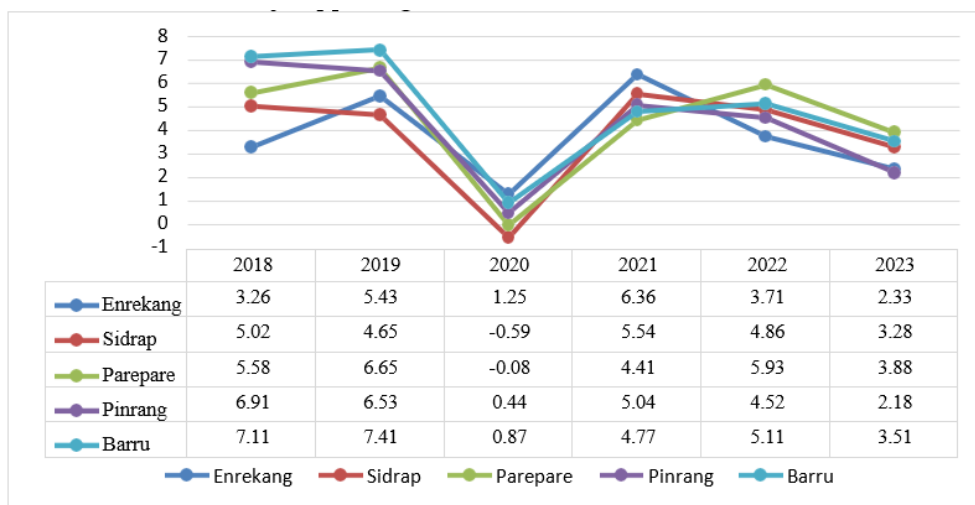
PDRB per kapita Kota Parepare menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Berdasarkan indikator ini dapat diketahui bahwa secara rata-rata penduduk Parepare di tahun 2022 mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar Rp 56,16 juta.

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, PDRB per kapita Kota Parepare selalu meningkat. Tercatat pada tahun 2013 tingkat PDRB perkapita Kota Parepare sebesar Rp 29,15 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 32,39 juta pada tahun 2014 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Kota Parepare telah mencapai Rp. 49,80 juta dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 49,92 juta. Pada tahun 2021 menjadi Rp. 51,18 juta selanjutnya tahun 2022 menjadi Rp 56,16 juta PDRB per kapita.

Pendapatan per kapita Kota Parepare mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan ini masih selalu di bawah dari PDRB per kapita secara nasional maupun regional. Melihat tren pertumbuhan nilai PDRB per kapita Kota Parepare terus meningkat ditiap tahunnya. Hingga tahun 2021 mencapai angka Rp. 51,18 juta. Pada nilai PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 masing-masing Rp. 52,71 juta ke Rp. 57,03 juta. Hingga pada tahun 2020 terjadi penurunan ke angka Rp. 56,51 juta dan meningkat kembali di tahun 2021 sebesar Rp. 59,66 juta. Adapun PDB per kapita nasional tahun 2017-2019 mengalami kasus yang sama pada tingkat nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang meningkat namun terjadi penurunan angka di tahun 2020 sebesar Rp. 56,90 juta dari

angka Rp. 59,10 juta di tahun 2019. Hingga pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp. 5,3 juta atau sama dengan Rp. 62,20 juta.

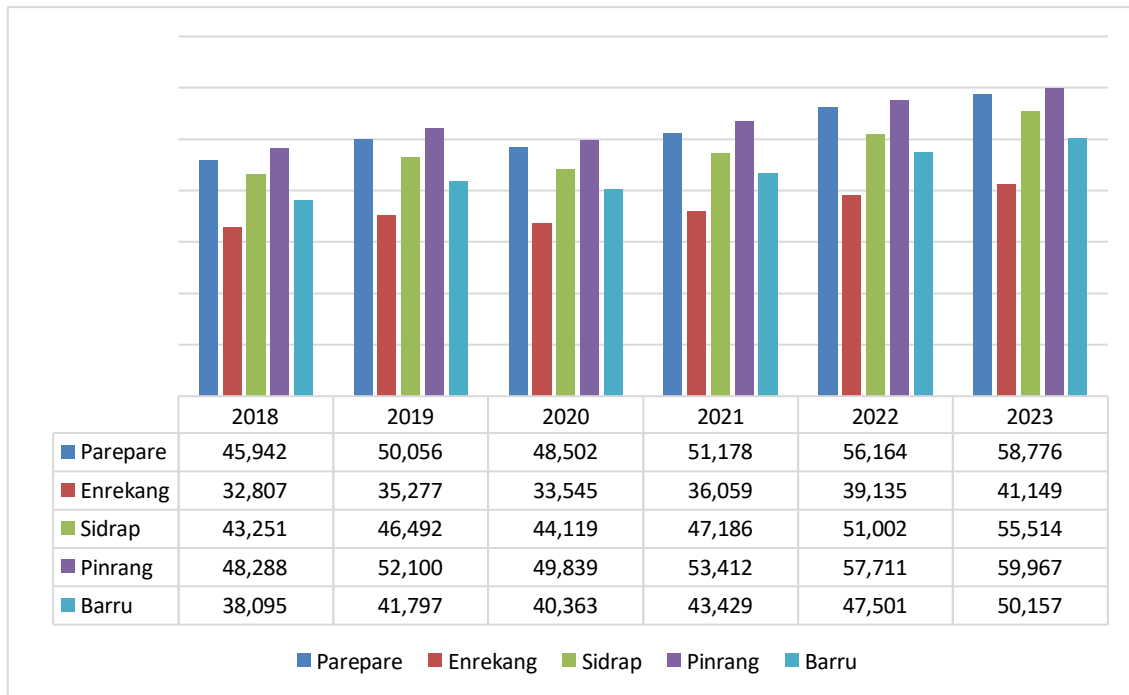
Tahun 2020, PDRB Sulawesi Selatan mencapai Rp. 56,51 juta dan PDB per kapita nasional mencapai Rp. 56,90 juta. Namun demikian, PDRB per Kapita Kota Parepare dapat ditingkatkan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, sedangkan PDRB per kapita Sulawesi Selatan dan PDB per kapita nasional mengalami penurunan. Tahun 2021 PDRB per kapita Kota Parepare, PDRB Sulawesi Selatan, dan PDB Nasional meningkat kembali. Melihat tren capaian nilai PDRB per kapita Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id

Gambar 2. 12. Nilai PDRB per Kapita Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023

Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita daerah lain se-Ajatappareng maka dapat dilihat pada grafik di bawah:



Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

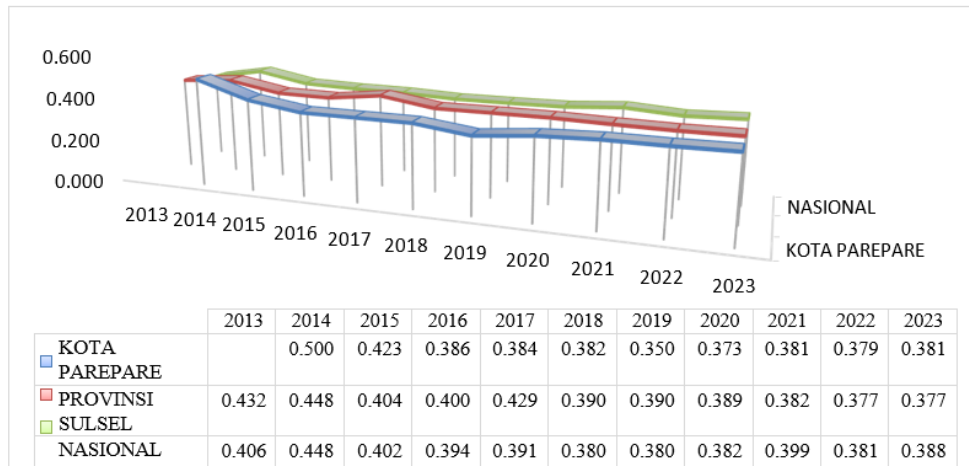
Gambar 2. 13. Perbandingan PDRB per Kapita se-Ajatappareng Tahun 2018-2023

C. Gini Ratio

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisien gini mendekati satu. Indeks Gini Kota Parepare dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami tren positif atau kecenderungan membaik, kecuali pada tahun 2020 saat merebaknya virus corona. Indeks gini Kota Parepare tahun 2014 sebesar 0,5 dan turun menjadi 0,423 pada tahun 2014, kemudian turun kembali menjadi 0,384 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018 turun masing-masing sebanyak 0,002 poin pertahun menjadi 0,384 di tahun 2017 dan 0,382 di tahun 2018. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan indeks gini kembali meningkat menjadi 0,373 pada tahun 2020. Di tahun 2021 indeks gini rasio terlihat pada angka 0,381.

Indeks Gini Kota Parepare sepanjang tahun 2013-2022 masih lebih baik dibanding Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2018, indeks gini Kota Parepare kembali menurun menjadi 0,382, Sulawesi Selatan sebesar 0,397, dan nasional sebesar 0,389. Pada tahun 2019- 2020, indeks gini Kota Parepare masing-masing sebesar 0,350 dan 0,373, sedangkan Sulawesi Selatan sebesar 0,389 dan

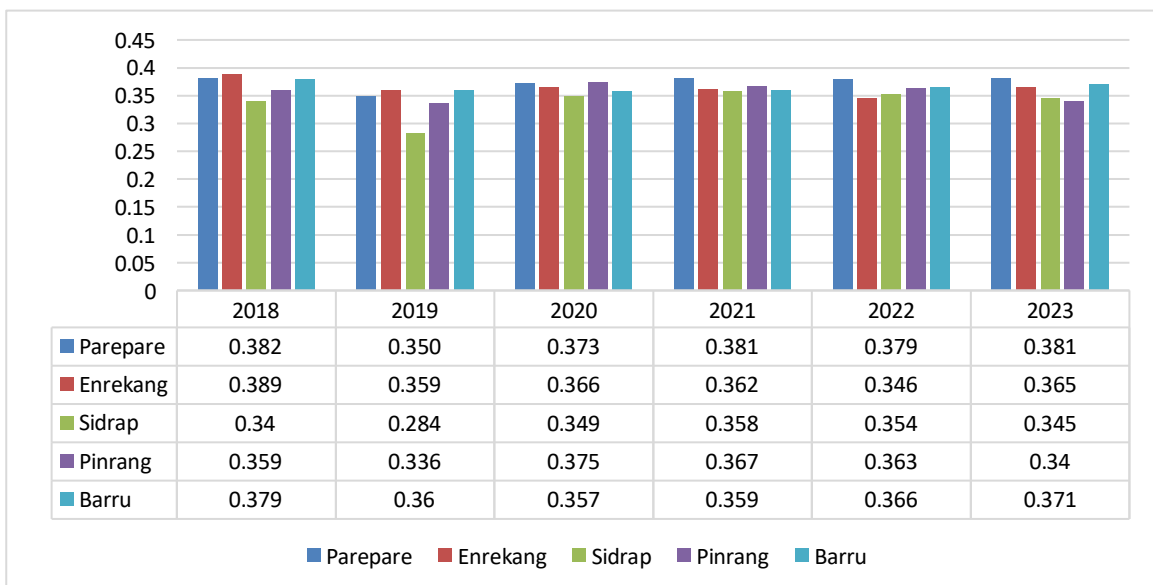
Nasional sebesar 0,382 dan 0,381. Menilik sepuluh tahun sejak capaian Indeks Gini Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sejak tahun 2013 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id

Gambar 2. 14. Indeks Gini Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2022

Indeks gini di seluruh daerah dalam perbandingan antara daerah se-Ajatappareng secara lengkap dapat dilihat pada tabel grafik berikut:



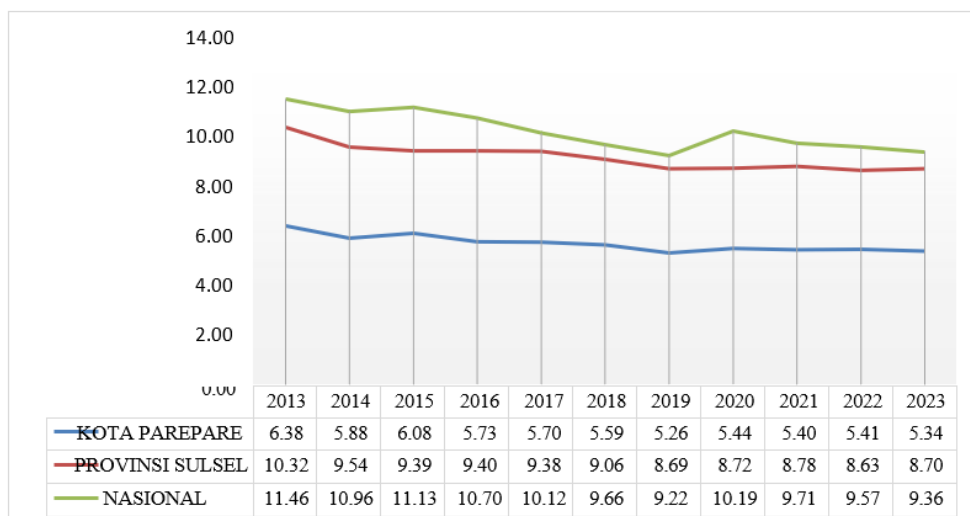
Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2023

Gambar 2. 15. Perbandingan Indeks Gini se-Ajatappareng Tahun 2018-2023

D. Tingkat Kemiskinan

Mengacu pada data BPS, persentase penduduk miskin di Kota Parepare pada tahun 2013 sebesar 6,38 persen. Kemudian turun 0,5 persen pada tahun 2014 menjadi 5,88 persen namun naik kembali di tahun berikutnya menjadi 6,08 persen.

Empat tahun berikutnya terus mengalami penurunan berturut-turut menjadi 5,73 persen di tahun 2015, 5,70 persen di tahun 2016, 5,59 persen di tahun 2017, dan 5,26 persen di tahun 2018. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan angka kemiskinan di Kota Parepare kembali meningkat menjadi 5,44 persen. Di tahun 2021 angka kemiskinan berapa pada titik 5,40 persen sebagai tahun pemulihan ekonomi. Tahun 2022, angka kemiskinan menjadi 5,41 persen. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan penghasilan yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat adalah dengan meningkatkan keterampilan/keahlian seseorang sehingga semakin meningkat peluang seseorang untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Dan, salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id

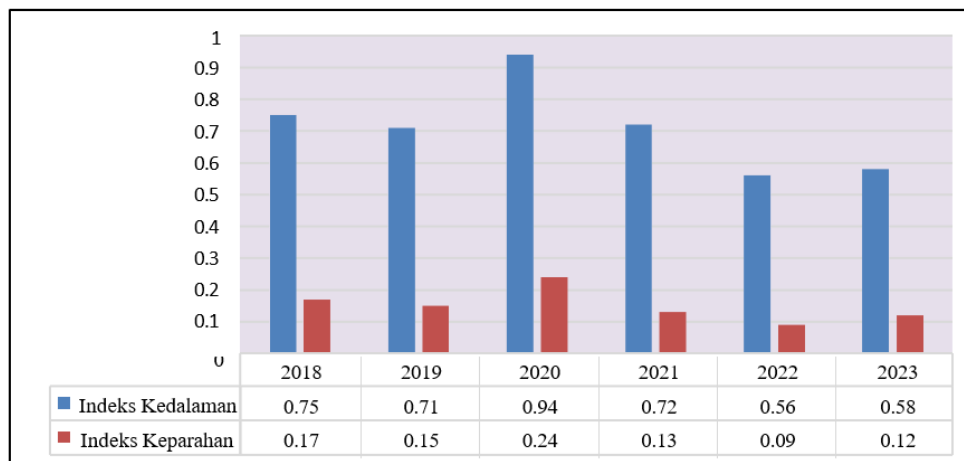
Gambar 2. 16. Kondisi Kemiskinan Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 (Persen)

Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dalam suatu daerah, maka penting mengetahui indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dalam suatu daerah. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya merupakan gambaran

mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeksnya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Parepare sepanjang tahun pada tahun 2018 menurun menjadi 0,75 dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 0,71. Namun, pada tahun 2020 indeksnya meningkat menjadi 0,94 akibat adanya pandemi COVID-19. Tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan di Kota Parepare menunjukkan angka 0,72 yang terjadi pengurangan sebesar 0,22.

Demikian pula Indek Keparahan Kemiskinan yang tahun 2018 menjadi 0,17. Pada tahun 2019, kembali mengalami penurunan menjadi 0,15, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,24 dan tahun Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Parepare adalah 0,13 yang menunjukkan penurunan angka dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Parepare pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2. 17. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2018- 2023

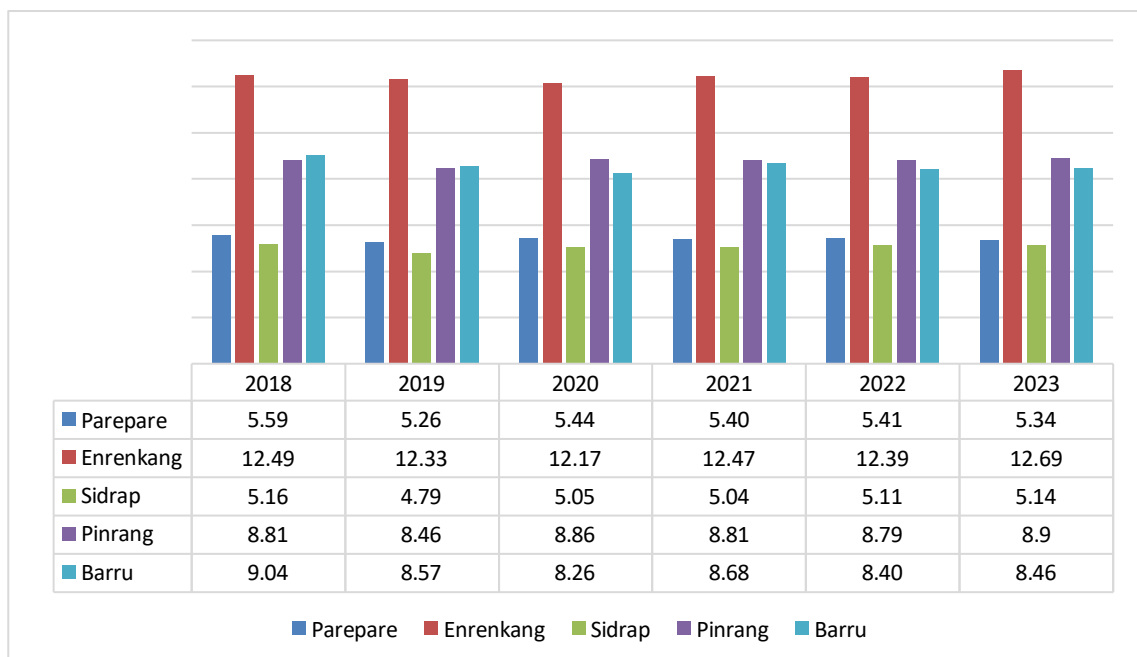
Ini mengindikasikan bahwa baik jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) maupun kesenjangan (gap) pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri (P2), sebelum tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan angka ini menunjukkan terjadinya naiknya taraf hidup penduduk miskin, sekalipun mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, angka P1 maupun P2 kembali mengalami peningkatan di tahun 2020. Yang kemudian di tahun 2021 kembali mengalami penurunan angka. Hal ini dapat terlihat pada table berikut:

Tabel 2. 31. Kondisi Kemiskinan Kota Parepare 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	323.839	323.839	363.710	383,471	402.126	445.032
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	8,01	7,62	7,96	7,93	8,01	7.98
Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,59	5,26	5,44	5,40	5,41	5,34
Inderks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,75	0,71	0,94	0,72	0,56	0,58
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,15	0,24	0,13	0,09	0,12

Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Tingkat kemiskinan di Kota Parepare relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah se-ajatappareng. Maka, Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Kota Parepare sebesar 5,41%, lebih rendah dibanding Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Barru. Namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten Sidrap, Perbandingan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistikan Sulawesi Selatan

Gambar 2. 18. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Parepare Dengan Daerah Lain se-Ajatappareng Tahun 2018- 2023

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi saja namun juga memperhatikan pembangunan sosial sehingga pembangunan daerah menggambarkan pembangunan yang menyeluruh (inklusif). Indikator sosial utama yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manasai (IPM) yaitu; Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup serta Indeks Paritas

Daya Beli.

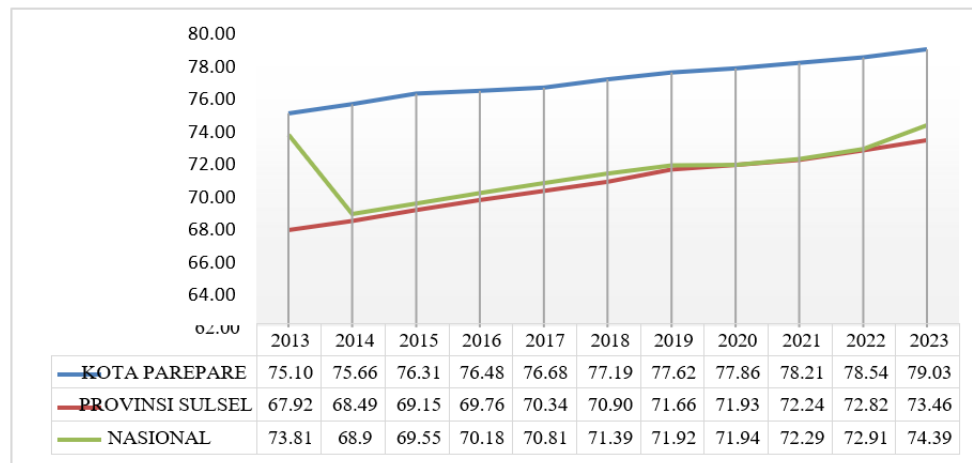
A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kota Parepare yang terus mengalami kemajuan menunjukkan bahwa kualitas hidup di Kota Parepare semakin baik. Komponen pembentuk IPM Kota Parepare yang terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990). Pembangunan manusia lebih difokuskan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kebebasan untuk memilih. Dengan kata lain, pembangunan dimaksudkan untuk menciptakan alternatif pilihan yang lebih banyak bagi manusia.

Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan kondisi pembangunan yang berkualitas, menggambarkan kondisi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan hidup layak. Secara absolut, Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare mengalami peningkatan secara paralel dengan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejak tahun 2013 pencapaian IPM Kota Parepare jauh lebih tinggi dibanding IPM Nasional dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 IPM Kota Parepare berada di angka 75,10 sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan 67,92 dan Nasional di angka 73,81. Pada tahun 2014, IPM Kota Provinsi Sulawesi Selatan hanya tercatat pada angka 68,49 dan nasional sebesar 68,9 sedangkan IPM Kota Parepare telah bedara di angka 75,66. Hingga pada tahun 2023, IPM Kota Parepare telah mencapai angka 79,03 sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih berada di angka 73,46 dan 74,39.

Melihat tren peningkatan IPM Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id

Gambar 2. 19. Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013- 2023

IPM didorong oleh peningkatan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH), sedangkan dimensi pengetahuan yang diwakili dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut. Selain itu, IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan.

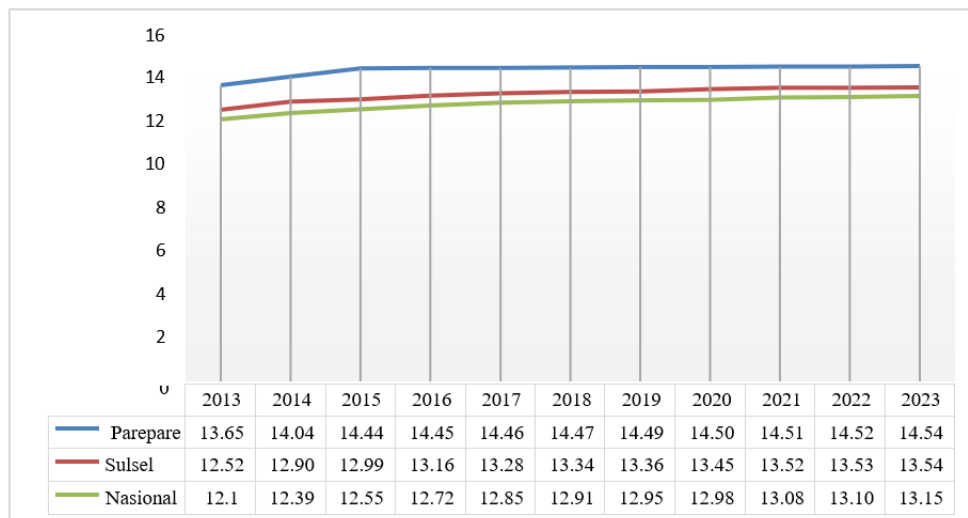
Berikut adalah indikator yang termuat dalam Indek Pembangunan Masyarakat, diantaranya:

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena mengikuti program wajib belajar, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung pada penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan mencerminkan keberhasilan program pendidikan yang telah diusahakan. Beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah salah satunya adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka

harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Parepare terus mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatannya sangatlah kecil sehingga dapat dikatakan terjadi perlambatan pertumbuhan angka harapan sekolah. Perbandingan HLS antara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023; bps.go.id

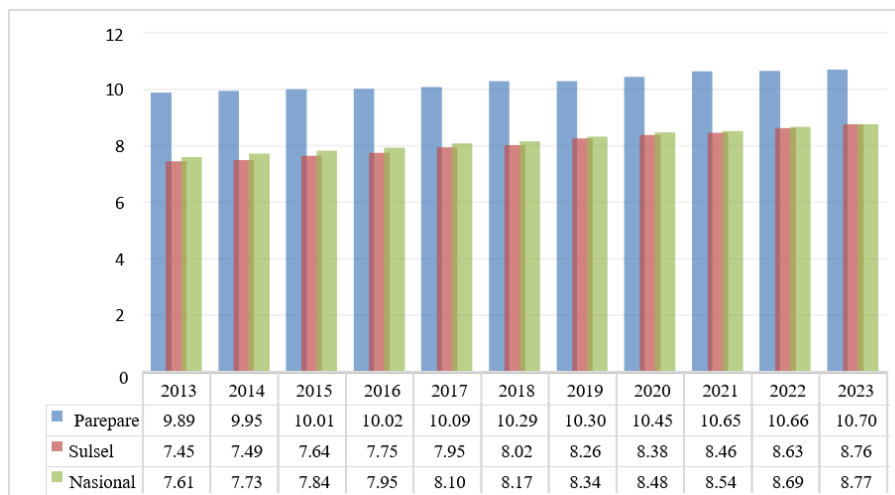
Gambar 2. 20. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023

Jika dilihat, angka HLS Kota Parepare lebih tinggi dibanding Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013, angka HLS Kota Parepare 13,65 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Parepare yang berumur 7 tahun ke atas dapat menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTA bahkan sampai semester 4-5 perguruan tinggi atau setara dengan diploma II. Sedangkan angka harapan lama sekolah Propinsi Sulawesi Selatan di tahun 2013 sebesar 12,52 tahun sehingga bisa diartikan bahwa rata-rata penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang berumur 7 tahun ke atas diperkirakan dapat menyelesaikan pendidikannya sampai semester 2 perguruan tinggi atau setara dengan diploma I. Sedangkan angka HLS nasional adalah 12,1 tahun atau setara dengan semester 2 perguruan tinggi atau diploma I. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Parepare tahun 2023 adalah 14,54, capaian Provinsi Sulawesi Selatan adalah 13,54, dan Nasional adalah 13,15.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan penduduk

berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. RLS tidak termasuk tahun yang mengulang. Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Kegunaan dengan dilakukannya perhitungan angka rata-rata lama sekolah adalah untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Berikut adalah Perbandingan RLS antara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

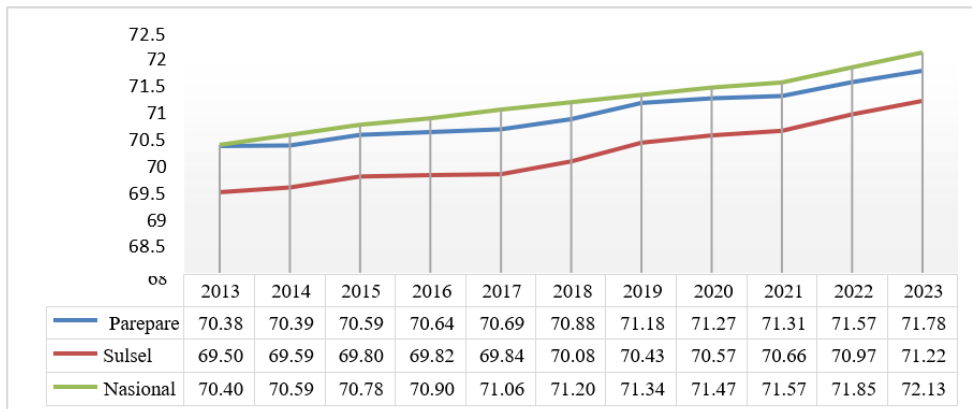
Gambar 2. 21. Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023

Seperti halnya dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah di Kota Parepare juga mengalami peningkatan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, angka RLS Kota Parepare jauh lebih tinggi. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah Kota Parepare 9,89 tahun sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan 7,45 tahun dan nasional 7,61 tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun angka RLS Kota Parepare masih lebih tinggi dibandingkan dengan RLS Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Tercatat pada tahun 2023 RLS Kota

Parepare adalah 10,7 tahun sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan 8,76 tahun dan Nasional 8,77 tahun.

3) Angka Umur Harapan Hidup

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Secara umum, kualitas kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin meningkat berdasarkan rata-rata angka harapan hidup yang semakin panjang. Secara terperinci dapat dilihat pada grafik berikut:



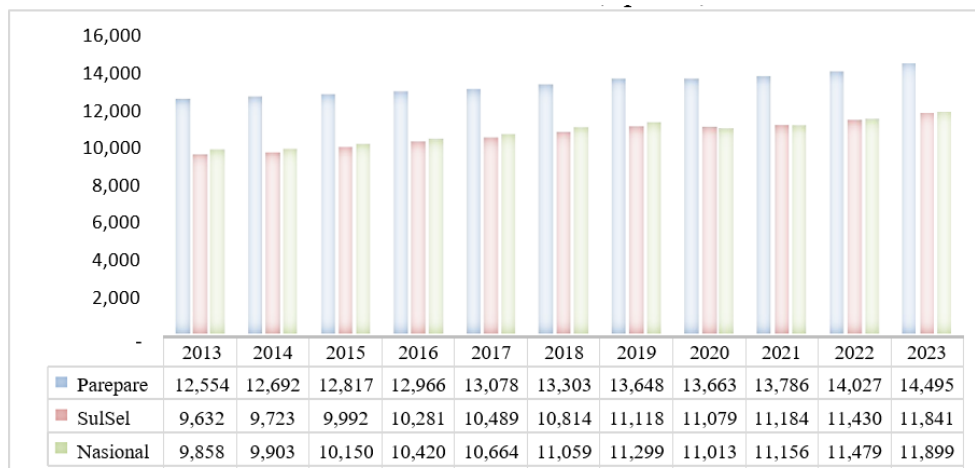
Sumber : BPS Kota Parepare Dalam Angka, 2023

Gambar 2. 22. Angka Umur Harapan Hidup Kota Parepare Tahun 2013-2023

Perkembangan Angka harapan hidup Kota Parepare selama kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan menjadi 71,31 pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa target UHH dalam RPJMD sebesar 70,74 tahun telah terlampaui. Tahun 2022, Angka Umur Harapan Hidup terjadi peningkatan sebesar 0,26 persen atau sama dengan 71,57 persen. Selanjutnya, UHH Kota Parepare sepanjang tahun 2013–2022 juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Tercatat pada Badan Pusat Statistik UHH Kota Parepare tahun 2013 adalah 70,38 tahun sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan 69,50 tahun dan Nasional 70,40 tahun. Lebih lanjut pada tahun 2023 UHH Kota Parepare meningkat menjadi 71,78 tahun, Provinsi Sulawesi Selatan 71,22 tahun, dan Nasional 72,13 tahun.

4) Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita (PPP) adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan memberikan gambaran tentang tingkat daya beli masyarakat. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity – PPP). Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik. Dimensi standar hidup layak, dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Parepare untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah perbandingan Pengeluaran per Kapita antar Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional dapat dilihat pada garfik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan; Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Gambar 2. 23. Perbandingan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 (Rp. 000)

Berdasarkan grafis di atas dapat dilihat bahwa Pada Tahun 2023, pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk penduduk Kota Parepare mencapai Rp. 14,495 juta. Selama 2013-2022, pengeluaran per kapita masyarakat Parepare terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 angka pengeluaran per kapita sebesar Rp. 12,554 juta meningkat menjadi Rp. 12,692 juta di tahun 2014. Tahun 2020 hingga tahun 2022 secara konsisten meningkat pada angka Rp. 13,663 – Rp. 13,786 – Rp. 14,027 juta. Tingkat pengeluaran per kapita Kota Parepare jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Kota Parepare berada pada angka di atas capaian Provinsi Sulawesi

Selatan dan Nasional. Secara tren peningkatan Kota Parepare secara konsisten meningkat sejak tahun 2013 yang berada pada angka Rp. 12.554.000 secara bertahap meningkat menjadi Rp. 13.078.000 di tahun 2017, hingga menjadi angka Rp. 14.495.000 di tahun 2023.

5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relative dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang- barang dan jasa dalam suatu perekonomian.



Sumber : BPS Kota Parepare, 2023; Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023

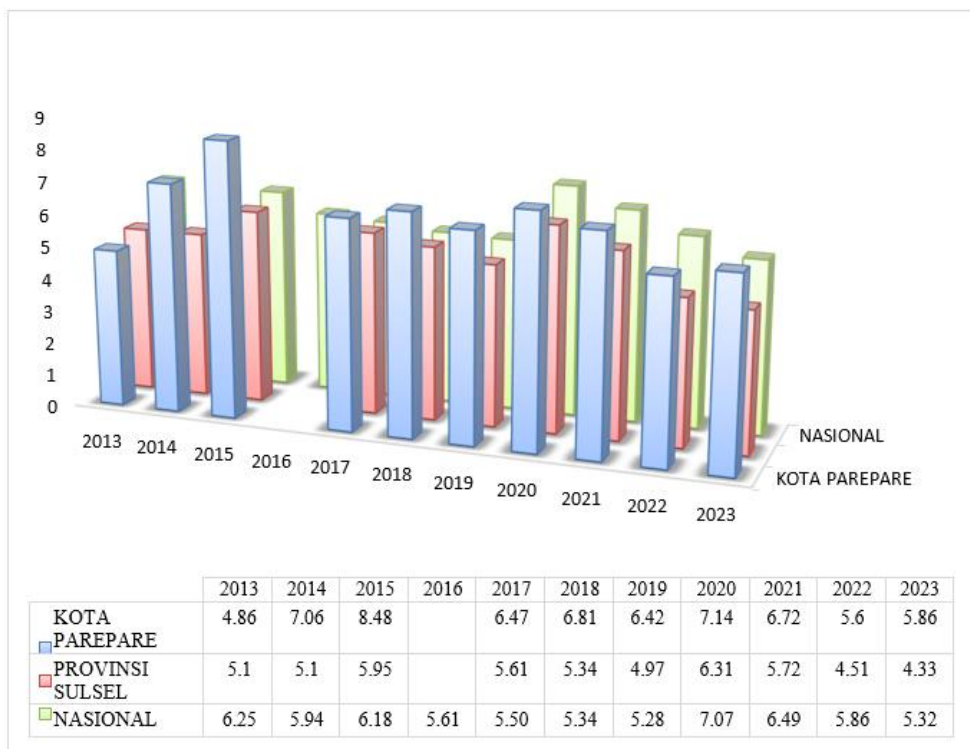
Gambar 2. 24. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013-2023

TPAK Kota Parepare demikian pula TPAK Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional berfluktuatif sejak tahun 2013 hingga tahun 2022. TPAK Kota Parepare tahun 2013 sebesar 60,49 persen kemudian meningkat menjadi 62 persen pada tahun 2014 tetapi kemudian turun kembali pada tahun 2015 di angka 60,94%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Parepare mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 65,53 persen, demikian pula TPAK Sulawesi Selatan menjadi 63,4 persen dan Nasional meningkat menjadi 67,77 persen. Pada tahun 2021, TPAK Kota Parepare menjadi 66,94 persen sedangkan provinsi Sulawesi Selatan menjadi 64,73 persen. Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) Kota Parepare berada pada angka

63,62 persen yang menurun dari tahun sebelumnya. Untuk capaian provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 66,18 persen dan 68,63 persen.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dengan kecenderungan menurun. Berikut adalah perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 sampai dengan tahun 2022:



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id

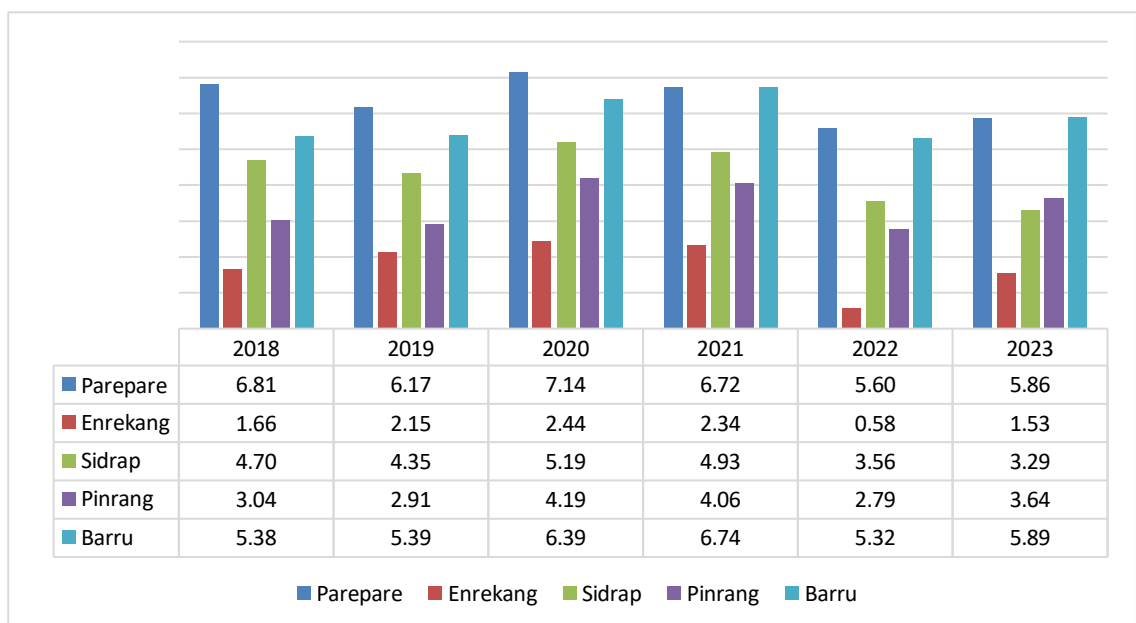
Gambar 2. 25. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023

Pada tahun 2013 TPT Kota Parepare 4,86 persen, Provinsi Sulawesi Selatan 5,1 persen, dan Nasional 6,25 persen. Namun sejak 2014 hingga 2022 TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional selalu lebih baik daripada TPT Kota Parepare. Kemudian dengan adanya pandemi COVID- 19 maka TPT Kota Parepare pada tahun 2020 kembali meningkat jauh menjadi 7,14 persen. Dan di tahun 2021 menjadi 6,72 persen. Tahun 2022, perbandingan TPT Kota

Parepare jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional adalah 5,60 persen setelah capaian TPT Nasional yaitu 5,86 persen, sedangkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,51 persen.

Walaupun angka TPT Kota Parepare cenderung mengalami perbaikan namun angkanya masih tinggi dibanding Provinsi dan Nasional. Untuk itu, masih perlu kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan agar angka TPT Kota Parepare pada tahun berikutnya dapat diturunkan dan lebih baik dari angka nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Parepare jika dibandingkan dengan TPT pada perbandingan dengan wilayah se-Ajatappareng, TPT Kota Parepare tahun 2022 berada pada angka 5.60 dari



TPT daerah Kab. Barru (5,32), Kab. Sidrap (3,56), Kab. Pinrang (2,79), dan Kab. Enrekang (0,58). Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare Dengan se-Ajatappareng Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

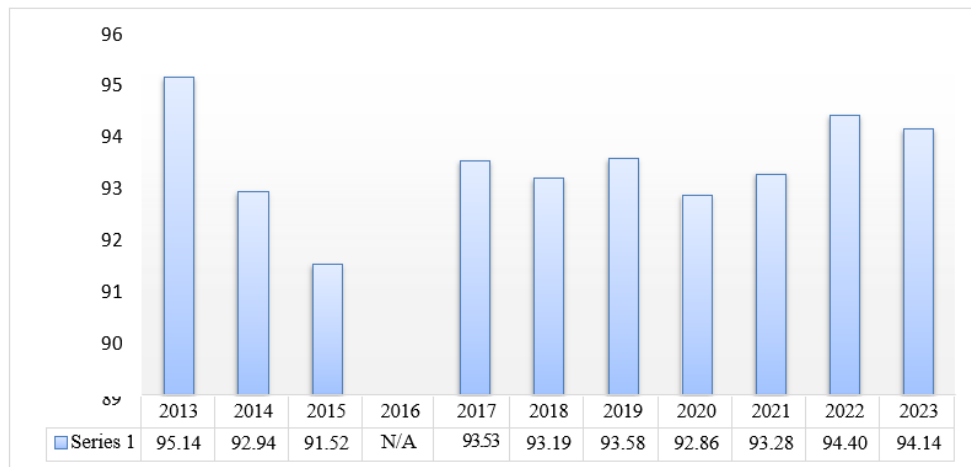
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2. 26. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Ajatappareng tahun 2018-2023

7) Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini juga dikenal sebagai Employment to Population Ratio (EPR). Semakin besar jumlah penduduk yang berusia produktif, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Sebaliknya,

semakin rendah tingkat pendidikan penduduk suatu negara, maka akan makin rendah pula angkatan kerjanya. Berikut adalah grafik Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Parepare:



Sumber : BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2. 27. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Parepare tahun 2013-2023

Tabel 2. 32. Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Parepare Tahun 2013-2023

Tahun	Penduduk yang Bekerja	Angkatan Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja
2013	51.070	53.678	95,14
2014	54.812	58.978	92,94
2015	54.599	59.658	91,52
2016	-	-	N/A
2017	63.693	68.102	93,53
2018	61.911	66.435	93,19
2019	62.183	66.446	93,58
2020	67.207	72.372	92,86
2021	69.777	74.806	93,28
2022	67.904	71.929	94,40
2023	72.522	77.036	94,14

Sumber: Kota Parepare Dalam Angka 2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2013 hingga 2015 rasio penduduk yang bekerja mengalami penurunan yang signifikan yaitu 2013 (95,14) – 2014 (92,94) – 2015 (91,52). Tahun 2017 hingga tahun 2022 berdasarkan grafik yang tersedia menunjukkan adanya fluktuasi capaian rasio penduduk yang bekerja. Selama beberapa tahun terakhir, Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja di Kota Parepare cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2020 Rasio Penduduk yang Bekerja mencapai angka 92,86 persen dengan jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 67.207 jiwa dan angkatan kerja sejumlah 72.372 jiwa. Di tahun 2021, rasio penduduk yang bekerja di Kota

Parepare adalah 93,28 persen dengan jumlah penduduk yang bekerja adalah 69.777 jiwa dan jumlah Angkatan kerja adalah 74.806 jiwa. Tahun 2022 Rasio Penduduk yang bekerja mencapai 94,40 persen, dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 67.904 jiwa dari total Angkatan kerja sebanyak 71.929 jiwa.

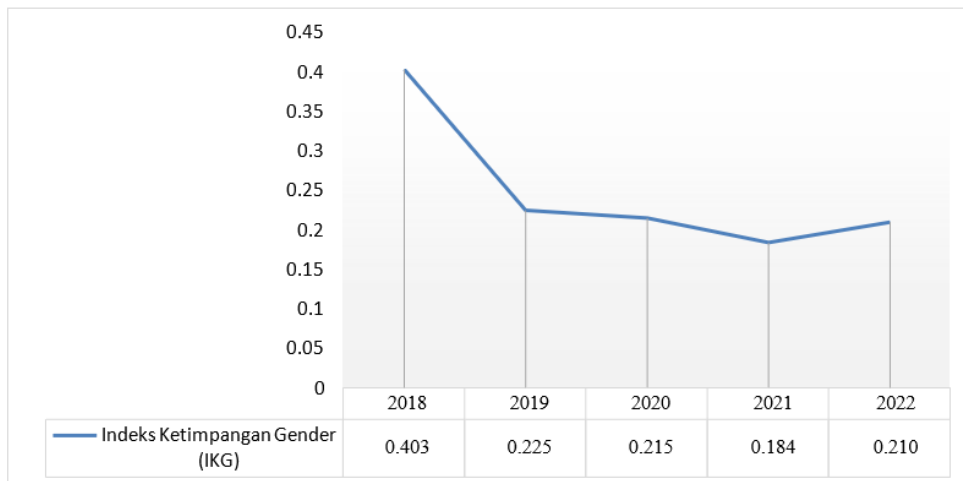
8) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2. 33. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Tahun	Capaian
2013	N/A
2014	N/A
2015	N/A
2016	N/A
2017	N/A
2018	N/A
2019	49,39
2020	51,79
2021	54,37
2022	50,12
2023	51,44

B. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Pembangunan manusia akan optimal apabila ketimpangan pencapaian antar individu rendah, terutama antargender. Untuk mengetahui ketimpangan gender diperlukan kurang yang representative dan dapat menunjukkan karakteristik ketimpangan, sekaligus memberikan petunjuk untuk solusi penyelesaian. Indeks ketimpangan gender adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian Pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara laki-laki dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Menggunakan metode yang lebih baik dibandingkan indikator terkait gender sebelumnya serta dapat diaplikasikan setiap tahun di tingkat nasional dan daerah. Semakin kecil nilai Indeks Ketimpangan Gender, semakin rendah ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Berikut adalah data Kota Parepare untuk capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG):



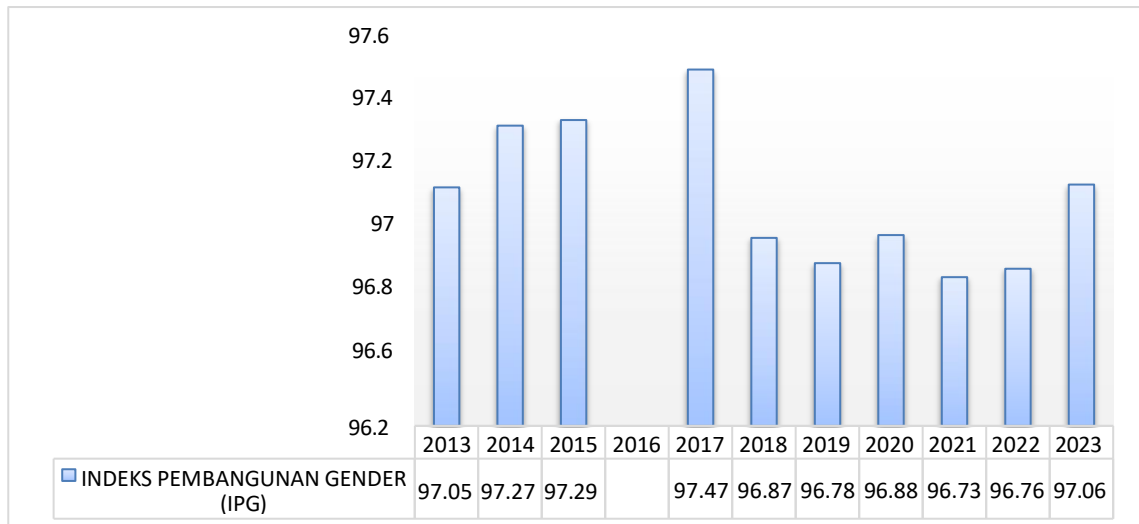
Sumber: pareparekota.bps.go.id

Gambar 2. 28. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Parepare tahun 2018-2022

Berdasarkan data grafik di atas, dapat diketahui bahwa indeks ketimpangan gender (IKG) di Kota Parepare untuk lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2018 IKG Kota Parepare adalah 0,403 yang terus menurun hingga tahun 2021, yakni 0,184. Di tahun 2022, IKG Kota Parepare meningkat keangka, 0,21. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2022, grafik indeks ketimpangan gender Kota Parepare mengalami tren positif sejak pada interval tahun 2013 hingga 2021.

C. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Komponen penghitungan IPG adalah Angka harapan hidup, harapan pendidikan, dan indeks distribusi pendapatan Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berikut adalah data Kota Parepare untuk capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG):



Sumber: pareparekota.bps.go.id

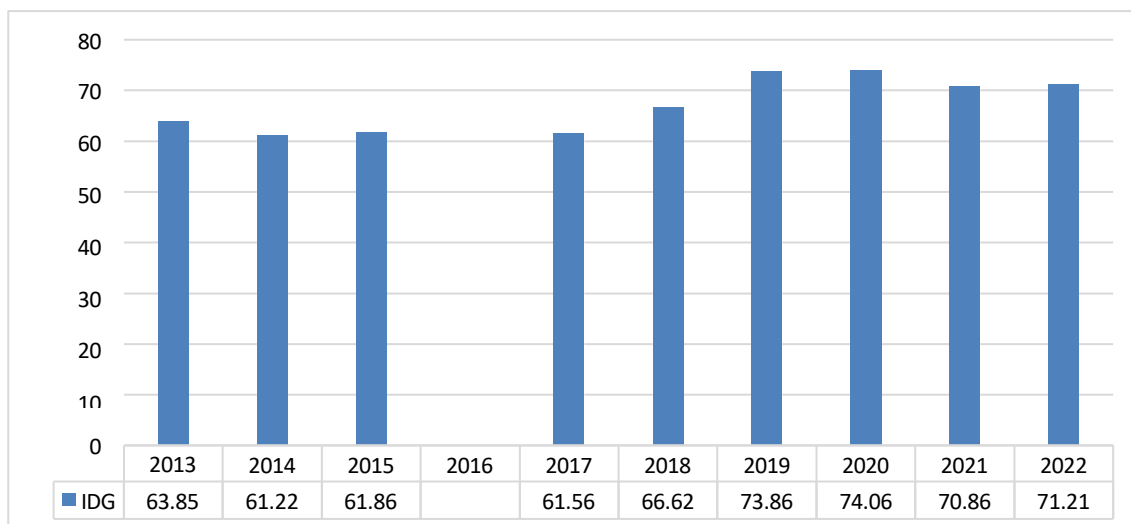
Gambar 2. 29. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Parepare tahun 2013-2023

Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan bahwa di tahun 2013 hingga tahun 2015, IPG meningkat dari 97,05 (tahun 2013) menjadi 97,29 (tahun 2015). Indeks Pembangunan Gender Kota Parepare sejak tahun 2013 hingga 2022 cenderung stagnan di kisaran angka 96,7 persen hingga 97,5 persen.

D. Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang mengukur keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

IDG dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai pemberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan.



Sumber: *sulsel.bps.go.id*

Gambar 2. 30. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Parepare tahun 2013-2023

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan menunjukkan flutuasi namun tidak begitu signifikan. sejak sepuluh tahun terakhir keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di tahun 2013 menunjukkan angka 63,85 yang berangsur meningkat menjadi 66,62 di lima tahun kemudian yakni tahun 2018. Hingga tahun 2023, meningkat menjadi 71,21.

Tabel 2. 34. Usia Harapan Hidup

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Capaian
2013	68,37	72,27	70,38
2014	68,38	72,28	70,39
2015	68,58	72,48	70,59
2016	-	-	70,64
2017	68,67	72,60	70,69
2018	68,86	72,79	70,88
2019	69,17	73,07	71,18
2020	69,28	73,15	71,27
2021	69,33	73,18	71,31
2022	69,55	73,44	71,57
2023	69,83	73,82	71,78

Sumber: *sulsel.bps.go.id*

+ Kesehatan Ibu dan Anak

Tabel 2. 35. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Tahun	Capaian
2015	76,07
2016	229,62
2017	146,09
2018	146,31
2019	146,79
2020	73,39

Tahun	Capaian
2021	228,31
2022	212,31
2023	165,91

Tabel 2. 36. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Tahun	Capaian
2021	24,28
2022	27,10
2023	26,70

+ Penanganan Tuberkulosis

Tabel 2. 37. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)

Tahun	Capaian
2015	72,22
2016	92,68
2017	47,35
2018	99,38
2019	82,67
2020	98,47
2021	62,55
2022	57,74
2023	85,99

Tabel 2. 38. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)

Tahun	Capaian
2015	118,80
2016	90,79
2017	164,34
2018	79,88
2019	87,63
2020	145,80
2021	90,48
2022	87,32
2023	69,07

Tabel 2. 39. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)

Tahun	Capaian
2015	17,32
2016	
2017	111,34
2018	115,75
2019	111,76
2020	88,33
2021	84,47
2022	82,51

Tahun	Capaian
2023	77,57

Tabel 2. 40. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Tahun	Capaian
2021	42,93
2022	43,86
2023	

Tabel 2. 41. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Tahun	Capaian
2017	15,08
2018	15,5
2019	13,99
2020	17,24
2021	18,64
2022	19,23
2023	

+ Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Tabel 2. 42. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Tahun	Capaian
2021	54,35
2022	58,26
2023	64,02

Tabel 2. 43. Indeks Perlindungan Anak

Tahun	Capaian
2021	61,62
2022	62,84
2023	

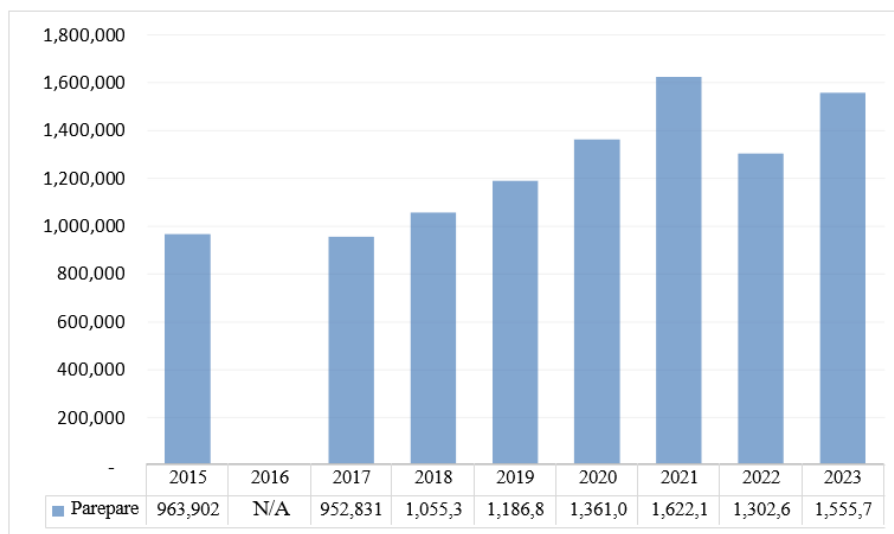
2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi dalam suatu daerah. Aspek daya saing ini terdiri atas kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, atau infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia. Kemampuan ekonomi daerah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kemampuan daerah itu sendiri untuk mempertahankan dan menarik pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa menggambarkan tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin menggambarkan bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2023

Gambar 2. 31. Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kota Parepare tahun 2018-2022 (Rupiah)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kota Parepare pada periode 2015-2023 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga per kapita Kota Parepare ditahun 2015 adalah Rp. 963.902 terus meningkat ke tahun 2018 menjadi adalah Rp. 1.055.320 yang meningkat secara berkala hingga tahun 2021 senilai Rp. 1.622.137. Tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita menurun menjadi Rp. 1.302.669 dan kemudian meningkat di tahun 2023, menjadi Rp. 1.555.706.

B. Tingkat Inflasi (%)

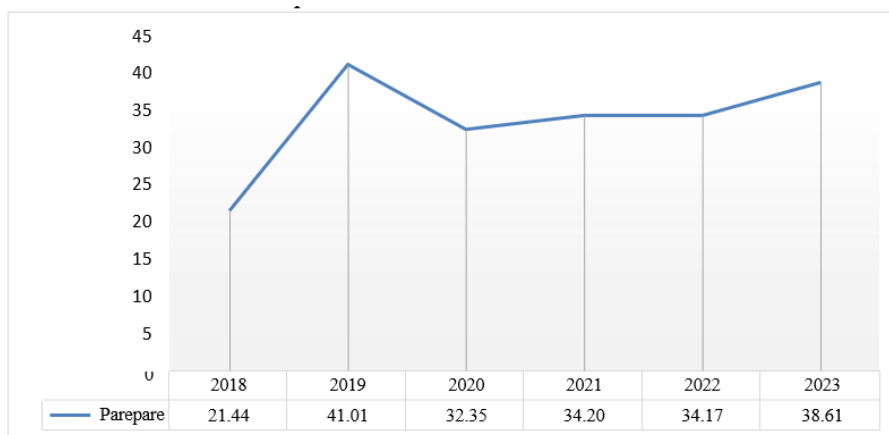
Tabel 2. 44. Tingkat Inflasi (%)

Tahun	Capaian
2013	6,31
2014	9,38
2015	1,58
2016	2,11
2017	3,43
2018	1,96
2019	2,45

Tahun	Capaian
2020	1,61
2021	4,09
2022	6,66
2023	

C. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Faktor keamanan di suatu daerah merupakan salah faktor untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang cukup baik. Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan suatu wilayah. Di Kota Parepare nampaknya masih banyak ditemukan angka kriminalitas yang tentu saja baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keinginan investor untuk menanamkan modalnya. Maka penting dilakukan penanganan terhadap kasus kriminalitas yang terjadi. Mengidentifikasi angka kriminalitas yang tertangani dalam untuk setiap 1 tahun di Kota Parepare per 10.000 penduduk adalah dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2023

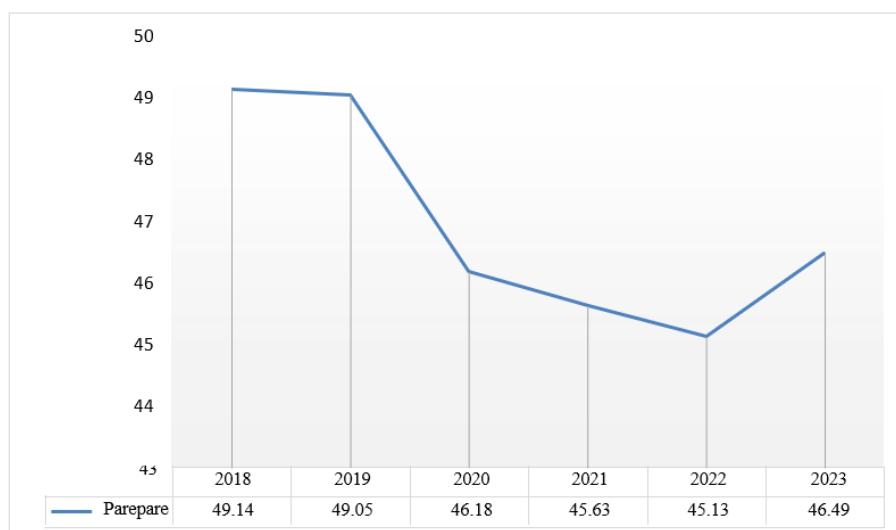
Gambar 2. 32. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Parepare 2018-2023

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Parepare tercatat di tahun 2018 sebesar 21,44 per 10.000 penduduk yang artinya bahwa terdapat 21 tindak kriminalitas yang tertangani dalam 1 tahun. Tahun 2019 angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan angka 41,01 per 10.000 penduduk, menunjukkan peningkatan yang berarti adanya peningkatan penanganan atas tindak kasus kriminalitas di tahun 2019. Tahun 2020 hingga tahun 2022, angka kriminalitas yang tertangani berada pada kisaran angka 32,35 (2020) – 34,20 (2021) – 34,17 (2022).

D. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Rasio Ketergantungan dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah.

Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan. Berikut adalah rasio ketergantungan penduduk di Kota Pare, dapat dilihat pada gambar 2.33.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2023

Gambar 2. 33. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Parepare Tahun 2018-2023

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2018 angka rasio ketergantungan sebesar 49,14 yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Parepare mempunyai beban tanggung sebanyak 49 jiwa penduduk non produktif. Di tahun 2020, rasio ketergantungan Kota Parepare menurun menjadi 46,18, dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 45,13.

Tabel 2. 45. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Tahun	Capaian
2013	9,09
2014	5,48
2015	6,15
2016	6,67
2017	6,38
2018	2,04
2019	2,09
2020	2,03
2021	2,06
2022	2,09
2023	2,36

+ Pengembangan Pariwisata

Tabel 2. 46. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Tahun	Capaian
2013	5,82
2014	6,07
2015	6,05
2016	5,79
2017	5,97
2018	6,21
2019	6,25
2020	6,30
2021	6,33
2022	6,45
2023	7,1

Tabel 2. 47. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)

Tahun	Capaian
2013	779
2014	1.104
2015	514
2016	541
2017	1.299
2018	453
2019	371

Tahun	Capaian
2020	371
2021	1.018
2022	2.222
2023	473

+ Tingkat Penguasaan IPTEK

Tabel 2. 48. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD

Tahun	Capaian
2019	0,07
2020	0,05
2021	0,05
2022	0,05
2023	0,04

Tabel 2. 49. Indeks Kapasitas Inovasi

Tahun	Capaian
2020	
2021	
2022	2,2
2023	2,89

+ Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan Ekonomi Hijau

Tabel 2. 50. Kualitas air permukaan (BOD)

Tahun	Capaian
2013	1,39 ppm
2014	1,81 ppm
2015	2 ppm
2016	2 ppm
2017	
2018	
2019	1,63 ppm
2020	
2021	1,33 ppm
2022	1,24 ppm
2023	2,6 ppm

Tabel 2. 51. Indeks Kualitas udara (N02)

Tahun	Capaian
2021	5,98
2022	5,98
2023	5,42

Tabel 2. 52. Kualitas Tutupan Lahan

Tahun	Capaian
2017	51,38
2018	51,38
2019	51,38
2020	51,38
2021	63,79
2022	63,79
2023	

Tabel 2. 53. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Tahun	(%)
2019	42,43
2020	41,92
2021	41,63
2022	39,66
2023	40

Tabel 2. 54. Net Ekspor Barang dan Jasa (BPS, PDRB Kab/Kota Menurut Pengeluaran 2018-2022)

Tahun	Capaian
2018	-647,47
2019	-792,6
2020	759,98
2021	-750,7
2022	-609,04
2023	-795,46

Tabel 2. 55. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Tahun	Capaian
2021	7.029.870,01
2022	7.098.485,127
2023	6.917.833,615

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tabel 2. 56. Angka Ketergantungan Tahun 2020-2024

Tahun	Capaian
2020	46,19
2021	45,63
2022	45,13
2023	47,63

Tabel 2. 57. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca/numerasi

Tahun	Literasi		Numerasi	
	SD	SMP	SD	SMP
2021	48.5	58.63	34.51	58.63
2022	53.29	61.06	39.93	61.06

Tahun	Literasi		Numerasi	
	SD	SMP	SD	SMP
2023	57.14	64.16	43.66	58.4

Tabel 2. 58. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)

Tahun	Capaian
2018	10,29
2019	10,30
2020	10,30
2021	10,30
2022	10,30
2023	10,30

Tabel 2. 59. Harapan Lama Sekolah

Tahun	Capaian
2015	14,44
2016	14,45
2017	14,46
2018	14,47
2019	14,49
2020	14,50
2021	14,51
2022	14,52
2023	14,54

Tabel 2. 60. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidik Tinggi

Tahun	Capaian
2019	52,45
2020	51,4
2021	60,82
2022	53,93
2023	56,13

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Tabel 2. 61. Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Tahun	Capaian
2015	57,87
2016	57,89
2017	60,26
2018	63,20
2019	54,75
2020	66,12
2021	68,38
2022	81,51
2023	80,74

Tabel 2. 62. Indeks Layanan infrastruktur

Tahun	Capaian
2022	1,93
2023	2,49

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Tabel 2. 63. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

Tahun	Capaian
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah gambaran dari sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. IRB bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Indeks Pengukuran Birokrasi adalah cara sistematis bagi perusahaan untuk menilai beban birokrasi. Tahun 2021 hingga tahun 2022, Kota Parepare mendapat Predikat B untuk Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN RB.

Tabel 2. 64. Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun	Capaian
2021	64,35
2022	63,98
2023	

2.4.2. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Evaluasi kinerja adalah penentuan nilai implementasi SAKIP di instansi pemerintah. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Nilai SAKIP Parepare tahun 2022-2023 diukur dengan menghitung nilai SAKIP unit kerja. Capaian Nilai SAKIP tahun 2018 hingga 2019 adalah CC. tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 nilai SAKIP Kota Parepare adalah B.

2.4.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Indonesia. IPP mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, dan sistem.

Tabel 2. 65. Tabel Indeks Pelayanan Publik

Tahun	Capaian
2021	
2022	4,46
2023	

2.4.4. Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka dilakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah melalui pengukuran Indeks Inovasi. Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran Indeks inovasi daerah dilaksanakan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hasil pengukuran indeks inovasi daerah Kota Parepare sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 66. Indeks Inovasi Daerah

Tahun	Capaian
2019	5350
2020	1753
2021	49,91
2022	58,89
2023	57,85

2.4.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah nilai dari hasil pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tingkat perkembangan SPBE diukur dengan kerangka kerja tingkat kematangan SPBE. Kerangka kerja ini ditinjau dari dua konsep/model tingkat kematangan, yaitu: Tingkat kematangan pada kapabilitas proses, Tingkat kematangan pada kapabilitas layanan SPBE.

Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.

Manajemen SPBE meliputi 8 area kelompok, yaitu:

- Manajemen Risiko
- Manajemen Data
- Manajemen Layanan
- Manajemen Perubahan
- Manajemen Keamanan Informasi
- Manajemen Aset TIK
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen SDM

Capaian Indikator SPBE Kota Parepare di tahun 2018 adalah 2,13. Tahun 2021 menjadi 2,17. Tahun 2022 adalah 2,50. Secara perlahan Kota Parepare mengalami peningkatan SPBE.

Tabel 2. 67. Indeks SPBE

Tahun	Capaian
2021	2,17
2022	2,5
2023	2,62

Tabel 2. 68. Indeks Reformasi Hukum

Tahun	Capaian
2022	43,45
2023	76,71

Tabel 2. 69. Indeks survey penilaian integritas

Tahun	Capaian
2021	75,52
2022	73,53
2023	74,90

Tabel 2. 70. Indeks maturitas

Tahun	Capaian
2019	2,8875
2020	Covid
2021	3,355
2022	3,353
2023	3,462

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Dalam hal Perda RPJPD Kota Parepare tahun 2005-2025 masih menetapkan sasaran pokok bersifat kualitatif, maka pemerintah Kota Parepare tetap melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD dengan menjabarkan sasaran pokok kualitatif menjadi kuantitatif dengan berpedoman pada ketentuan yang ada.
- Capaian indikator makro pembangunan Kota Parepare selama periode 2005 sampai dengan 2022 secara umum menunjukkan perkembangan yang baik, kecuali pada tahun terjadinya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada capaian indikator makro daerah.
- Indikator makro pembangunan yang masih perlu mendapatkan perhatian dan intervensi lebih yaitu indikator terkait angka kemiskinan karena kondisi angka kemiskinan Kota Parepare tidak mengalami penurunan yang berarti, bahkan cenderung stagnan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir meskipun pemerintah daerah sudah melakukan intervensi lebih untuk menangani angka kemiskinan. Angka kemiskinan tidak berbanding lurus dengan capaian indikator makro lainnya khususnya indikator pendapatan perkapita yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi.
- Perkembangan indikator-indikator kinerja yang mengindikasikan capaian pelaksanaan arah kebijakan pembangunan RPJPD per periode hampir seluruhnya

menunjukkan perkembangan positif, meskipun ada indikator yang mengalami perubahan negative khususnya di tahun-tahun terjadi pandemi Covid-19.

- e. Capaian per Misi RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025 diukur dengan beberapa indikator:

Misi 1 : Indeks Pembangunan Manusia dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Indeks Pendidikan dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Indeks Kesehatan dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Indeks Daya Beli dengan predikat capaian Sangat Tinggi.

Misi 2 : Pertumbuhan Ekonomi dengan predikat capaian Sedang, PDRB per kapita dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Kemiskinan dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Tingkat Pengangguran dengan predikat capaian Sangat Tinggi serta Persentase Penurunan NAPZA yang tidak terukur dikarenakan ketersediaan data.

Misi 3 : Kasus SARA dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Indeks Kerukunan Ummat dengan predikat capaian Rendah dan Penegakan Perda dengan predikat capaian Sangat Tinggi.

Misi 4 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan predikat capaian Rendah dan Ketaatan terhadap RTRW dengan predikat capaian Sangat Tinggi.

Misi 5 : Laporan Kinerja Keuangan Daerah dengan predikat capaian Sangat Tinggi, Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan predikat capaian Sangat Tinggi serta Kerjasama Pemerintah dengan predikat capaian Sangat Tinggi.

- f. Rata-rata capaian kinerja RPJMD periode 2006-2008 tidak dapat diukur karena tidak ada ketersediaan data untuk masing-masing indikator. Rata-rata capaian kinerja RPJMD periode 2008-2013 sebesar 86,82 persen dengan predikat capaian Sangat Tinggi, rata-rata capaian kinerja RPJMD periode 2013-2018 sebesar 79,62 dengan predikat capaian Tinggi. Sedangkan rata-rata capaian kinerja RPJMD periode 2018-2023 sebesar 97,83 dengan predikat capaian Sangat Tinggi.

2.5.2. Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025-2029

Beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, meliputi:

- a. Dalam penyusunan RPJPD periode selanjutnya indikator kinerja rencana pembangunan jangka panjang sebaiknya indikator pada level manfaat/dampak

- yang berdampak jangka Panjang.
- b. Periodisasi rencana pembangunan jangka Panjang dalam penyusunan dokumen RPJPD Kota Parepare selanjutnya diharapkan telah selaras dengan periodisasi dokumen RPJMD Kota Parepare untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi pencapaian pembangunan jangka Panjang maupun menengah.
 - c. Dalam penyusunan dokumen RPJPD selanjutnya, Indikator kinerja rencana pembangunan jangka Panjang perlu diselaraskan dengan indikator kinerja pembangunan jangka menengah, sehingga rencana pembangunan lebih terarah dan terukur serta ada keselarasan dan sinkronisasi kinerja tiap periode pembangunan.
 - d. Evaluasi hasil RPJPD perlu dilakukan secara berkala setelah berakhirnya 1 (satu) periode RPJPD untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka Panjang dan penyelarasan perencanaan pembangunan jangka menengah selanjutnya.
 - e. Dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya perlu memberikan prioritas penuntasan angka kemiskinan dengan melakukan verifikasi data penduduk kemiskinan yang lebih aktual dan memenuhi kriteria penduduk miskin yang seharusnya.
 - f. Penyusunan RPJPD selanjutnya perlu dilengkapi dengan indikator sasaran pokok dilengkapi dengan target kinerja per periode, yang mampu memberi gambaran tolok ukur capaian pembangunan jangka panjang.

2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Paradigma pembangunan penduduk menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Proyeksi penduduk ini bersumber dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, metode dalam proyeksi ini adalah penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk Kota Parepare jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, migrasi dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020 diproyeksikan selama dua puluh tahun ke depan dari tahun 2025 hingga 2045.

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar harus menjadi prioritas daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prasarana dan sarana dasar yang memadai merupakan factor yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah.

2.6.1. Proyeksi Demografi

Jumlah Penduduk Kota Parepare pada tahun 2023 berdasarkan data BPS sebesar 158.450 orang yang dengan menggunakan scenario tren maka jumlah penduduk Kota Parepare bertambah sebanyak 45.661 orang menjadi sebanyak 204.111 orang pada tahun 2045.

Tabel 2. 71. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Laki-laki

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	7,680	7,544	7,546	7,444	7,374	7,520
5-9	6,910	7,523	7,611	7,613	7,512	7,440
10-14	6,490	6,448	7,573	7,659	7,661	7,560
15-19	6,800	6,773	6,510	7,645	7,731	7,738
20-24	6,770	6,855	6,945	6,670	7,834	7,926
25-29	6,790	6,789	7,004	7,093	6,809	7,999
30-34	6,670	6,859	6,866	7,080	7,171	6,880
35-39	6,080	6,349	6,973	6,974	7,193	7,283
40-44	5,530	5,731	6,345	6,964	6,963	7,179
45-49	4,870	5,126	5,589	6,189	6,793	6,791
50-54	4,070	4,295	4,959	5,409	5,994	6,576
55-59	3,480	3,625	4,091	4,726	5,160	5,723
60-64	2,780	3,014	3,384	3,824	4,426	4,839
65-69	1,820	2,101	2,705	3,044	3,449	4,001
70-74	1,020	1,183	1,738	2,244	2,540	2,887
75+	920	1,013	1,381	1,996	2,724	3,344
Jumlah	78,680	81,228	87,220	92,574	97,334	101,686

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Tabel 2. 72. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	15,060	14,781	14,792	14,591	14,450	14,733
5-9	13,490	14,731	14,910	14,920	14,717	14,576
10-14	12,600	12,509	14,788	14,964	14,974	14,773
15-19	13,200	13,112	12,553	14,837	15,011	15,028
20-24	13,410	13,458	13,479	12,892	15,227	15,421
25-29	13,600	13,647	13,856	13,872	13,263	15,671
30-34	13,290	13,691	13,856	14,063	14,079	13,457
35-39	12,140	12,610	13,885	14,043	14,254	14,269
40-44	11,100	11,486	12,533	13,793	13,950	14,157
45-49	9,810	10,289	11,238	12,267	13,501	13,653
50-54	8,440	8,818	10,038	10,973	11,982	13,186
55-59	7,400	7,692	8,496	9,676	10,591	11,573
60-64	5,950	6,472	7,291	8,062	9,200	10,083
65-69	4,000	4,564	5,908	6,674	7,396	8,458
70-74	2,460	2,777	3,899	5,072	5,765	6,409
75+	2,500	2,767	3,683	5,131	6,977	8,664
Jumlah	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111

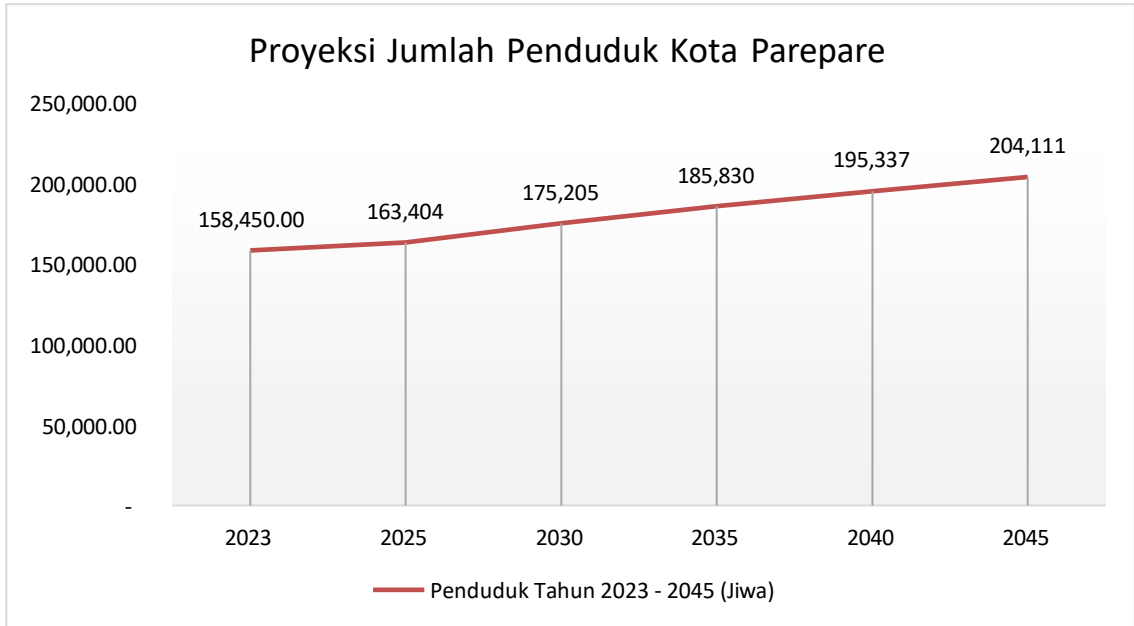
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Tabel 2. 73. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Parepare

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Penduduk Kota Parepare pada kurun waktu 2025-2029 terus bertambah, namun laju pertumbuhannya menunjukkan perlambatan dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda. Laju pertumbuhan penduduk Kota Parepare pada periode 2023-2025 sebesar 1,55 persen secara bertahap melambat menjadi 1,4 persen pada periode 2025-2030 melambat menjadi 1,18 persen pada periode 2030-2035, 1 persen pada periode 2035-2040 dan menjadi 0,88 persen pada periode 2040-2045.

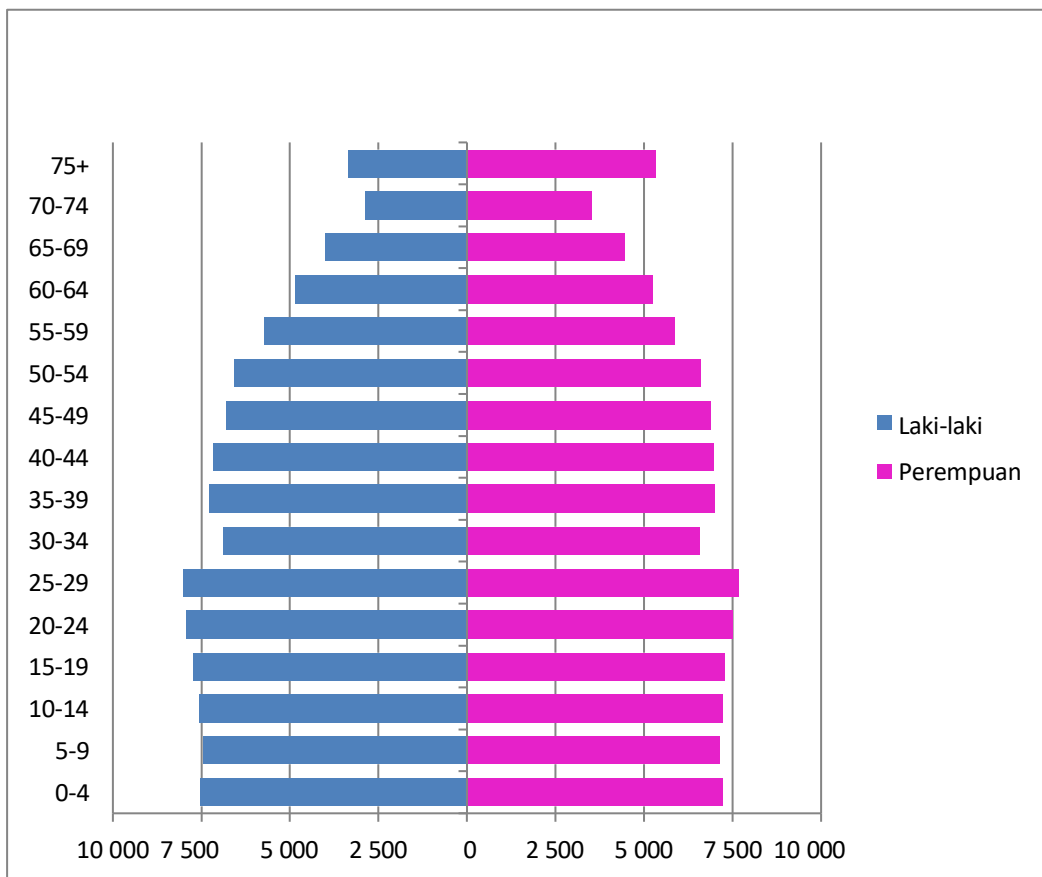
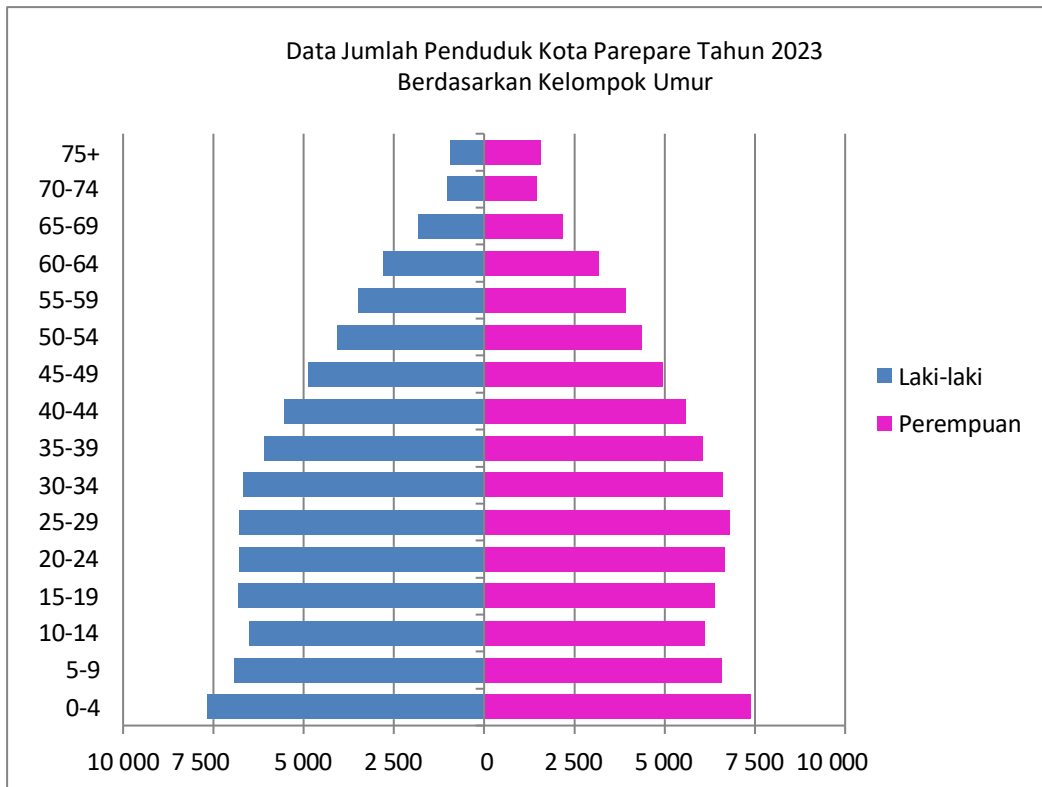


Gambar 2. 34. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Parepare, tahun 2025-2045

Tabel 2. 74. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Parepare

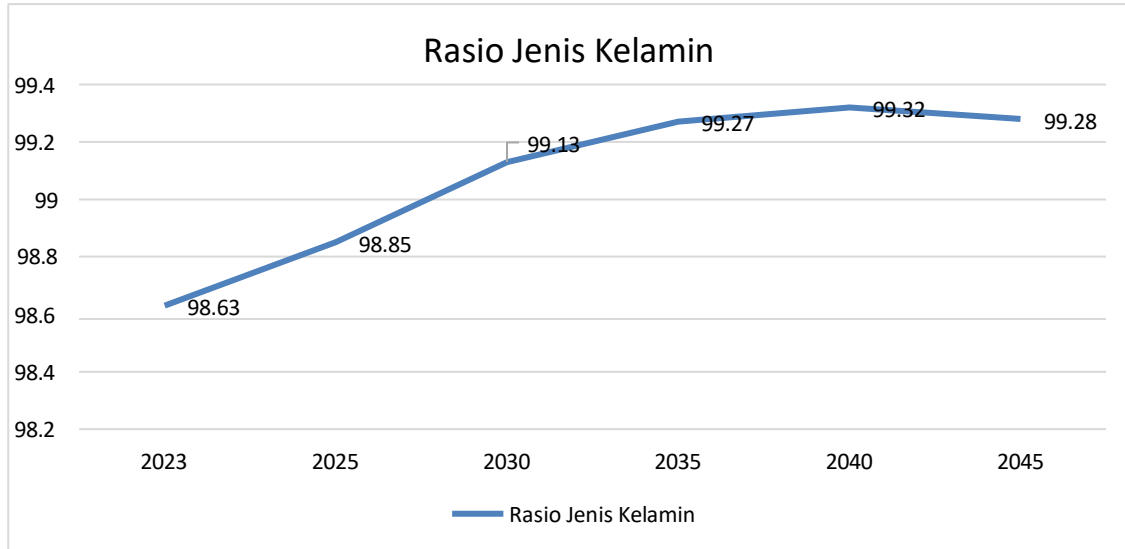
Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	78,680	81,228	87,220	92,574	97,334	101,686
Perempuan	79,770	82,176	87,985	93,256	98,003	102,425
Rasio	98.63	98.85	99.13	99.27	99.32	99.28

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Gambar 2. 35. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Parepare

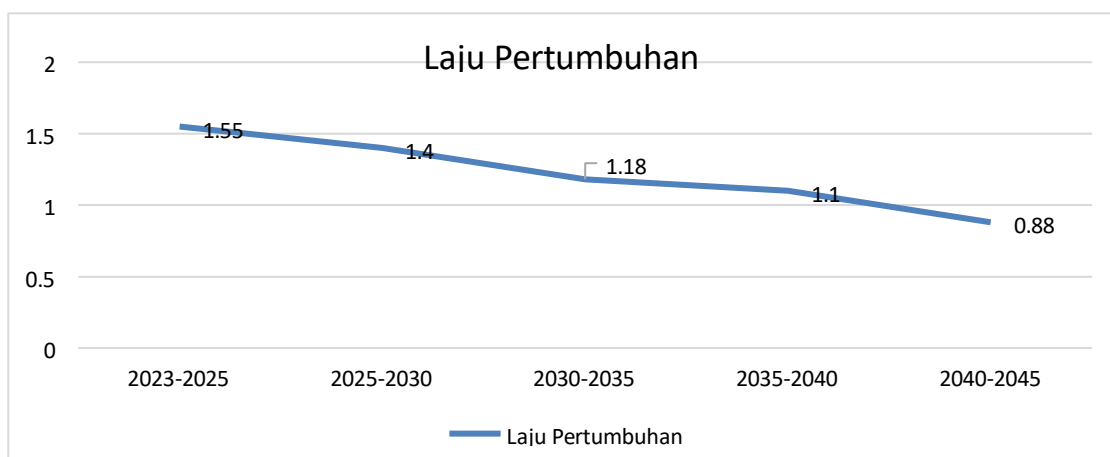
Pada tahun 2045, rasio jenis kelamin penduduk Kota Parepare sebesar 99,28 artinya terdapat 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio jenis kelamin semakin menurun sepanjang 2025-2029 menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk perempuan melebihi penambahan jumlah penduduk laki-laki.



Gambar 2. 36. Rasio Jenis Kelamin

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.



Gambar 2. 37. Pertumbuhan Penduduk Kota Parepare Hasil Proyeksi, Tahun 2025-2045

Laju pertumbuhan penduduk Kota Parepare pada periode 2023-2025 sebesar 1,55 persen secara bertahap melambat menjadi 1,4 persen pada periode 2025-2030

melambat menjadi 1,18 persen pada periode 2030-2035, 1 persen pada periode 2035-2040 dan menjadi 0,88 persen pada periode 2040-2045.

B. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk Kota Parepare pada 2023 didominasi oleh Kelompok Umur 0-4 tahun, 25-29 tahun, 5-9 tahun, 20-24 tahun dan 30-34 tahun dengan distribusi masing-masing sebesar 9,5 persen, 8,58 persen, 8,51 persen, 8,46 persen dan 8,39 persen. Kelompok Umur 70-74 memiliki distribusi paling kecil sebesar 1,55 persen dengan jumlah 2.460 orang pada tahun 2023.

Penduduk Kota Parepare pada 2045 didominasi oleh Kelompok Umur 25-29 tahun, 20-24 tahun, 15-19 tahun, 10-14 tahun dan 0-4 tahun dengan distribusi masing-masing sebesar 7,68 persen, 7,56 persen, 7,36 persen, 7,24 persen dan 7,22 persen. Kelompok Umur 70-74 memiliki distribusi paling kecil sebesar 3,14 persen dengan jumlah 6.409 orang pada tahun 2045.

Tabel 2. 75. Distribusi Penduduk Kota Parepare Menurut Kelompok Umur, tahun 2023-2045

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	9.50%	9.05%	8.44%	7.85%	7.40%	7.22%
5-9	8.51%	9.02%	8.51%	8.03%	7.53%	7.14%
10-14	7.95%	7.66%	8.44%	8.05%	7.67%	7.24%
15-19	8.33%	8.02%	7.16%	7.98%	7.68%	7.36%
20-24	8.46%	8.24%	7.69%	6.94%	7.80%	7.56%
25-29	8.58%	8.35%	7.91%	7.46%	6.79%	7.68%
30-34	8.39%	8.38%	7.91%	7.57%	7.21%	6.59%
35-39	7.66%	7.72%	7.93%	7.56%	7.30%	6.99%
40-44	7.01%	7.03%	7.15%	7.42%	7.14%	6.94%
45-49	6.19%	6.30%	6.41%	6.60%	6.91%	6.69%
50-54	5.33%	5.40%	5.73%	5.90%	6.13%	6.46%
55-59	4.67%	4.71%	4.85%	5.21%	5.42%	5.67%
60-64	3.76%	3.96%	4.16%	4.34%	4.71%	4.94%
65-69	2.52%	2.79%	3.37%	3.59%	3.79%	4.14%
70-74	1.55%	1.70%	2.23%	2.73%	2.95%	3.14%
75+	1.58%	1.69%	2.10%	2.76%	3.57%	4.24%
Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan Hasil Analisis Tim

2.6.2. Proyeksi Peduduk Menurut Kelompok Umur

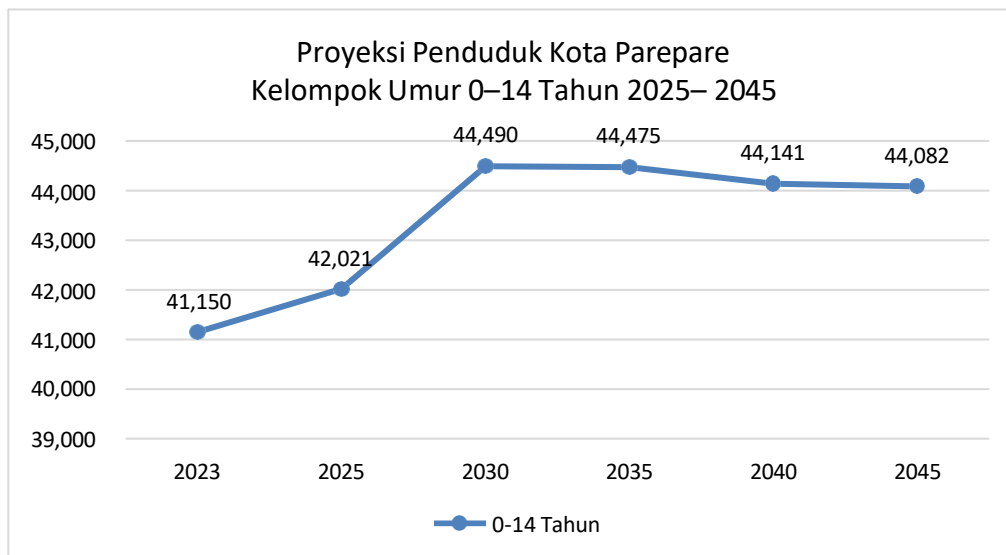
Tabel 2. 76. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur, Tahun 2025-2029

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	41,150	42,021	44,490	44,475	44,141	44,082
15-64 Tahun	108,340	111,275	117,225	124,478	131,058	136,498

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
>65 Tahun	8,960	10,108	13,490	16,877	20,138	23,531
Angka Ketergantungan	46.25%	46.85%	49.46%	49.29%	49.05%	49.53%

A. Penduduk Umur 0-14 Tahun

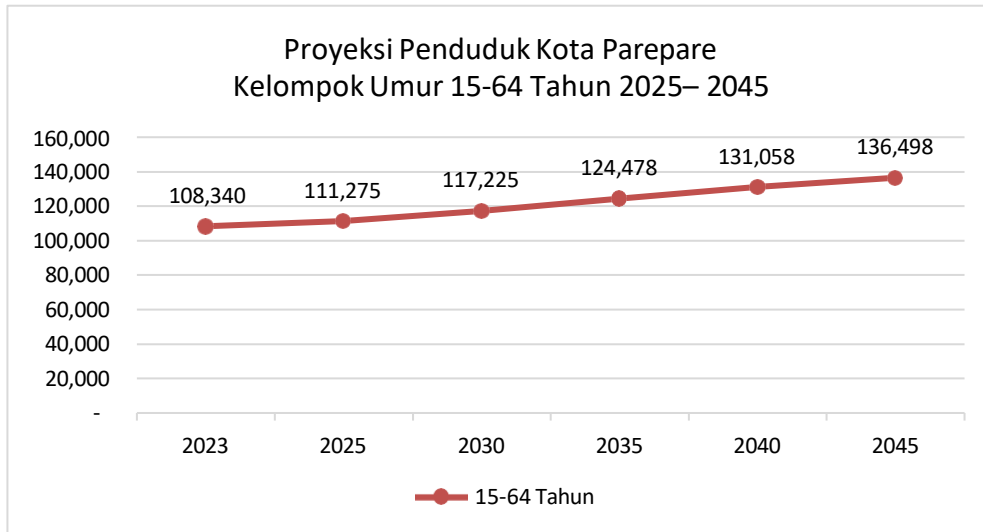
Hasil proyeksi memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 0–14 tahun dari 41.150 orang pada tahun 2023 menjadi 44.082 orang pada tahun 2045. Proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun mewakili 25,97 persen dari total populasi pada tahun 2023. Pada tahun 2045, proporsi penduduk berumur kurang dari 15 tahun diproyeksikan akan menurun menjadi 21,60 persen.



Gambar 2. 38. Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 0– 14 Tahun, Tahun 2025– 2045

B. Penduduk Umur 15–64 Tahun

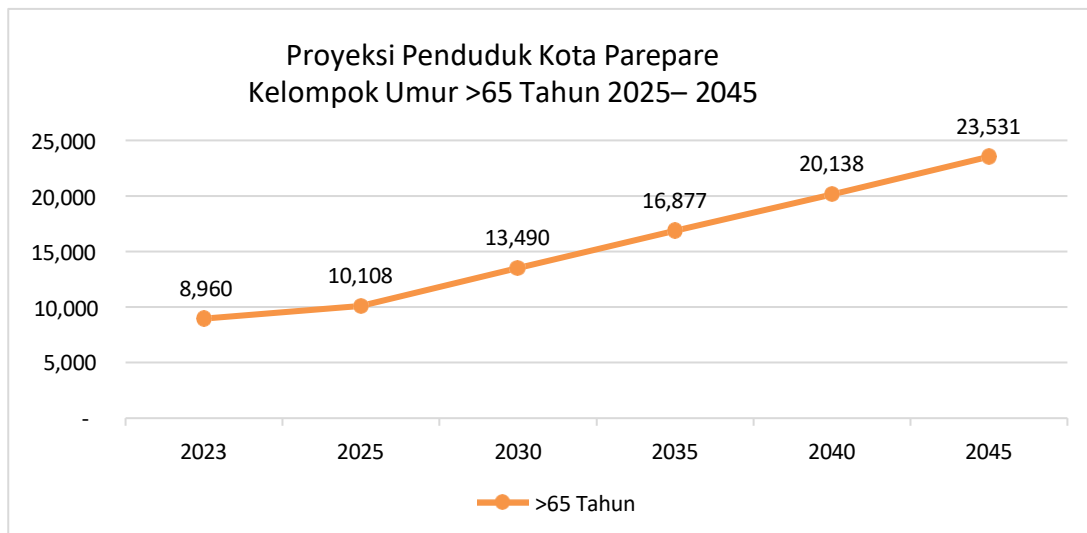
Hasil proyeksi penduduk memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 15-64 tahun dari 108.340 orang pada tahun 2023 menjadi 124.478 orang pada tahun 2035. Setelah tahun 2035, penduduk umur 15-64 tahun terus meningkat sampai 136.498 orang pada tahun 2045. Adapun komposisi penduduk umur 15–64 tahun dari 68,37 persen di tahun 2023 akan menurun menjadi 66,87 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2045.



Gambar 2. 39. Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 15-64 Tahun, 2025– 2045

C. Penduduk Umur 65 Tahun ke Atas

Penduduk yang berumur 65 tahun ke atas meningkat dengan cepat dari tahun 2023 hingga tahun 2045. Adapun komposisi penduduk umur 65 tahun ke atas dari 8,960 persen di tahun 2023 akan meningkat menjadi 23,531 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2045



Gambar 2. 40. Proyeksi Penduduk Kota Parepare Kelompok Umur 65 tahun keatas Tahun, 2025– 2045

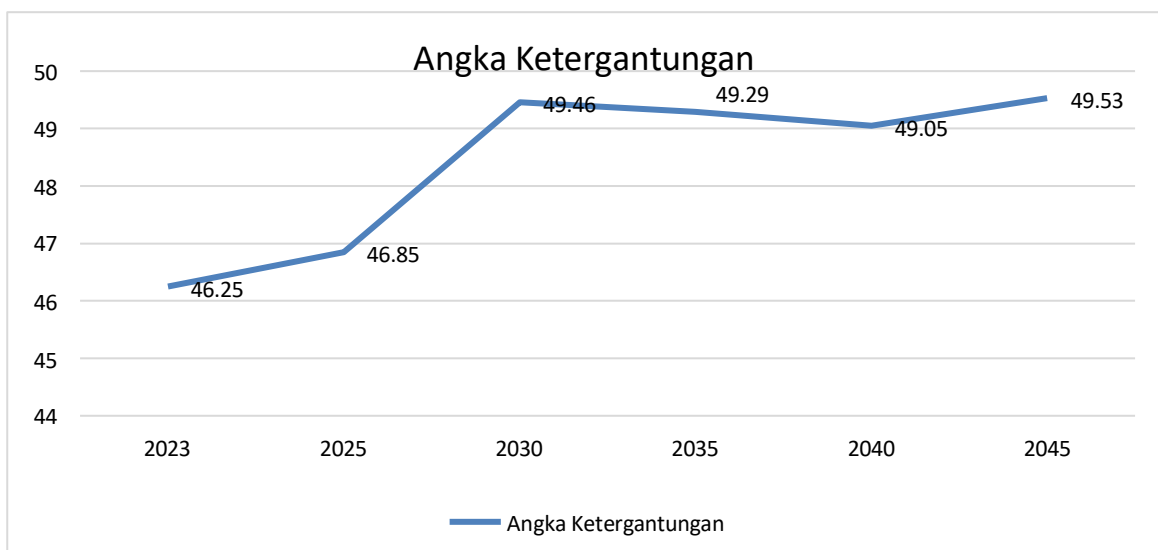
D. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dihitung sebagai jumlah penduduk yang berumur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas

dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15–64 tahun dikalikan 100.

Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah mengindikasikan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

Rasio ketergantungan pada tahun 2023 adalah sebesar 46,25 persen. Rasio ketergantungan ini terus meningkat sebesar 49,53 persen pada tahun 2045. Hal tersebut menunjukkan terdapat 50 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.



Gambar 2. 41. Proyeksi Rasio Ketergantungan Kota Parepare Tahun 2025– 2045

E. Bonus Demografi

Kota Parepare telah mengalami perubahan demografi yang cepat dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64) tahun terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2050. Dalam periode tersebut Parepare menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama angka ketergantungan mengalami peningkatan penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat dari 46,255 pada tahun 2023 menjadi 49,53% pada tahun 2025.

2.6.3. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, khususnya yang terkait layanan dasar masyarakat di Kota Parepare didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare yang mengatur perencanaan struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem susunan pusat- pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik sampai dengan Tahun 2045 dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayani yang meliputi:

A. Kebutuhan Perumahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan bahwa Kebutuhan perumahan merupakan kebutuhan dasar dan merupakan hak masyarakat untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Istilah *backlog* dapat diartikan sebagai kesenjangan antara jumlah rumah terbangun tiap tahun (pasokan/suplai) dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (permintaan/kebutuhan). Analisis *backlog* rumah di Kota Parepare dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepemilikan maupun dari sisi kepenghunan.

Dari sisi Kepemilikan Rumah dihitung berdasarkan angka *home ownership rate*/persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri. Sumber data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bersumber dari data BPS.

$$\text{Backlog} = \sum \text{Keluarga} - \sum \text{Rumah yang dimiliki}$$

Dimana:

- Jumlah Keluarga = jumlah penduduk dibagi dengan angka rata-rata jumlah anggota rumah tangga yaitu 4,4 (angka 4,4 diperoleh dari hasil Sensus Penduduk BPS Tahun 2019)
- Jumlah rumah = jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sendiri (% Rumah tangga memiliki rumah sebesar 83,40% menurut BPS Tahun 2020)

Pemerintah Kota Parepare masih mengalami backlog atau kesenjangan terkait pemenuhan kebutuhan akan perumahan. Kebutuhan rumah di Kota Parepare yang didasarkan pada penambahan jumlah penduduk maka pada tahun 2023 diproyeksikan jumlah rumah yang terbangun sebanyak 7.563 unit dan pada tahun 2045 diprediksikan akan bertambah sebanyak 17.941 unit rumah.

Tabel 2. 77. Proyeksi kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Parepare

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	7,563	8,689	11,371	13,786	15,947	17,941

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Bappeda diolah

B. Kebutuhan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air minum merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Analisis proyeksi kebutuhan SPAM mengacu kepada arahan pengembangan SPAM yang sebagian besar telah tertuang pada dokumen RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Parepare tahun 2013 dan SIMSPAM Kota Parepare tahun 2021. Analisis proyeksi dilakukan berdasarkan data kondisi eksisting dan rencana peningkatan pelayanan serta rencana penambahan penduduk dalam rentang waktu perencanaan (20 Tahun). Adapun data yang diperoleh dari PDAM Kota Parepare, yaitu :

Tabel 2. 78. Data Sumber Air Baku

No	Unit	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Distribusi (l/dt)	idle capacity (l/dt)	Keterangan
1	Sumur Dalam P-1F Harapan	Air Tanah Dalam	20	19.4	19.4	0.6	
2	Sumur Dalam P-1G Harapan	Air Tanah Dalam	10	9	9	1	
3	Sumur Dalam P-2G Soreang	Air Tanah Dalam	30	26.72	26.72	3.28	
4	Sumur Dalam P-4C Takkalao	Air Tanah Dalam	17	16.8	16.8	0.2	
5	Sumur Dalam P-4D Takkalao	Air Tanah Dalam	20	19.44	19.44	0.56	
6	Sumur Dalam P-5C Ukke'e	Air Tanah Dalam	20	19.56	19.56	0.44	
7	Sumur Dalam P-6A Korem	Air Tanah Dalam	10	0	0	0	OFF
8	Sumur Dalam P-7A Laupe	Air Tanah Dalam	10	0	0	0	OFF

No	Unit	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Distribusi (l/dt)	idle capacity (l/dt)	Keterangan
9	Sumur Dalam P-8A Ladoma	Air Tanah Dalam	20	15.11	15.11	4.89	
10	Sumur Dalam P-8B Ladoma	Air Tanah Dalam	20	16.9	16.9	3.1	
11	Sumur Dalam P-9A Lapadde	Air Tanah Dalam	20	19.35	19.35	0.65	Belum Maksimal operasional
12	Sumur Dalam P-10A Lanyer	Air Tanah Dalam	20	9.64	9.64	10.36	Belum Maksimal operasional
13	Sumur Dalam P-11A Tegal	Air Tanah Dalam	20	18.45	18.45	1.55	
14	Sumur Dalam P-12A Gudang Obat	Air Tanah Dalam	20	19.35	19.35	0.65	Belum Maksimal operasional
15	Sumur Dalam P-13A Gelora Mandiri	Air Tanah Dalam	20	11.42	11.42	8.58	Belum Maksimal operasional
Total			257	221.14	221.14	35.86	
1	IPA 1 Sungai Karajae	Sungai Karajae	40	28.32	28.32	11.68	
2	IPA 2 Sungai Karajae	Sungai Karajae	40	28.58	28.58	11.42	
3	IPA 3 Sungai Karajae	Sungai Karajae	20	19.97	19.97	0.03	
4	IPA 4 Sungai Karajae	Sungai Karajae	40	19.77	19.77	20.23	
5	IPA 5 Sungai Karajae	Sungai Karajae	40	19.59	19.59	20.41	
Total			180	116.23	116.23	63.77	
Sub Total			437	337.37	337.37	99.63	

Sumber : Profil Kelembagaan SPAM Kota Parepare, 2022

- Jumlah Air yang disalurkan PDAM Kota Parepare Tahun 2021 sebanyak 337,37 l/dt
- Jumlah Pelanggan sebanyak 22.508 SR
- Data IPA yang terbangun sebanyak 5 IPA dengan jumlah kapasitas terpasang 180l/dt
- Data sumur dalam terdapat 15 lokasi yang tersebar di 4 kecamatan dengan kapasitas terpasang 257 l/dt
- Idle capacity sebesar 99,63 l/dt

Tabel 2. 79. Data Pelayanan Air Minum dan Wilayah Pelayanannya

No.	Nama SPAM	Tahun di Bangun SPAM	Lokasi	Wilayah Pelayanan	Lembaga Pengelola
1.	IPA 1 Sungai Karajae	1994/1995 Up Rating 2006	Kec.Bacukiki Kel, Galung Maloang	Zona 5, Meliputi : Kel.Bumi Harapan Kel.Kampung Baru	PDAM
2.	IPA 2 Sungai Karajae	1996/1997 Up Rating 2008	Kec.Bacukiki Kel, Galung Maloang	Zona 1 Meliputi : Kel. Bukit Indah, Kel.Bukit Harapan, Kel.Lapadde	PDAM
3.	IPA 3 Sungai Karajae	1997/1998 Up Rating 2009	Kec.Bacukiki Kel, Galung Maloang	Zona 3 Meliputi : Kel. Lompoe	PDAM
4.	IPA 4 Sungai Karajae	1999/2000 Up Rating 2009	Kec.Bacukiki Kel, Galung Maloang	Zona 4 Meliputi: Kel. Galung Maloang dan Kel.Lompoe	PDAM
5.	IPA 5 Sungai Karajae	2002	Kec.Bacukiki Kel, Galung Maloang	Zona 2 Meliputi : Kel.Lapadde	PDAM
6.	Sumur Dalam P-1F Harapan	2016	Kec.Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan	Zona 9 Meliputi : Kel.Lapadde, Kel. Bumi Harapan	PDAM
7.	Sumur Dalam P-1G Harapan	2016	Kec.Bacukiki Barat Kel. Bumi Harapan	Zona 9 Meliputi : Kel.Kampung Baru, Kel.Tiro Sompe Kel.Bumi Harapan	PDAM
8.	Sumur Dalam P-2G Soreang	2016	Kec.Soreang Kel.Bukit Indah	Zona 7 Meliputi : Kel.Bukit Indah, Kel.Wattang Soreang, Kel.Bukit Harapan.	PDAM
9.	Sumur Dalam P-4C Takkalao	2005	Kec.Soreang Kel.Bukit Indah	Zona 6 Meliputi : Kel. Lakessi, Kel. Kampung Pisang, kel.Ujung Sabbang, kel. Ujung Lare, Kel. Ujung Beru	PDAM
10.	Sumur Dalam P-4D Takkalao	2017	Kec.Soreang Kel.Bukit Indah	Zona 8 Meliputi : Reservoir Utara Kap.1.000 m3, sebagian ke Kel. Bukit Indah, Sebagian Kel. Lapadde, Sebagian Kel. Ujung Baru	PDAM
11.	Sumur Dalam P-5C Wekke'e	2014	Kec.Ujung Kel.Lapadde	Zona 8 Meliputi : Reservoir Utara Kap.1.000 m3, sebagian ke Kel. Ujung Baru, Kel. Ujung Bulu, Kel. Mallusetasi Kel. Labukkang, Sebagian Kel. Ujung Baru, Sebagian Kel. Ujung Sabbang.	PDAM
12.	Sumur Dalam P-6A Korem	2014	Kec.Soreang Kel.Bukit Indah	off	PDAM

No.	Nama SPAM	Tahun di Bangun SPAM	Lokasi	Wilayah Pelayanan	Lembaga Pengelola
13.	Sumur Dalam P-7A Laupe	2016	Kec.Soreang Kel.Bukit Harapan	off	PDAM
14.	Sumur Dalam P-8A Ladoma	2016	Kec.Bacukiki Kel. Wattang Bacukiki	Zona 10 Meliputi : Kel.Wattang Bacukiki, Kel.Lumpue, Kel. Sumpang Minangae, Kel. Kampung Baru, Kel. Labukkang.	PDAM
15.	Sumur Dalam P-8A Ladoma	2016	Kec.Bacukiki Kel. Wattang Bacukiki	Zona 10 Meliputi : Kel.Wattang Bacukiki, Kel.Lumpue, Kel. Sumpang Minangae, Kel. Kampung Baru, Kel. Labukkang.	PDAM
16.	Sumur Dalam P-9A Ladoma	2017	Kec.Ujung Kel.Lapadde	Zona 2 Meliputi : Kel.Lapadde	PDAM
17.	Sumur Dalam P-10A Lanyer	2017	Kec.Bacukiki Kel. Galung Maloang	Zona 1 Meliputi : Kel. Galung Maloang, kel. Lappade	PDAM
18.	Sumur Dalam P-11A Tegal	2017	Kec.Ujung Kel.Lapadde	Zona 2 Meliputi : Kel.Lapadde	PDAM
19.	Sumur Dalam P-12A Gudang Obat	2017	Kec.Bacukiki Kel. Galung Maloang	Zona 4 Meliputi: Kel. Galung Maloang dan Kel.Lompoe	PDAM
20.	Sumur Dalam P-13A Gudang Mandiri	2017	Kec.Bacukiki Kel.Lompoe	Zona 3 Meliputi : Kel. Lompoe Kel.Bumi Harapan	PDAM

Dari identifikasi kondisi eksisting diatas, dilakukan proyeksi kebutuhan air untuk prasarana SPAM berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Hasil proyeksi kebutuhan air kota parepare sebagai berikut

Tabel 2. 80. Proyeksi kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Parepare

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	195	215	246	294	343	359

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Bappeda diolah

Pemerintah telah mencanangkan peningkatan pemenuhan akses air minum layak menjadi pemenuhan akses air minum aman, untuk itu Pemerintah Kota

Parepare secara bertahap meningkatkan cakupan pelayanan akses air minum aman berupa jaringan perpipaan yang direncanakan akan mencapai 100 persen pada tahun 2045. Kebijakan tersebut mempengaruhi peningkatan kebutuhan air rata-rata yang disediakan oleh PDAM menjadi sebesar 359 liter per detik pada tahun 2045, sehingga dibutuhkan optimalisasi kapasitas produksi air guna memenuhi kebutuhan tersebut.

C. Kebutuhan Sarana Pengelolaan Persampahan

Perhitungan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan di Kota Parepare mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang didasarkan pada proyeksi timbulan sampah. Perhitungan proyeksi timbulan sampah menggunakan asumsi produksi sampah sebesar 0,5 kg/orang/hari, sehingga pada tahun 2045 diproyeksi jumlah timbulan sampah sebanyak 37,250 ton.

Tabel 2. 81. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

No.	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
2	Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
3	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = (JP x ETS)/1000	79	82	88	93	98	102
4	Proyeksi Timbulan Sampah	28,917	29,821.23	31,974.91	33,913.98	35,649.00	37,250.26

Memperhatikan proyeksi timbulan sampah, maka diproyeksikan kebutuhan sarana pengelolaan persampahan berupa TPS yang terdiri dari TPS3R dan TPA, sebagai berikut :

Tabel 2. 82. Proyeksi Prasarana Pengelolaan Persampahan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
Prasarana Pengelolaan Persampahan						
TPS 3R	20	20	22	23	24	26

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Bappeda diolah

Memperhatikan standar kebutuhan prasarana pengelolaan persampahan yang didasarkan pada cakupan pelayanan berdasarkan jumlah jiwa, maka sampai dengan Tahun 2045 masih dibutuhkan tambahan 6 unit TPS 3R/TPST, sedangkan TPA yang sudah tersedia berdasarkan estimasi daya tampung Zona TPA Aloppoe Tahun 2021-2024 diperoleh timbunan sampah pada tahun 2024 sudah overload dari daya tampung TPA maka diperlukan pengembangan Zona Baru I (satu.) Begitupun dengan Estimasi daya tampung Zona TPA Aloppoe Tahun 2025-2030, berdasarkan hitungan estimasi tahun 2028 sudah overload dari daya tampung TPA maka diperlukan pengembangan Zona Baru I (satu.) maka diperlukan pengembangan Zona Baru II (dua).

Berdasarkan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa TPA diimplementasikan metode pengelolaan controlled/sanitary landfill dengan pemanfaatan gas metan pada tahun 2025. Kemudian, tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 dengan penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan hingga masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan, serta tidak ada pembakaran liar sampah mulai tahun 2031.

Selanjutnya adalah, melakukan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass dan diharapkan tahun 2050 operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. Terakhir adalah penguatan kegiatan pemilahan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang.

Kebutuhan Sarana Kesehatan

Analisis proyeksi dilakukan berdasarkan data kondisi eksisting dan rencana peningkatan pelayanan serta rencana pertambahan penduduk di Kota Parepare dalam waktu perencanaan (20 thn) untuk mengatasi blankspot pelayanan khususnya pembangunan lingkungan hunian baru yang belum terlayani

Fasilitas kesehatan yang dibutuhkan ketersediaannya untuk menyediakan layanan medis baik dasar maupun kompleks adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Klinik Bersalin, Apotik dan Poliklinik yang penyediaannya mengacu pada standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 2. 83. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Parepare

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
Proyeksi Fasilitas Kesehatan (Unit)						
Rumah Sakit	5	0	0	0	0	0
Puskesmas	8	0	0	0	0	0
Pustu	12	119	128	137	144	151
Klinik Bersalin	1	64	69	73	77	81
Apotek	36	0	0	0	0	0
Poliklinik	15	16	18	20	22	24

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Bappeda diolah

Memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Parepare pada tahun 2023, maka kesenjangan pemenuhan fasilitas kesehatan di Kota Parepare pada ketersediaan Pustu, Klinik Bersalin dan Poliklinik. Ketersediaan Pustu yaitu fasilitas kesehatan yang menawarkan layanan medis dasar, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi pasien dengan kondisi medis ringan dan tidak darurat. Jumlah Pustu yang tersedia di Kota Parepare pada tahun 2023 sebanyak 12 unit yang tersebar di 4 kecamatan, sedangkan berdasarkan cakupan pelayanan dibutuhkan 151 unit Pustu dan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2045 masih dibutuhkan penambahan sebanyak 139 unit. Begitupun dengan klinik bersalin dan Poliklinik masih dibutuhkan 80 unit klinik bersalin untuk tahun 2045 dan poliklinik sebanyak 9 unit pada tahun 2045. Sedangkan fasilitas kesehatan lainnya yaitu Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik berdasarkan standar kebutuhan sampai dengan tahun 2045 ketersediaannya sudah mencukupi sehingga yang dibutuhkan hanya peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan.

D. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Analisis proyeksi dilakukan berdasarkan data kondisi eksisting dan rencana peningkatan pelayanan serta rencana pertambahan penduduk di Kota Parepare dalam waktu perencanaan (20 thn) untuk mengatasi *blankspot* pelayanan khususnya pembangunan lingkungan hunian baru yang belum terlayani.

Kebutuhan penambahan unit sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas /Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta Perguruan Tinggi/ Universitas

mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk yaitu SNI 03-1733- 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Dari peraturan dan standar yang ada dapat dibentuk pola pikir tinjauan yang dilakukan untuk keperluan analisis sehingga dapat menghasilkan kebutuhan penambahan unit. Berikut tinjauan-tinjauan yang dilakukan :

- 1) Berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk.
- 2) Berdasarkan radius jangkauan
- 3) Berdasarkan skala layanan
- 4) Berdasarkan aksesibilitas dan mobilitas

Tabel 2. 84. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Parepare

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Penduduk	158,450	163,404	175,205	185,830	195,337	204,111
TK/RA	89	0	0	0	0	0
SD/MI	102	0	0	0	0	0
SLB	1	-	-	-	-	-
SMP/MTsn	30	0	0	0	0	0
SMA/MA	30	0	0	0	0	0
Perguruan Tinggi	17	0	0	0	0	0

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Bappeda diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kebutuhan Sarana Pendidikan di Kota Parepare pada dasarnya sudah cukup memadai berdasarkan jumlah Jiwa hingga 20 tahun mendatang, namun Penambahan Ruang Kelas bahkan unit Sarana Pendidikan (Sekolah) masih dapat dikembangkan berdasarkan Radius Pertumbuhan Kawasan Permukiman ke depan, selain peningkatan pelayanan akses Pendidikan.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Parepare diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Parepare. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 untuk mewujudkan kondisi ruang kota yang

aman, nyaman, efisien dan produktif secara berkelanjutan, sesuai dengan fungsinya sebagai kota pusat pelayanan kawasan Ajattappareng (Kab. Enrekang, Kab. Sidenreng Rappang, Kota Parepare, Kab. Pinrang, dan Kab. Barru) berbasis perdagangan dan jasa, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta kelestarian sumber daya alam.

RTRW Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional dan pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

Pembagian pemanfaatan ruang dalam beberapa kawasan sebagaimana termuat dalam RTRW Kota Parepare sebagai berikut:

2.7.1. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Perkebunan Rakyat terdapat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan Wattang bacukiki Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar. Pengembangan komoditi perkebunan yaitu karet, gula, cengkeh, ladah, coklat, kopi rabusta dan tembakau.

2.7.2. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan, dengan luas kurang lebih 1.155 hektar yang terdapat di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang dan Kecamatan Ujung.

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kota Parepare meliputi :

- Kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki dengan luas keseluruhan kurang lebih 306 (tiga ratus enam) hektar ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
- Pengembangan komoditas pertanian hortikultura diarahkan tanaman bayam, sawi, terong, kacang panjang, kangkung, mangga di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Soreang

b. Kawasan Perkebunan

Kawasan pertanian perkebunan dengan komoditas utama tanaman pepaya, pisang, nangka, kelapa, kemiri dan jambu mete yang tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung, Kelurahan Bukit Harapan di Kecamatan Soreang berupa pertanian lahan kering, tegalan, ladang, dan semak belukar.

c. Kawasan Perternakan

Kawasan peternakan dengan komoditas utama ternak sapi, kambing dan unggas di Kawasan peternakan dengan komoditas utama ternak sapi, kambing, unggas di Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat dan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang dengan luas keseluruhan kurang lebih 175,07 (seratus tujuh puluh lima koma nol tujuh) hektar.

2.7.3. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan Kota Parepare, terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya dengan luas kawasan kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar terdiri atas :

- a. Kawasan perikanan tangkap terdiri atas fasilitas operasional Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang
- b. Kawasan perikanan budidaya terletak di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat dan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang.
- c. Budi daya rumput laut di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang

2.7.4. Kawasan Perutukan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industry dan Kota Parepare termasuk salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai Kawasan peruntukan industri.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Parepare yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare yang menetapkan kawasan peruntukan industri dan pergudangan parepare dan sekitarnya (KIPAS) di kelurahan lapadde kecamatan ujung dan kelurahan bukit harapan kecamatan soreang sebagai kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

2.7.5. Kawasan Pariwisata

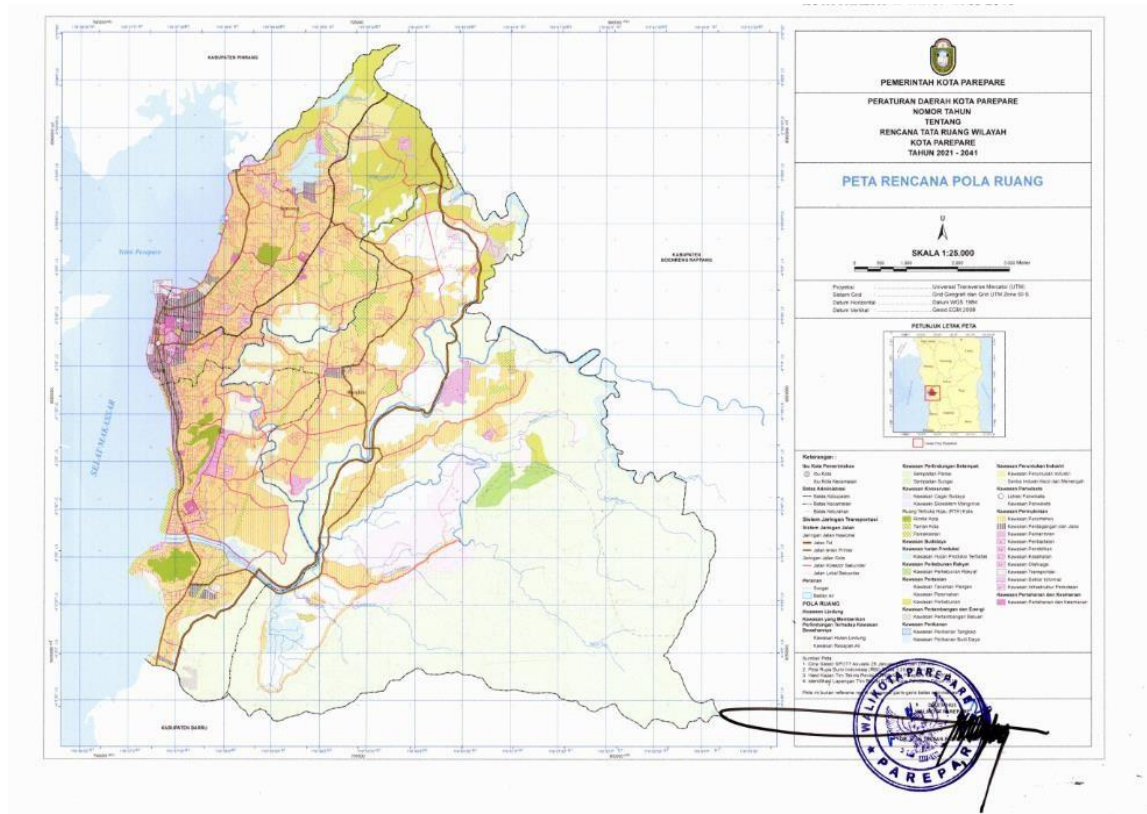
Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenities. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan.

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Yang terdiri atas kawasan wisata di darat dan kawasan wisata di laut.

Arahan pengembangan daya tarik pariwisata di Kota Parepare meliputi:

- a. Museum Labangenge di Kecamatan Bacukiki Barat;
- b. Museum BJ. Habibie di Kecamatan Ujung;
- c. Desa Wisata Bacukiki di Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki;
- d. Saoraja di Kecamatan Ujung;
- e. Monumen Alam Batu Kiki' di Kecamatan Bacukiki;
- f. Pesisir Tonrangeng di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
- g. Taman wisata Lappa Anging di Kecamatan Bacukiki;
- h. Kawasan wisata alam ladoma di Kecamatan Bacukiki;
- i. Kawasan Keanekaragaman Hayati di Bilalangge (goa kelelawar/air terjun) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan bacukiki;
- j. Kawasan Cempae/Sumur Jodoh di Kecamatan Soreang;
- k. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bacukiki.
- l. Kolam Renang Jompie di Kecamatan Soreang;

- m. Kolam Renang/Water Boom Ujung Lare di Kecamatan Soreang;
- n. Monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun dan Kawasan Alun-alun Kota Lapangan A. Makkasau di Kecamatan Ujung; dan
- o. Taman Bermain Lamario di Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat



Sumber : RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Gambar 2. 42. Peta Rencana Pola Ruang Kota Parepare

2.7.6. Sistem Perkotaan

Sistem Perkotaan di Kota Parepare berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan sistem perkotaan kota berupa Pusat pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Pelayanan Lingkungan (PL).

Pusat Kegiatan Wilayah merupakan seluruh perkotaan Parepare yang melayani wilayah ajattappareng yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Barru meliputi : sektor unggulan agroindustri, perdagangan dan jasa.

A. Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat pelayanan Kota (PPK) memiliki fungsi pelayanan skala kota, sehingga seluruh kawasan Kota Parepare merupakan daerah yang dilayaninya.

Fungsi-fungsi PPK mencakup sebagai berikut :

1) PPK Kota Baru

PPK Kota Baru atau PPK Bumi Harapan meliputi sebagian di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat yang melayani sebagian Kelurahan Bumi Harapan (bagian utara), Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Cappa Galung di Kecamatan Bacukiki Barat; sebagian Kelurahan Lompoe (bagian selatan) di Kecamatan Bacukiki dengan kegiatan utama; Rumah Sakit, Pemerintahan, Pendidikan, Ruang terbuka hijau kota dan Perumahan dan permukiman.

2) PPK Kota Lama

PPK kota lama meliputi Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung yang melayani Kelurahan Labukkang, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Ujung bulu, Kelurahan Ujung Sabbang, di Kecamatan Ujung; Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lakessi, sebagian Kelurahan Ujung Lare (bagian barat), sebagian Kelurahan Ujung Baru (bagian barat) di Kecamatan Soreang dengan kegiatan utamanya yaitu Perdagangan dan jasa skala regional, Pelabuhan penumpang dan barang, Konservasi kota lama/kota bawah, Rumah sakit, Ruang Terbuka Hijau Kota dan Perumahan kepadatan tinggi.

B. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) diarahkan berada di setiap kawasan yang berfungsi sebagai pelayanan yang berskala kawasan. Penempatan sub pusat kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan faktor karakteristik dan geografis dari masing-masing Sub PPK yang bertujuan untuk mengembangkan pelayanan terpadu dan menyeluruh ke seluruh kawasan, juga dengan memperhatikan pelayanan pada kawasan-kawasan yang berada di wilayah sekitarnya. Pengembangan Sub PPK ini juga bertujuan untuk mengurangi beban dan ketergantungan yang sangat tinggi dari Pusat Pelayanan Kota (PPK).

Skala pelayanan Sub PPK mencakup tiga sub PPK :

- 1) Sub PPK Lumpue
- 2) Sub PPK Lompoe, dan
- 3) Sub PPK Soreang.

Adapun fungsi-fungsi Sub PPK meliputi :

1) Sub PPK Lumpue

Sub PPK Lumpue terletak Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat yang melayani Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae, sebagian Kelurahan Bumi Harapan (bagian selatan) di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki dengan fungsi utama: Transit Oriented Development (Stasiun Kereta Api Lumpue dan Terminal tipe A), Perdagangan dan jasa Skala subwilayah kota, Permukiman kepadatan tinggi-sedang, Ruang terbuka hijau kota, Kawasan Pendidikan Tinggi, Kawasan Kesehatan/Rumah Sakit Regional dan Pendidikan, Pariwisata (wisata pantai dan agrowisata) dan Pertahanan dan keamanan.

2) Sub PPK Lompoe

Sub PPK Lompoe terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki yang melayani sebagian Kelurahan Lompoe (bagian utara), Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe di Kecamatan Bacukiki; sebagian Kelurahan Lapadde (bagian selatan) di Kecamatan Ujung dengan fungsi utama : Perdagangan dan jasa skala subwilayah kota, Permukiman kepadatan sedang- rendah, Ruang terbuka hijau kota, Konservasi alam, Pariwisata (agrowisata) dan Kawasan pendidikan tinggi.

3) Sub PPK Soreang

Sub PPK Soreang terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang yang melayani Kelurahan Bukit Harapan, sebagian Kelurahan Watang Soreang (bagian utara), sebagian Kelurahan Bukit Indah di Kecamatan Soreang; sebagian Kelurahan Lapadde (bagian utara) di Kecamatan Ujung dengan fungsi Utama : kawasan strategis nasional Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (LAPAN), Transit Oriented Development (Stasiun Besar Kereta Api diintegrasikan dengan Terminal Tipe B di Kecamatan Soreang dan Terminal tipe C Lapadde), Kawasan pendidikan tinggi, Ruang terbuka hijau kota, Perdagangan dan jasa Skala subwilayah kota, Permukiman kepadatan tinggi-sedang, Kawasan industri dan pergudangan dan Pertahanan dan keamanan.

C. Pelayanan Lingkungan (PL)

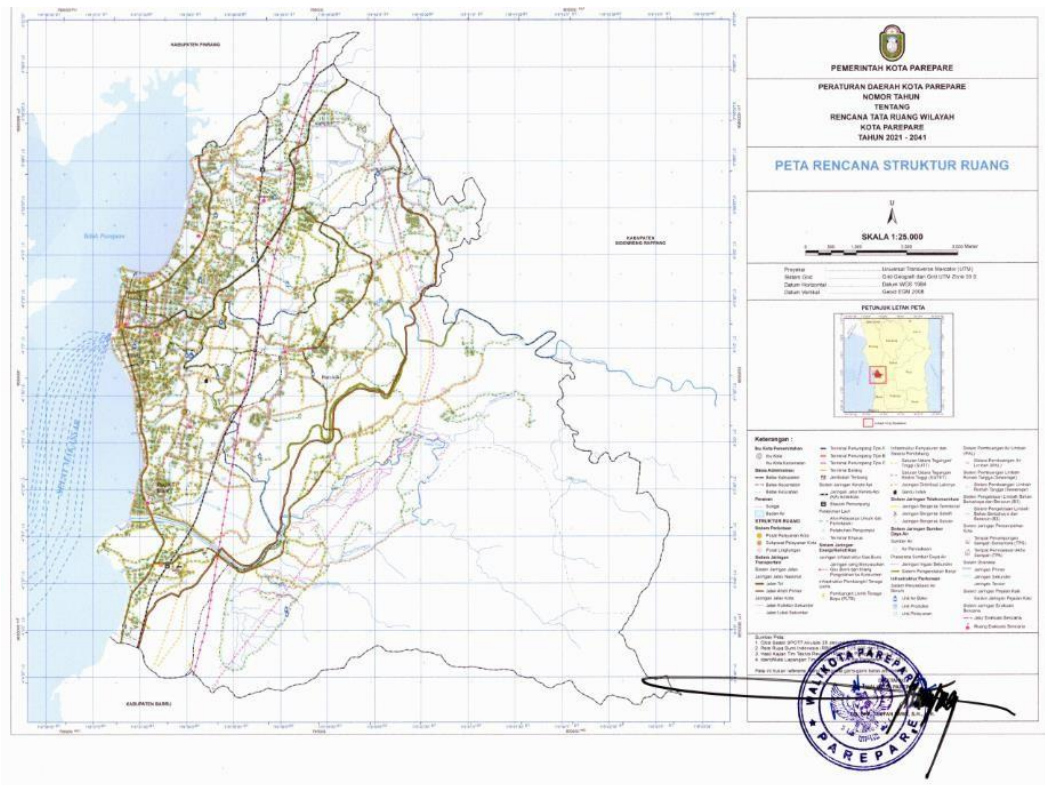
Pelayanan lingkungan direncanakan dikembangkan pada masing-masing klaster permukiman yang berfungsi sebagai sebagai pelayanan skala kelurahan dan pelayanan sosial ekonomi yang tersebar diseluruh kelurahan. Penempatan Pelayanan Lingkungan (PL) ini dilakukan dengan memperhatikan aspek karakteristik wilayah yang meliputi luas dan pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman di masing-masing Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), yang tujuannya untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada skala lingkungan. Selain itu peran pelayanan lingkungan memiliki fungsi kawasan yang dapat memberikan pelayanan di setiap lokasi PL.

Fungsi-fungsi Pelayanan Lingkungan meliputi :

- 1) Pelayanan Lingkungan RS. Ainun Habibie berada pada kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat dengan melayani sebagian kelurahan lumpue.
- 2) Pelayanan lingkungan Kawasan Sumpang Minangae berada di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat dengan melayani kelurahan Sumpang Minange, Sebagian Kelurahan Cappa Galung, dan Sebagian kelurahan Bumi Harapan.
- 3) Pelayanan Lingkungan Perdagangan Bau Maseppe berada di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat dengan melayani kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Tiro Sompe dan sebagian kelurahan Cappa Galung.
- 4) Pelayanan Lingkungan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bumi Harapan berada di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat dengan melayani Sebagian Kelurahan Bumi Harapan.
- 5) Pelayanan Lingkungan Watang Bacukiki berada di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki dengan melayani Kelurahan Watang Bacukiki.
- 6) Pelayanan Lingkungan Lemoe berada di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dengan melayani sebagian Kelurahan Lemoe.
- 7) Pelayanan Lingkungan Institut Teknologi BJ. Habibie berada di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dengan melayani sebagian Kelurahan Lemoe
- 8) Pelayanan lingkungan kawasan olahraga di Kelurahan Lompoe,

Kecamatan Bacukiki melayani sebagian Kelurahan Lompoe.

- 9) Pelayanan Lingkungan Lapance berada di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki dengan melayani sebagian kelurahan Galung Maloang dan Sebagian Lompoe.
- 10) Pelayanan Lingkungan Ujung Lare berda di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreng dengan melayani Sebagian Kelurahan Lappade, Kelurahan Ujung Baru dan Kelurahan Ujung Lare.
- 11) Pelayanan Lingkungan Kawasan PPI dan Sekitarnya berada di Kelurahan Watang Soreang, kecamatan Soreang dengan melayani Kelurahan Watang Soreang. Dan
- 12) Pelayanan lingkungan kawasan industri Parepare berada di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung melayani Sebagian Kelurahan Lapadde dan sebagaian Kelurahan Bukit Harapan.



Sumber : RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Gambar 2. 43. . Rencana Struktur Ruang Kota Parepare

Arahan pemanfaatan ruang Kota Parepare dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :

- 1) Sistem Perkotaan Nasional di Kota Parepare dalam arahnya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

- 2) Sistem Jaringan Jalan Bebas Hambatan, Palopo-Parepare dan Parepare-Pangkajene
- 3) Pelabuhan sebagai simpul transportasi laut nasional, Kota Parepare masuk dalam Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Cappa Ujung/Parepare dan Pelabuhan Parepare/Nusantara
- 4) Berdasarkan Penetapan Kawasan Andalan, Kota Parepare merupakan Kawasan Andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan agro industry, pertanian, perikanan dan perkebunan
- 5) Berdasarkan Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kota Parepare merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Parepare yang terdiri atas; Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Barru dan KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Penginderaan Jauh Parepare.

D. Arahan pengembangan lingkungan hunian

Arahan pengembangan dan pembangunan Lingkungan Hunian (LH) dirumuskan berdasarkan kriteria:

- 1) Mengacu kepada arahan pengembangan perumahan dan permukiman pada tiap-tiap entitas perumahan dan permukiman secara hirarkis.
- 2) Mempertimbangkan kondisi pelayanan lingkungan hunian sebagai dasar penentuan kriteria penanganan kawasan untuk dilakukan pengembangan, pembangunan baru, dan pembangunan kembali dengan ketentuan:
 - a. kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi sudah terbangun untuk dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas LH sehingga dapat meningkatkan efisiensi potensi, meningkatkan pelayanan LH, meningkatkan keterpaduan PSU, dan mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh serta LH yang tidak terencana;
 - b. kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai kawasan perumahan dan permukiman namun kondisi eksistingnya belum terbangun (lahan kosong) dan direncanakan pembangunan baru sebagai LH baru skala besar atau bukan skala besar dengan PSU; dan

- c. kawasan peruntukan permukiman dalam RTRW namun kondisi eksistingnya mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi dan direncanakan pembangunan kembali melalui rehabilitasi, rekonstruksi dan peremajaan.

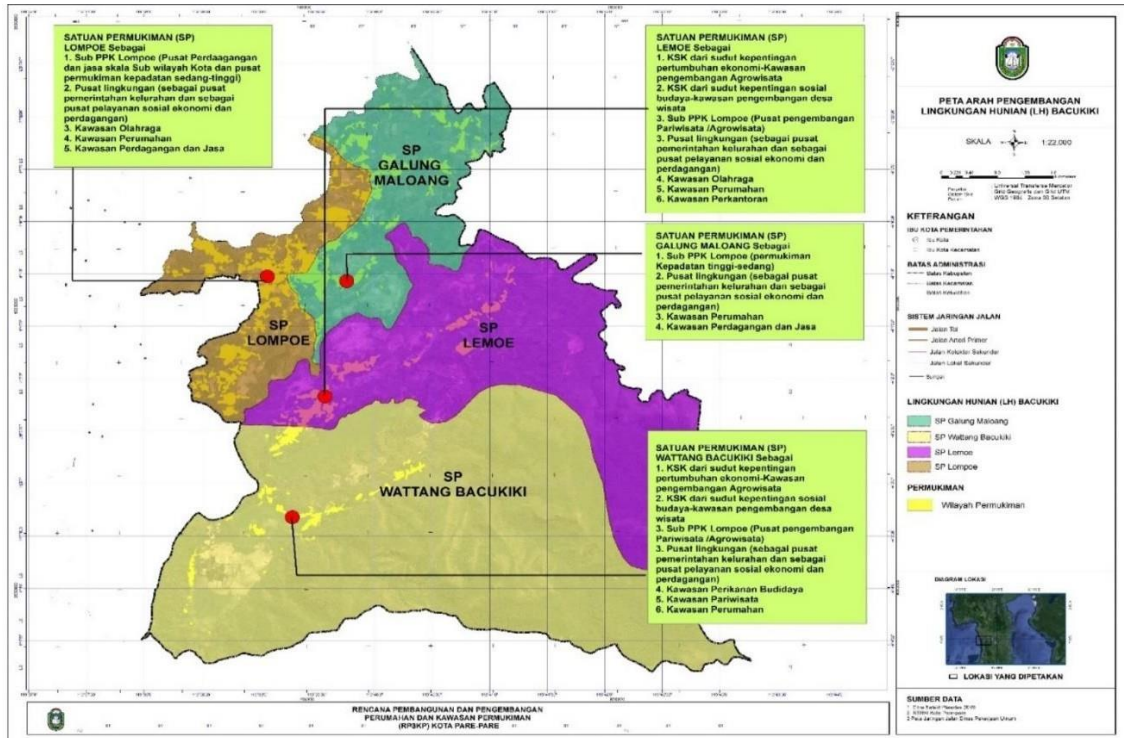
Arahan pengembangan berdasarkan karakteristik kegiatan merupakan arahan pengembangan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai dasar bagi penyusunan rencana kawasan dan pengembangan PSU. Arahan pengembangan berdasarkan karakteristik kegiatan ini disusun mengacu kepada kebijakan dan strategi serta dokumen rencana tata ruang. Hal ini dilakukan dengan tujuan identifikasi potensi peningkatan pelayanan serta pengembangan potensi komoditas dan sektor unggulan yang didorong perkembangannya.

Perumusan arahan pengembangan LH memperhatikan konsepsi keterkaitan LH dengan pengembangan kawasan perkotaan/perdesaan (sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang) dan keterkaitan LH sebagai pendukung efektifitas dan efisiensi fungsi lainnya (sesuai dengan pola ruang kawasan). Perumusan arahan pengembangan LH dilakukan dengan mempertimbangkan:

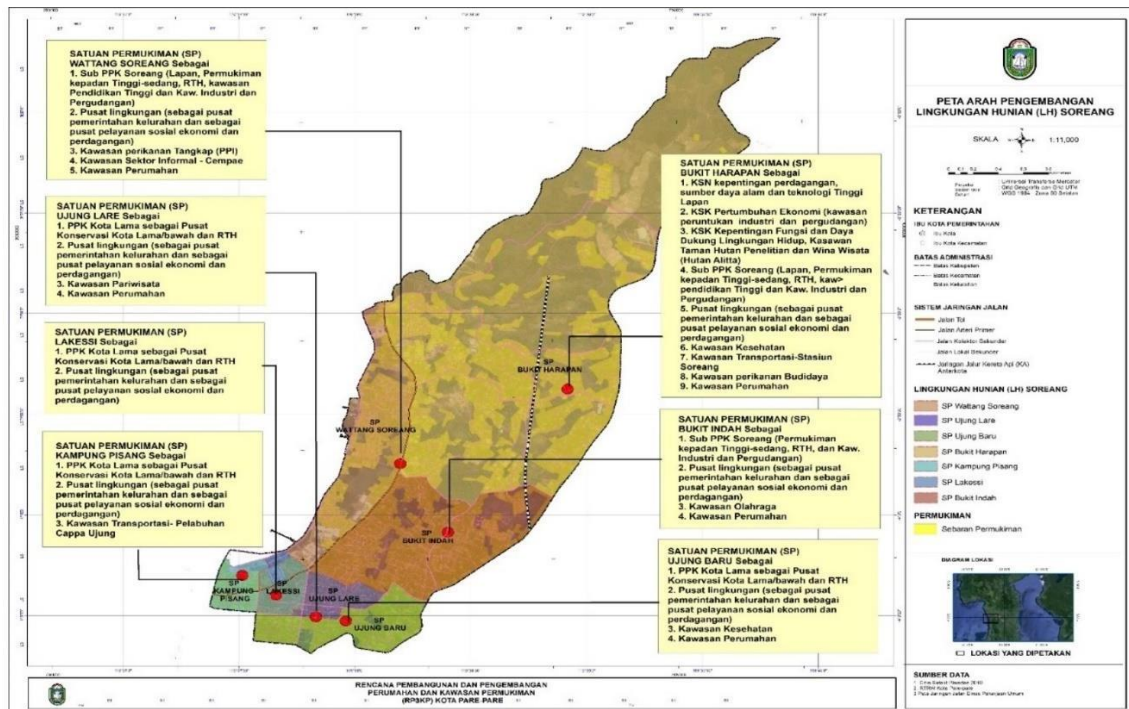
- 1) fungsi dan peran LH dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan/perdesaan berdasarkan posisi LH yang selaras dengan pengembangan wilayah dan rencana tata ruang;
- 2) hubungan antara kawasan permukiman dengan kawasan peruntukan lainnya dalam tata ruang berdasarkan hubungan fungsional yang terbentuk;
- 3) potensi LH, SP dan P yang meliputi potensi sumber daya alam, potensi SDM, potensi ekonomi, potensi sosial dan budaya untuk melihat komoditas/sektor unggulan yang didorong/dipacu; dan
- 4) peningkatan pelayanan LH berdasarkan karakteristik kegiatan melalui peningkatan kinerja pelayanan PSU dan rencana pengembangan PSU untuk mendorong efektifitas.

Penentuan arahan pengembangan perumahan dan permukiman berdasarkan karakteristik kegiatan disusun sesuai dengan hubungan fungsi yang terjadi antara kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lainnya, seperti kawasan permukiman yang mendukung pengembangan kawasan nelayan di pesisir pantai,

kawasan permukiman yang mendukung fungsi pendidikan disekitar kawasan perguruan tinggi, kawasan permukiman dengan tipologi kampung kota di kawasan kota lama, dan lainnya. Arah pengembangan LH di Kota Parepare, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 44. Arah pengembangan Lingkungan Hunian Bacukiki



Gambar 2. 45. Arah pengembangan Lingkungan Hunian Soreang

pengembangan agrowisata

- 2) LH Bacukiki Barat, sebagai pusat pengembangan permukiman yang mendukung pengembangan permukiman sebagai pusat Kota
- 3) LH Soreang, sebagai pusat pengembangan permukiman yang mendukung kawasan sebagai pusat konservasi kota lama.
- 4) LH Ujung, sebagai pusat pengembangan permukiman yang mendukung kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa dan sebagai pusat Pendidikan tinggi.

Arah pengembangan PKP pada lingkungan hunian Kota Parepare dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan kualitas LH, dari 4 pembagian LH di Kota Parepare terdapat 2 lingkungan hunian yang menjadi LH prioritas yaitu Lingkungan Hunian Bacukiki Barat dan Lingkungan Hunian Bacukiki. LH prioritas memiliki sebaran permukiman (SP). Sebaran permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 85 Sebaran perumahan dan permukiman (LH dan SP) Prioritas

No	(LH) Lingkungan Hunian	(SP) Sebaran Permukiman
1	Lh Bacukiki	Wattang Bacukiki
		Lemoe
		Lompoe
		Galung Maloang
2	Lh Bacukiki Barat	Lumpue
		Bumi Harapan
		Sumpang Minangae
		Cappagalung
		Tiro Sompe
		Kampung Baru
Kota Parepare		

Sumber: Data RKP 2022

dukungan kelembagaan, termasuk teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur, serta kondisi sosial budaya. Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk membangun dialog dan kemitraan di antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, guna memperkenalkan potensi daerah yang belum terekspos.

PUD dihasilkan melalui proses penciptaan nilai yang mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta membuka peluang investasi dari luar. Proses pengembangannya dimulai dengan mengidentifikasi produk-produk dari usaha kecil dan menengah (UKM), yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya lokal secara optimal. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing tinggi di pasar dan keunggulan yang membedakannya dari produk lain.

Menurut Ahmadjayadi (2011), PUD memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain, serta mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Agar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, produk unggulan ini memerlukan pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran yang sinergis. Produk unggulan daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat maupun pemerintah. Produk ini juga memiliki potensi meningkatkan produktivitas dan investasi, baik dari dalam maupun luar daerah.

Sudarsono (2001) menambahkan bahwa produk unggulan adalah produk yang memiliki daya saing tinggi, sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa PUD dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia lokal, berorientasi pasar, ramah lingkungan, serta memiliki keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Tujuan utama pengembangan PUD adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah daerah terus menggali potensi lokal dan menonjolkan keunikan wilayahnya agar PUD mampu membangun citra positif bagi daerah tersebut.

Produk unggulan daerah bisa menjadi ikon atau simbol suatu wilayah, yang secara tidak langsung turut mempromosikan potensi unggulan lainnya yang belum dikenal. Produk ini dihasilkan melalui serangkaian proses mulai dari penciptaan nilai, pemanfaatan sumber daya secara optimal, hingga memberikan kontribusi lebih bagi peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat. Produk unggulan daerah juga membuka peluang besar bagi investasi dari luar.

Proses pengembangan produk unggulan dapat dimulai dengan mengidentifikasi produk-produk dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM), yang berfungsi sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi lokal. Sebuah produk dikatakan unggulan jika memiliki daya saing tinggi di pasar serta memiliki keunggulan yang membuatnya berbeda dari produk lain. Produk unggulan daerah biasanya memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain, serta berdaya saing kuat, mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat (Ahmadjayadi, 2011).

Pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk unggulan daerah. Produk unggulan mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah, memanfaatkan sumber daya secara efektif, membuka lapangan kerja, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah. Produk ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan menarik investasi.

Menurut Sudarsono (2001), sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing yang mampu menghadapi produk pesaing di pasar domestik maupun menembus pasar ekspor. Kementerian Koperasi dan UKM menekankan bahwa produk unggulan daerah adalah produk yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia lokal, berorientasi pasar, ramah lingkungan, dan memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global. Produk Unggulan atau Komoditi unggulan:

- 1) Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan /ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah);
- 2) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dapat dikembangkan;
- 3) Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat perdesaan;
- 4) Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia;
- 5) Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.

Analisis Sektor Unggulan bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang sektor/lapangan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor/lapangan usaha menjadi basis karena sektor/lapangan usaha tersebut mampu menambah arus pendapatan ke wilayah tersebut. Sektor/lapangan usaha ini pada akhirnya menggerakkan aktivitas perekonomian karena ada efek pengganda dari

pembelanjaan kembali pendapatan yang diperoleh melalui penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah dan dipasarkan ke luar wilayah (Muta'ali, 2015:87-88).

Dasar penentuan sektor basis dan/atau unggulan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 pada level sektor/lapangan usaha. Dengan demikian, hasil analisis sektor yang terpilih adalah bersifat indikatif karena tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja keseluruhan dari subsektor yang ada masing-masing sektor. Analisis Symmetric Location Quotient(SymLQ) secara prinsip sama dengan Location Quotient (LQ), yaitu untuk menganalisis sektor unggulan dari suatu wilayah yang dapat dikembangkan. Analisis SymLQ ini digunakan karena penggunaan metode LQ selama ini menghasilkan nilai indeks yang tidak simetris, jika dilakukan analisis lebih lanjut maka cenderung tidak memenuhi uji normalitas. SymLQ merupakan modifikasi sederhana dari rumus Location Quotient (LQ) dengan membuat indeks LQ simetrik di sekitar angka nol berdasarkan rumus Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) yang dikembangkan oleh Dalum dkk. pada tahun 1998. SymLQ akan lebih memudahkan dalam melakukan mapping sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif karena dibuat dalam skala -1 s.d. 1 ($-1 \leq \text{SymLQ}_{ij} \leq 1$), sehingga simetris. Jika nilai SymLQ >0 (positif), maka sektor tersebut merupakan sektor basis/mempunyai keunggulan komparatif, demikian sebaliknya jika sektor tersebut:

$$LQ = \frac{PDRB_i^R / PDRB^R}{PDRB_i^N / PDRB^N}$$

Keterangan:

$PDRB^R$ = Total PDRB Kab.Kota (atau daerah yang ingin dicari)

$PDRB_i^R$ = PDRB Kab.Kota (atau daerah yang ingin dicari) sektor i

$PDRB^N$ = Total PDRB Provinsi (atau daerah referensi/satu tingkat lebih tinggi dari daerah yang ingin dicari)

$PDRB_i^N$ = PDRB Provinsi sektor I (atau daerah referensi/satu tingkat lebih tinggi dari daerah yang ingin dicari)

Tabel 2. 86. PDRB KOTA PAREPARE

SEKTOR PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp326,23	Rp326,32	Rp338,31
Pertambangan dan Penggalian	Rp11,23	Rp11,24	Rp11,33
Industri Pengolahan	Rp109,15	Rp118,24	Rp121,04

SEKTOR PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Pengadaan Listrik dan Gas	Rp5,23	Rp5,45	Rp5,75
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp14,57	Rp14,56	Rp14,60
Konstruksi	Rp697,51	Rp728,30	Rp759,04
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp856,06	Rp941,08	Rp990,62
Transportasi dan Pergudangan	Rp264,72	Rp309,55	Rp330,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp337,47	Rp362,35	Rp388,10
Informasi dan Komunikasi	Rp410,77	Rp415,83	Rp435,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp429,48	Rp425,72	Rp403,73
Real Estate	Rp492,11	Rp499,26	Rp522,58
Jasa Perusahaan	Rp12,50	Rp13,32	Rp14,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp434,06	Rp452,03	Rp448,24
Jasa Pendidikan	Rp350,07	Rp378,08	Rp409,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp281,50	Rp303,15	Rp315,75
Jasa lainnya	Rp129,45	Rp163,96	Rp172,60
PDRB	Rp5.162,10	Rp5.468,43	Rp5.680,82
PDRB Tanpa Migas			

Tabel yang ditampilkan menunjukkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Parepare atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. PDRB merupakan indikator penting yang mencerminkan nilai total produksi barang dan jasa di suatu daerah dalam periode tertentu.

Berdasarkan data pada tabel, terdapat beberapa sektor ekonomi utama yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kota Parepare:

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sektor dengan kontribusi yang relatif stabil, dengan PDRB sekitar Rp326,32 miliar pada tahun 2021 dan 2022, serta sedikit meningkat menjadi Rp338,31 miliar pada tahun 2023. Sektor ini merupakan salah satu pilar ekonomi Kota Parepare, terutama karena letak geografisnya yang strategis dekat dengan wilayah pesisir.
- 2) Produk perikanan kemungkinan besar menjadi produk unggulan yang terus berkontribusi pada perekonomian daerah.
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga memiliki peran yang besar, dengan nilai PDRB yang konsisten meningkat dari Rp856,06 miliar pada 2021 menjadi Rp990,62 miliar pada 2023. Sektor ini menunjukkan

bahwa Parepare merupakan salah satu pusat perdagangan dan distribusi di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga perdagangan eceran dan grosir, serta jasa reparasi kendaraan, menjadi bagian dari produk unggulan daerah ini.

- 4) Konstruksi juga menjadi sektor yang cukup besar dengan kontribusi yang meningkat dari Rp697,51 miliar pada 2021 menjadi Rp759,04 miliar pada 2023. Hal ini mencerminkan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang di Kota Parepare, yang mungkin terkait dengan pengembangan fasilitas publik, perumahan, dan infrastruktur transportasi.
- 5) Transportasi dan Pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari Rp264,72 miliar pada 2021 menjadi Rp330,06 miliar pada 2023. Ini sangat berkaitan dengan letak strategis Kota Parepare sebagai kota pelabuhan, yang mendukung aktivitas transportasi barang dan jasa. Kemungkinan besar, sektor ini juga mendukung produk unggulan daerah dalam hal logistik dan distribusi hasil perikanan serta perdagangan.
- 6) Industri Pengolahan adalah sektor lain yang mengalami pertumbuhan, dari Rp109,15 miliar pada 2021 menjadi Rp121,04 miliar pada 2023. Walaupun kontribusinya tidak sebesar sektor lain, industri pengolahan mungkin berperan dalam pengolahan hasil laut, makanan, dan produk-produk lainnya yang menjadi bagian dari rantai pasok ekonomi Pare-Par
- 7) Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jasa pendidikan tumbuh dari Rp350,07 miliar pada 2021 menjadi Rp409,29 miliar pada 2023, sedangkan jasa kesehatan meningkat dari Rp281,50 miliar menjadi Rp315,75 miliar dalam periode yang sama. Parepare memiliki beberapa institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan yang dapat menjadi daya tarik, tidak hanya bagi penduduk lokal tetapi juga bagi wilayah sekitar.

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa produk unggulan daerah Kota Parepare cenderung berasal dari sektor-sektor yang terkait dengan perdagangan, transportasi, perikanan, dan jasa. Sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi, serta konstruksi menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan terus berkontribusi terhadap PDRB kota ini, menandakan bahwa Parepare memiliki potensi sebagai pusat logistik dan perdagangan yang menghubungkan wilayah pesisir dan pedalaman Sulawesi Selatan. Selain itu, sektor

jasa seperti pendidikan dan kesehatan juga memberikan kontribusi penting dan dapat dilihat sebagai sektor unggulan yang semakin berkembang.

Tabel 2. 87. LQ TANPA TAMBANG

SEKTOR PDRB	PDRB Kota Parepare (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		Location Quotient (LQ)	Keterangan
	2022	2023	2022	2023		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp326,32	Rp338,31	Rp72.162,73	Rp72.226,30	0,295378745	Sektor Non Basis
Industri Pengolahan	Rp118,24	Rp121,04	Rp48.363,16	Rp50.425,63	0,151369144	Sektor Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	Rp5,45	Rp5,75	Rp405,21	Rp440,17	0,823772289	Sektor Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp14,56	Rp14,60	Rp436,78	Rp449,62	2,047703196	Sektor Basis
Konstruksi	Rp728,30	Rp759,04	Rp44.303,91	Rp46.608,53	1,026973012	Sektor Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp941,08	Rp990,62	Rp56.510,16	Rp59.194,12	1,055330031	Sektor Basis
Transportasi dan Pergudangan	Rp309,55	Rp330,06	Rp11.999,56	Rp13.024,23	1,598087711	Sektor Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp362,35	Rp388,10	Rp5.135,60	Rp5.474,93	4,470178295	Sektor Basis
Informasi dan Komunikasi	Rp415,83	Rp435,79	Rp28.966,31	Rp30.953,15	0,887834836	Sektor Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp425,72	Rp403,73	Rp11.720,73	Rp12.061,83	2,11075386	Sektor Basis
Real Estate	Rp499,26	Rp522,58	Rp12.468,89	Rp13.094,38	2,5166778	Sektor Basis
Jasa Perusahaan	Rp13,32	Rp14,00	Rp1.644,24	Rp1.796,82	0,491341261	Sektor Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp452,03	Rp448,24	Rp15.132,58	Rp15.641,08	1,807189297	Sektor Basis
Jasa Pendidikan	Rp378,08	Rp409,29	Rp20.750,36	Rp21.329,67	1,210059627	Sektor Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp303,15	Rp315,75	Rp8.643,79	Rp9.277,70	2,146163515	Sektor Basis
Jasa lainnya	Rp163,96	Rp172,60	Rp4.967,33	Rp5.524,67	1,970127001	Sektor Basis

SEKTOR PDRB	PDRB Kota Parepare (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		Location Quotient (LQ)	Keterangan
	2022	2023	2022	2023		
PDRB Tanpa Tambang	Rp5.457,19	Rp5.669,49	Rp343.611,33	Rp357.522,82	1	
PDRB Tanpa Tambang dan Migas						

Tabel tersebut menggambarkan Location Quotient (LQ) Kota Parepare berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha. Data PDRB yang disajikan dalam tabel ini terdiri dari dua wilayah, yaitu Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2022 dan 2023, serta nilai LQ untuk sektor-sektor ekonomi tertentu di Kota Parepare dibandingkan dengan provinsi.

LQ merupakan indikator untuk mengukur konsentrasi suatu sektor ekonomi di suatu daerah relatif terhadap wilayah yang lebih luas. Nilai LQ lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan atau menjadi sektor basis (artinya sektor tersebut lebih terkonsentrasi di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah referensinya), sedangkan nilai LQ kurang dari 1 menunjukkan sektor non-basis, di mana kontribusi sektor tersebut lebih rendah dibandingkan wilayah referensinya.

Berdasarkan tabel, berikut adalah beberapa analisis terhadap sektor-sektor di Kota Parepare:

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai LQ sebesar 0,295, yang menunjukkan sektor ini adalah sektor non-basis di Kota Parepare. Ini berarti kontribusi sektor ini terhadap ekonomi lokal lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Industri Pengolahan juga merupakan sektor non-basis dengan LQ 0,151, menunjukkan bahwa sektor ini kurang dominan di Kota Parepare.

Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang justru memiliki LQ yang sangat tinggi, yaitu 2,047, menandakan bahwa ini adalah sektor basis di Kota Parepare. Ini berarti sektor ini lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi lokal dibandingkan dengan wilayah Sulawesi Selatan.

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan

sektor yang cukup signifikan dengan LQ 1,055, menunjukkan sektor ini juga menjadi sektor basis di Kota Parepare. Jasa Pendidikan memiliki nilai LQ sebesar 2,120, menjadikannya sektor unggulan (basis) di Kota Parepare. Ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki kontribusi yang besar dan sangat penting bagi perekonomian lokal dibandingkan dengan provinsi secara keseluruhan. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga merupakan sektor basis dengan LQ 2,146, menandakan peran yang signifikan dalam ekonomi Kota Parepare.

Sebaliknya, beberapa sektor seperti Konstruksi (LQ 0,626), Transportasi dan Pergudangan (LQ 0,470), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (LQ 0,877) menunjukkan bahwa sektor-sektor ini termasuk sektor non-basis, yang kontribusinya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi.

Dari tabel ini, dapat disimpulkan bahwa Kota Parepare memiliki keunggulan komparatif di sektor-sektor tertentu seperti pengadaan air, jasa pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, sektor-sektor lain seperti pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi masih memiliki potensi untuk ditingkatkan agar dapat memperkuat struktur ekonomi daerah secara lebih merata.

Tabel 2. 88. SHIFT SHARE KOTA PAREPARE

SEKTOR PDRB	PDRB Kota Parepare (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		Location Quotient (LQ)	Keterangan	Shift Share			
	2022 (awal penelitian)	2023 (akhir penelitian)	2022 (awal penelitian)	2023 (akhir penelitian)			PR (Proportional Regional) / Pendorong atau Penghambat Ekonomi	PS (Proportional Shift) / Cepat atau Lambatnya Pertumbuhan	DS (Differential Shift) / Daya Saing	SS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp326,32	Rp338,31	Rp72.162,73	Rp72.226,30	0,295378745	Sektor Non Basis	Rp13,21	-Rp12,92	Rp11,70	Rp11,99
Industri Pengolahan	Rp118,24	Rp121,04	Rp48.363,16	Rp50.425,63	0,151369144	Sektor Non Basis	Rp4,79	Rp0,26	-Rp2,24	Rp2,80
Pengadaan Listrik dan Gas	Rp5,45	Rp5,75	Rp405,21	Rp440,17	0,823772289	Sektor Non Basis	Rp0,22	Rp0,25	-Rp0,17	Rp0,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp14,56	Rp14,60	Rp436,78	Rp449,62	2,047703196	Sektor Basis	Rp0,59	-Rp0,16	-Rp0,39	Rp0,04
Konstruksi	Rp728,30	Rp759,04	Rp44.303,91	Rp46.608,53	1,026973012	Sektor Basis	Rp29,49	Rp8,40	-Rp7,15	Rp30,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp941,08	Rp990,62	Rp56.510,16	Rp59.194,12	1,055330031	Sektor Basis	Rp38,10	Rp6,60	Rp4,84	Rp49,54
Transportasi dan Pergudangan	Rp309,55	Rp330,06	Rp11.999,56	Rp13.024,23	1,598087711	Sektor Basis	Rp12,53	Rp13,90	-Rp5,92	Rp20,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp362,35	Rp388,10	Rp5.135,60	Rp5.474,93	4,470178295	Sektor Basis	Rp14,67	Rp9,27	Rp1,81	Rp25,75
Informasi dan Komunikasi	Rp415,83	Rp435,79	Rp28.966,31	Rp30.953,15	0,887834836	Sektor Non Basis	Rp16,84	Rp11,69	-Rp8,56	Rp19,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp425,72	Rp403,73	Rp11.720,73	Rp12.061,83	2,11075386	Sektor Basis	Rp17,24	-Rp4,85	-Rp34,38	-Rp21,99
Real Estate	Rp499,26	Rp522,58	Rp12.468,89	Rp13.094,38	2,5166778	Sektor Basis	Rp20,21	Rp4,83	-Rp1,72	Rp23,32
Jasa Perusahaan	Rp13,32	Rp14,00	Rp1.644,24	Rp1.796,82	0,491341261	Sektor Non Basis	Rp0,54	Rp0,70	-Rp0,56	Rp0,68
Administrasi Pemerintahan,	Rp452,03	Rp448,24	Rp15.132,58	Rp15.641,08	1,807189297	Sektor Basis	Rp18,30	-Rp3,11	-Rp18,98	-Rp3,79

SEKTOR PDRB	PDRB Kota Parepare (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah))		Location Quotient (LQ)	Keterangan	Shift Share			
	2022 (awal penelitian)	2023 (akhir penelitian)	2022 (awal penelitian)	2023 (akhir penelitian)			PR (Proportional Regional) / Pendorong atau Penghambat Ekonomi	PS (Proportional Shift) / Cepat atau Lambatnya Pertumbuhan	DS (Differential Shift) / Daya Saing	SS
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib										
Jasa Pendidikan	Rp378,08	Rp409,29	Rp20.750,36	Rp21.329,67	1,210059627	Sektor Basis	Rp15,31	-Rp4,75	Rp20,65	Rp31,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp303,15	Rp315,75	Rp8.643,79	Rp9.277,70	2,146163515	Sektor Basis	Rp12,27	Rp9,96	-Rp9,63	Rp12,60
Jasa lainnya	Rp163,96	Rp172,60	Rp4.967,33	Rp5.524,67	1,970127001	Sektor Basis	Rp6,64	Rp11,76	-Rp9,76	Rp8,64
PDRB Tanpa Tambang	Rp5.457,19	Rp5.669,49	Rp343.611,33	Rp357.522,82	1					
PDRB Tanpa Tambang dan Migas										

Shift-share analysis adalah metode ekonomi yang digunakan untuk menganalisis perubahan dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Melalui analisis ini, kita dapat memisahkan dampak pertumbuhan ekonomi secara nasional, sektoral, dan regional terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Tiga komponen utama yang dianalisis dalam shift-share adalah Proportional Shift (PS), Differential Shift (DS), dan Proportional Regional (PR).

- Proportional Shift (PS): Mengukur apakah sektor-sektor ekonomi di suatu daerah tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat nasional. Apabila nilainya positif, artinya sektor tersebut tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional.
- Differential Shift (DS): Mengukur daya saing suatu sektor ekonomi di daerah dibandingkan sektor serupa di wilayah lain. Jika nilainya positif, berarti sektor tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi.
- Proportional Regional (PR): Mengindikasikan kontribusi sektor tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. PR yang lebih besar menunjukkan sektor tersebut memiliki pengaruh besar dalam mendorong perekonomian lokal.

Melalui tabel Shift-Share Kota Parepare yang dihasilkan, kita dapat melihat beberapa sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai produk unggulan daerah. Sebagai contoh, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki Location Quotient (LQ) sebesar 1,05, yang menunjukkan sektor ini termasuk dalam kategori basis, yang berarti sektor tersebut menjadi andalan dan lebih berkembang dibandingkan dengan sektor serupa di wilayah lain. Sektor ini juga memiliki nilai PR sebesar Rp38,10 Miliar, menunjukkan bahwa sektor ini memberikan kontribusi besar dalam mendorong perekonomian Kota Parepare. Meskipun demikian, nilai PS sebesar Rp6,60 Miliar dan DS sebesar Rp4,84 Miliar menunjukkan bahwa sektor ini memiliki pertumbuhan lebih lambat daripada sektor yang sama di wilayah lain dan memiliki daya saing yang dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Sektor lainnya yang juga memiliki potensi besar adalah Transportasi dan Pergudangan, dengan LQ sebesar 4,47, menunjukkan sektor ini sangat mendominasi perekonomian Parepare dibandingkan dengan sektor serupa di wilayah Sulawesi Selatan. Sektor ini memiliki PR sebesar Rp13,50 Miliar, yang berarti sektor ini mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Selain itu, nilai PS yang positif sebesar Rp6,53

Miliar menunjukkan bahwa sektor ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lain, meskipun DS sebesar -Rp5,92 Miliar menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan daya saing di masa depan.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga menjadi sektor basis dengan LQ sebesar 1,23 dan nilai PR sebesar Rp14,67 Miliar, menunjukkan bahwa sektor ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kota Parepare. Namun, sektor ini memiliki PS sebesar Rp9,27 Miliar yang mengindikasikan sektor ini tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan wilayah lain, tetapi DS positif sebesar Rp4,91 Miliar menunjukkan adanya daya saing yang baik.

Selain itu, sektor Real Estate juga memiliki LQ yang tinggi, yaitu 2,51, menunjukkan sektor ini merupakan sektor basis dengan kontribusi besar. Meskipun demikian, nilai DS yang negatif sebesar Rp1,72 Miliar menunjukkan adanya penurunan daya saing sektor ini, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan pertumbuhannya di masa depan.

Dengan melihat berbagai sektor ini, dapat disimpulkan bahwa Kota Parepare memiliki beberapa sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Namun, beberapa sektor perlu ditingkatkan daya saingnya agar mampu bersaing lebih baik di tingkat regional maupun nasional. Optimalisasi kebijakan dan investasi yang tepat di sektor-sektor basis ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Kota Parepare.

Tabel 2. 89. SHIFT SHARE

Sektor	LQ Tanpa Tambang	SS	TK
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			
Pertambangan dan Penggalian			
Industri Pengolahan			
Pengadaan Listrik dan Gas			
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang			
Konstruksi			
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
Transportasi dan Pergudangan			
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			
Informasi dan Komunikasi			
Jasa Keuangan dan Asuransi			
Real Estate			

Sektor	LQ Tanpa Tambang	SS	TK
Jasa Perusahaan			
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
Jasa Pendidikan			
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			
Jasa lainnya			
PDRB			
PDRB Tanpa Migas			

Keterangan :		
Subsektor Prima	Kuadran I	
Subsektor Berkembang	Kuadran II	
Subsektor Potensial	Kuadran III	

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa Kota Parepare memiliki berbagai sektor ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu subsektor prima, subsektor berkembang, dan subsektor potensial. Setiap kategori ini menunjukkan tingkat kontribusi dan potensi sektor-sektor tersebut dalam mendukung perekonomian daerah. Klasifikasi ini penting untuk memahami strategi pengembangan yang perlu diterapkan guna meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Parepare.

Subsektor prima atau sektor yang berada di Kuadran I merupakan subsektor yang sudah sangat matang dan berperan penting dalam perekonomian Kota Parepare. Subsektor-subsektor ini telah memiliki stabilitas yang kuat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data yang ditampilkan, subsektor yang termasuk dalam kategori ini adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kedua subsektor ini menunjukkan performa yang kuat, dengan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Parepare. Sub sektor ini sangat penting karena peran strategisnya dalam mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari serta menjaga stabilitas ekonomi, baik dari segi lingkungan maupun perdagangan. Infrastruktur yang kuat dan kebutuhan mendasar masyarakat terhadap air, sanitasi, serta aktivitas perdagangan membuat subsektor ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Selanjutnya, terdapat subsektor berkembang, yang berada di Kuadran II, mencakup sektor-sektor yang menunjukkan potensi pertumbuhan signifikan dan berada

dalam tahap perkembangan menuju kematangan. Beberapa subsektor dalam kategori ini antara lain adalah Pengadaan Listrik dan Gas, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi. Sub sektor-sektor ini sedang berada dalam fase peningkatan, dan jika didukung dengan kebijakan yang tepat, mereka dapat tumbuh menjadi subsektor prima di masa mendatang. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sangat penting dalam menyediakan infrastruktur energi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri. Sementara itu, sektor Transportasi dan Pergudangan berperan besar dalam menggerakkan arus barang dan jasa, yang menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok dan aksesibilitas pasar. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Informasi dan Komunikasi mencerminkan perkembangan sektor jasa yang semakin penting dalam era digitalisasi dan globalisasi saat ini, serta mampu mendukung aktivitas bisnis dan pariwisata di Parepare. Dengan pengembangan yang lebih intensif, subsektor-sektor ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian kota dan menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi berbasis layanan dan teknologi.

Di sisi lain, terdapat juga subsektor potensial atau yang termasuk dalam Kuadran III, yang mencakup subsektor yang saat ini masih memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap perekonomian, namun memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Dalam konteks Kota Parepare, subsektor yang masuk dalam kategori ini adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Meskipun subsektor ini belum memberikan kontribusi yang maksimal saat ini, namun mengingat potensi alam dan tenaga kerja yang ada di daerah tersebut, subsektor ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi salah satu sektor unggulan. Sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan pertanian, hutan, dan perikanan yang potensial, harus dioptimalkan dengan teknologi dan inovasi pertanian yang tepat guna serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, serta penyediaan akses pasar yang lebih baik akan menjadi kunci dalam mengembangkan subsektor ini.

Dengan demikian, subsektor potensial ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah serta pelaku usaha untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dan memaksimalkan peluang pengembangan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sinergi antara kebijakan lokal dengan upaya peningkatan kapasitas produktif dari subsektor yang ada, baik melalui peningkatan akses terhadap teknologi, pendanaan, maupun pasar.

Secara keseluruhan, Kota Parepare memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan subsektor-sektor ini melalui perencanaan strategis yang berbasis pada potensi dan kekuatan masing-masing sektor. Dengan mengarahkan fokus pada pengembangan subsektor prima yang sudah matang, subsektor berkembang yang sedang menuju kematangan, serta subsektor potensial yang masih memerlukan dukungan lebih lanjut, Parepare dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



BAB 3

Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pembangunan daerah adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi dan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah secara menyeluruh. Dalam konteks Kota Parepare, pembangunan daerah berfokus pada peningkatan infrastruktur fisik dan sosial, seperti jalan, jembatan, listrik, transportasi, dan telekomunikasi, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, sektor-sektor utama seperti perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri lokal juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah Parepare, guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Di Parepare, peningkatan akses dan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan, menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerataan pembangunan antarwilayah juga diperhatikan untuk memastikan semua bagian kota mendapatkan manfaat yang sama. Pembangunan yang holistik ini juga mencakup pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dengan menjaga ekosistem lokal, pengelolaan limbah, serta mitigasi perubahan iklim.

Pertumbuhan ekonomi Parepare dan pembangunan daerah berjalan beriringan. Peningkatan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi perdagangan serta mobilitas masyarakat. Di sisi lain, pengembangan pendidikan dan pelatihan di Kota Parepare memungkinkan peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam mendukung percepatan pembangunan, kebijakan pemerintah Parepare yang pro-investasi serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkembang. Kombinasi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan sosial, serta pengelolaan lingkungan yang baik akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare.

Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar dalam mengidentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 4 (empat) tahun ke depan dalam periode tahun 2025 - 2029. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi

perhatian dalam pembangunan jangka panjang.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah diasumsi memiliki nilai prioritas jika permasalahan tersebut berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Beberapa permasalahan dan isu yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan jangka panjang Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1) Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indeks kesehatan yang diukur dengan angka Usia Harapan Hidup yang rendah mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal. Permasalahan Pada Indeks Kesehatan adalah Angka Harapan Hidup Kota Parepare tahun 2023 sebesar 71,78 tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,22 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh Upaya kuratif yang masih mendominasi dibandingkan upaya promotif dan preventif; Belum semua fasilitas kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut mempunyai sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, Sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal belum mencukupi kebutuhan secara merata; Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata; Penerapan pola hidup sehat belum melembaga di masyarakat; dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum belum semua dipenuhi di seluruh layanan kesehatan. Hal ini juga disebabkan oleh Angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, prevelensi stunting yang tinggi dan masih tingginya kasus tuberculosis menjadi parameter rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

Rendahnya kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan masyarakat Penyebab permasalahan yang berpengaruh pada Indeks Pendidikan adalah rendahnya Angka Rata-Rata Lama sekolah dan Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Parepare tahun 2023 hanya 10,70 tahun, dengan kata lain bahwa lamanya anak bersekolah hanya sampai kelas X (kelas 1 SMA). Sedangkan harapan lama sekolah tahun 2023 hanya 14,54 tahun, artinya

secara rata-rata anak yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah hanya sampai Diploma II. Hal ini disebabkan karena masih terdapat anak putus sekolah dan lulus namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan alasan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Belum optimalnya layanan perlindungan sosial yang adaptif (Penurunan Angka Kemiskinan yang lambat) Kota Parepare memperlihatkan perlambatan penurunan angka kemiskinan, hingga tahun 2023 angka kemiskinan menjadi 5,34 persen. Penyebab melambatnya penurunan angka miskin di Kota Parepare adalah karena belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif, rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan, rendahnya penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, kurang optimalnya penanggulangan masyarakat pra sejahtera. Dalam upaya penanganan kemiskinan dibutuhkan adanya keterlibatan multipihak dan koordinasi lintas sektor. Namun penanggulangan masyarakat pra sejahtera masih kurang optimal dilakukan karena kurang mandirinya masyarakat yang menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, juga penanganan kemiskinan yang tidak terintegrasi. Masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan untuk berusaha mandiri.

2) Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Dan Lemahnya Dukungan IPTEKIN Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

Salah satu cara untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah adalah dengan mencermati nilai dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. PDRB merupakan nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi, tapi lebih menekankan pada keberadaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu. Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2005 hingga 2023 cenderung mengalami perlambatan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,88 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh belum optimalnya aktivitas perekonomian masyarakat, belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor potensial, serta penciptaan dan pengembangan sumber-sumber ekonomi baru belum optimal, Masih rendahnya

kontribusi pdrb industry pengolahan, rendahnya kontribusi pdrb penyediaan makan dan minum, rendahnya produktivitas umkm, koperasi bumh, TPT, TPAK. Penyebab lain melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Parepare adalah jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UMKM belum optimal. Belum optimalnya jaringan pemasaran ini disebabkan oleh masih rendahnya penguasaan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi Koperasi dan UMKM, dan juga karena masih lemahnya informasi data produk dan sistem informasi pasar Koperasi dan UMKM.

3) Belum Optimalnya Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Dalam Pembangunan

Masih rendahnya penerapan standar ekonomi hijau pada pilar lingkungan, Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: Masih tingginya alih fungsi lahan dan hutan. Adanya alih fungsi lahan untuk sektor budidaya (seperti perkebunan dan pertanian monokultur, pertambangan, dan permukiman) berkontribusi terhadap rendahnya persentase luas tutupan lahan hutan tersebut. Alokasi tata ruang untuk budidaya belum sepenuhnya diseimbangkan dengan pelestarian kawasan lindung dan lahan kritis. Tantangan pilar ekonomi menitikberatkan pada pengembangan komoditas unggulan berbasis lahan yang berkelanjutan, rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim sebagai penggerak ekonomi yang 'hijau'. Ekstensifikasi pemanfaatan lahan kurang memperhatikan wilayah budidaya yang sesuai agar tidak menimbulkan risiko bencana untuk daerah sekitarnya.

Pemerintah Kota Parepare telah mengadopsi Arah kebijakan pembangunan, sektor kelautan dan perikanan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan 2021 -2024 telah berorientasi blue economy melalui perluasan wilayah konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak dan pengurangan sampah plastik di laut.

Sebagai dasar penilaian ekonomi biru dapat digunakan melalui pengukuran indeks ekonomi biru yang diukur melalui beberapa komponen utama: 1). Pilar Ekonomi: Terdiri dari tiga subsektor yaitu: (a) Perikanan tangkap dan budidaya, (b) Manufaktur berbasis kelautan, (c) Pariwisata berbasis kelautan. 2). Pilar Sosial: Dibangun dari tiga subsektor yaitu: (a) Ketenagakerjaan, (b) Kesehatan, (c) R&D dan

Pendidikan. 3) Pilar Lingkungan: Mencakup dua subsektor yaitu: (a) Kualitas sumber daya dan konservasi laut dan (b) Energi terbarukan.

4) Belum Optimalnya Daya Saing Digital

Layanan publik di daerah membutuhkan optimalisasi digital diberbagai tataran pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar, antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antar daerah dan antar wilayah dan rendahnya literasi digital. Tingkat kematangan system pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi tantangan terkait dengan tata Kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital.

5) Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global

Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang pada wilayah tertentu saja, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, belum optimalnya peningkatan ekspor barang dan jasa, masih rendahnya kontribusi pusat pusat pertumbuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, melambatnya ekspor antar daerah di tengah peningkatan ekspor luar negeri. masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata.

Masih Rendahnya Peran Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Rendahnya peranan daerah perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan oleh belum optimalnya kontribusi ekonomi perkotaan antaranya; pemenuhan layanan perkotaan belum memadai dan inklusif; pola pembangunan perkotaan yang masih belum tertata sesuai dengan arahan rencana tata ruang; masih terdapatnya masalah sosial ekonomi di masyarakat perkotaan; tata kelola antar wilayah dan antar tingkatan pemerintahan yang belum terpadu, inovatif dan kolaboratif; serta degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana khususnya bencana hidrometeorologi menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Berintegrasi, Adaptif dan Responsif Terhadap Perubahan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pelayanan publik; belum optimalnya penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi; Masih terjadi kerentanan pelayanan publik terhadap risiko korupsi; Belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa serta transparansi pelayanan perizinan berbasis digital. Masih rendahnya etos kerja, belum optimalnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik yang adaptif, dan masih rendahnya keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kemampuan merespon aspirasi masyarakat.

7) Belum Optimalnya Kualitas Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah dan Demokrasi

Kualitas hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi yang belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kasus korupsi yang meningkat, baik dalam sistem hukum dan pemerintahan; ketidaksetaraan akses ke hukum di Masyarakat; Pelanggaran hak asasi manusia seperti penahanan yang sewenang-wenang, penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan; konflik dan ketidakstabilan politik; teknologi keamanan siber masih kurang, Tingkat Pendidikan dan pemahaman hukum Masyarakat masih terbatas; akses terhadap layanan Kesehatan mental masih terbatas; peredaran narkoba yang belum terselesaikan.

8) Kurang Stabilnya Kondisi Ekonomi Makro Dan Randahnya Kapasitas Fiskal Daerah

Kurang stabilnya kondisi Ekonomi Makro yang terjadi disebabkan karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah yang dapat mengakibatkan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan; Kurangnya kemandirian kapasitas fiskal daerah yang diindikasikan fiskal daerah bersifat fluktuatif di kategori sedang hingga rendah. Hal ini disebabkan karena

ketergantungan terhadap Transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD). Kualitas belanja daerah masih rendah.

9) Belum Optimalnya Moderasi Beragama Dan Pemajuan Budaya

Adapun kurang optimalnya moderasi beragama disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Posisi daerah sebagai daerah perlintasan di Sulawesi Selatan sehingga menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya paham kegamaan yang kurang moderat yang cenderung ekstrem serta tidak toleran kepada kelompok lainnya. Selain itu berkembangnya ekstremisme, klaim kebenaran dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta ketimpangan ekonomi, sosial, pendidikan, dan pengetahuan antar masyarakat dan wilayah juga berkontribusi terhadap penurunan toleransi dan kerjasama beragama. Kurang optimalnya dialog antar tata nilai yang berbeda, seperti antara penganut agama, penghayat kepercayaan, serta melemahnya penanaman dan penerapan ajaran agama sejak dini juga menjadi penyebab yang penting untuk diperhatikan. Pemajuan kebudayaan di daerah belum berjalan dengan optimal. Pemajuan kebudayaan yang belum menunjukkan hasil yang optimal disebabkan oleh beberapa hal yaitu : 1. Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif, 2. Kurang berkembangnya inovasi ekonomi berbasis perlindungan dan pemanfaatan seni budaya, 3. Melemahnya pelestarian nilai-nilai budaya positif di Tengah Masyarakat dan keluarga, 4. Lemahnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas antara pelaku seni dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, 4. Lemahnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, dan 5. Belum tersedianya informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

10) Belum Optimalnya Kualitas Ketahanan Keluarga

Peningkatan Kualitas ketahanan keluarga belum menunjukkan hasil yang optimal diindikasikan oleh menurunnya kualitas ketahanan sosial psikologi keluarga. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, meliputi : Belum terbangunnya upaya

sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; Belum tersedianya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga yang terstandarisasi di kabupaten/kota, baik dari aspek tenaga pemberi layanan, sarana prasarana, dan jenis layanannya ; dan Kurangnya peran lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga akademis, dan media dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga di provinsi dan kabupaten/kota.

11) Belum Optimalnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali. Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak belum optimal.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yang berakibat belum maksimalnya implementasi perencanaan dan proporsi anggaran yang berpihak pada anak; 2. Belum efektifnya peran bimbingan dan pengawasan provinsi terhadap perwujudan Kabupaten/kota Layak Anak di Sulawesi Selatan; 3. Permasalahan anak belum dianggap sebagai urusan lintas sektor (cross cutting issues) sehingga efektifitas sistem perlindungan anak sebagai sebuah ekosistem menjadi lemah; 4. Belum efektifnya (kapasitas dan kuantifikasi) layanan pengaduan terpadu, penyediaan layanan yang aksesibel dan inklusif bagi anak antar sektor dan antar wilayah, 5. Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat, pengembangan dan pelebagaan pengasuhan dan perawatan, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan anak dan meningkatkan kerentanan anak menjadi korban perlakuan salah, dan 6. Belum optimalnya peningkatan kualitas anak dan pemuda termasuk penyandang disabilitas, yang dapat membentuk resiliensi, meningkatkan kompetensi dan daya saing anak dan pemuda, dan mampu berkiprah dalam kancah nasional maupun internasional, serta menghindarkan anak menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

12) Lambatnya Penurunan Ketimpangan Gender dan Implementasi Inklusi Sosial

Ketimpangan gender diindikasikan dari ketimpangan pada 3 dimensi yaitu dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pada dimensi kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi keadaan geografis suatu wilayah terutama

pada daerah terpencil yang mengakibatkan akses layanan kesehatan terbatas, biaya persalinan yang tinggi dan masyarakat miskin sebagian belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional, rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas, perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak mendukung kualitas hidup ibu dan bayi baru lahir, dan ketersediaan SDM layanan kesehatan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan dari aspek kuantitas maupun kualitas.

Pada dimensi pemberdayaan terdapat beberapa penyebab ketimpangan gender yaitu rendahnya akses masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) terhadap pendidikan yang mudah dijangkau dan berkualitas, perbedaan tingkat sosial yaitu masyarakat golongan menengah ke atas lebih mudah mengakses pendidikan dibandingkan masyarakat miskin, sebaran sekolah yang tidak merata yaitu sebagian besar masih berorientasi pada daerah perkotaan, budaya patriarki yang menempatkan laki laki memiliki peluang pendidikan lebih besar dibanding perempuan, belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mengupayakan pemenuhan hak pendidikan yang membutuhkan perlindungan khusus hingga jenjang pendidikan tinggi seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak jalanan, korban perkawinan anak, anak di panti dan lainnya, ketersediaan SDM tenaga pendidik/kependidikan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan dari aspek kuantitas maupun kualitas , dan rendahnya kenaikan Angka Harapan Lama Sekolah.

Pada dimensi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap modal penghidupan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbatasnya kesempatan dan peluang kerja, terutama untuk perempuan dan penyandang disabilitas, masih belum setaranya akses perempuan dan kelompok rentan dalam memperoleh peluang pekerjaan, dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki memiliki proporsi pekerjaan dan upah lebih besar dibanding perempuan.

13) Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas belum optimal dilaksanakan. Kualitas Lingkungan Hidup yang sangat dipengaruhi menurunnya luasan tutupan hutan; menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; meningkatnya luas jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir. Selain itu

jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati terus menurun dan masih rendahnya persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah yang tergambarkan pada menurunnya persentase penanganan sampah dan menurunnya persentase pengurangan sampah.

Kondisi ini disebabkan oleh: belum optimalnya upaya penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi; menurunnya upaya pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; perencanaan tata ruang belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana; belum optimalnya penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah; belum optimalnya penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; serta belum terpadunya pengelolaan sampah untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber dan belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah.

14) Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan

Penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan diindikasikan oleh belum meratanya dan belum berkualitasnya akses energi; masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; masih rendahnya kapasitas tampungan air dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.

Menurunnya ketahanan energi disebabkan belum terpenuhinya pasokan listrik untuk pemenuhan kebutuhan industry; belum optimalnya upaya pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; terbatasnya upaya pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil khususnya

pada daerah kepulauan. Sedangkan permasalahan terkait menurunnya kemandirian pangan disebabkan masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan; masih rendahnya diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan; masih terbatasnya pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; masih terbatasnya jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun; masih terbatasnya penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerahkepulauan dan rawan air.

15) Belum optimalnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Belum optimalnya optimalnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim akibat adanya pembangunan yang masif dan tingginya aktivitas ekonomi dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologis dan tingginya tingkat pencemaran lingkungan. Pencemaran air, udara, lahan dan pesisir/laut terus terjadi diakibatkan laju tekanan terhadap lingkungan lebih cepat dibanding upaya pencegahan dan pengendaliannya.

Disamping itu, Perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara dan cuaca ekstrim akan mempengaruhi periode musim, dimana musim kemarau akan lebih panjang dan musim hujan semakin pendek atau sebaliknya. Hal ini akan mempengaruhi ketersediaan dan pemenuhan air, selain itu akan mempengaruhi pola tanam sehingga dapat mempengaruhi produksi dan produktifitas komoditas pertanian. Selain itu perubahan iklim juga menyebabkan terganggunya ekosistem laut dan pesisir. Perubahan iklim yang terjadi, berkurangnya tutupan hutan dan menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan mengakibatkan meningkatnya bencana hidrometeorologi, sehingga diperlukan upaya intervensi kebijakan adaptasi mitigasi terhadap perubahan iklim dengan mengarusutamakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penerapan ekonomi hijau. Kebijakan dan upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak perubahan iklim, kerugian ekonomi dan meningkatkan ketahanan (resilience) akibat perubahan iklim

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tingkat intensitas emisi menjadi Zero emission antara lain: a) lemahnya pelaksanaan pelestarian dan

rehabilitasi lahan kritis yang terdampak aktivitas perekonomian komoditas/sektor unggulan; b) masih terjadinya pembukaan lahan dan alih fungsi lahan untuk sektor ekonomi unggulan (untuk perkebunan monokultur, pertanian, pertambangan); c) rendahnya praktik dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan serta ramah lingkungan pada sektor ekonomi unggulan; d) kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian cenderung bersifat ekstensifikasi dibanding intensifikasi. Diperlukan beberapa upaya antara lain mendorong peningkatan produktivitas ekonomi yang tetap mengupayakan pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam dan jasa ekosistem, mendorong intensifikasi sektor ekonomi unggulan yang rendah karbon, serta transisi dari subsidi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

16) Belum optimalnya Pengembangan infrastruktur pemenuhan layanan seiring pertumbuhan populasi.

Kondisi ini telah dan akan memicu penyediaan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang sedang atau telah dilaksanakan di daerah meliputi antara lain Pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, irigasi pertanian, serta infrastruktur dasar lainnya semua dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur guna mengimbangi pertumbuhan populasi penduduk. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur namun masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga, kurangnya pendanaan untuk Pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi Masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana.

3.2. Isu Strategis Daerah

3.2.1. Isu Strategis Nasional

A. Bonus Demografi

Bonus Demografi yang menunjukkan penduduk usia produktif (15 – 64 Tahun) yang lebih besar dari penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 Tahun), Bonus demografi nasional berdasarkan proyeksi BPS akan mencapai puncak di tahun 2025, dan selanjutnya akan mengalami penurunan meskipun dari komposisi penduduk tetap berada pada angka di atas 65% dari total jumlah penduduk. Bonus demografi di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami tren yang sama yaitu pada tahun 2020 sebesar 68,57% dari total jumlah penduduk dan diproyeksi pada tahun 2045 mengalami penurunan menjadi 66,29% dari total jumlah penduduk. Meskipun tren proyeksi tersebut menunjukkan penurunan jumlah usia produksi dari tahun ke tahun namun masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan. Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran terdidik akibat jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga tantangan bagi kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing secara global perlu menjadi perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi yang terjadi.

B. Pembangunan Belum Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan pada konsep menjamin stabilitas ekosistem dan keberlanjutan Pembangunan maka parameter yang perlu dipertimbangkan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan antara lain: (a) Peningkatan aktivitas Pembangunan sangat penting untuk disinergikan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan capaian ideal, yaitu: (i) 70% daerah terbangun dan 30% daerah terbuka hijau serta 10% daerah terbuka hijau untuk lingkungan permukiman; (ii) Secara wilayah alih fungsi guna lahan sangat penting untuk dikendalikan dengan capaian yang diharapkan sebesar 60-70% merupakan kawasan lindung dan 30% Kawasan budidaya; (iii) Indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal yang perlu dipenuhi, yaitu (i) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (ii) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (iii) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (iv) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur

berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, yaitu: (i) Indeks Kualitas Air sebesar 50,00; (ii) Indeks Kualitas Udara sebesar 88,00; (iii) Indeks Kualitas Lahan sebesar 60,00, dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 84,00. (b) Indeks risiko bencana dan indeks ketahanan daerah penilaian Indeks Risiko Bencana (IKD) adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Indikator penilaian yang dapat dilakukan, yaitu: (i) Kemampuan aparaturnya daerah untuk memetakan wilayah rawan bencana sebesar 80%, (ii) Terciptanya pemulihan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon sebesar 70%, (iii) Pengelolaan kebencanaan melalui penyuluhan dan sosialisasi sebesar 80%, dan (iv) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kebencanaan sebesar 80%. (c) Ketahanan pangan dan ketahanan energi. Indeks ketahanan pangan ideal yang ditargetkan mencakup tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil rewiu terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas berdasarkan situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan). Sedangkan indeks ketahanan energi mencakup 4 parameter penting, yaitu: (i) Availability, yakni dari ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri; (ii) Accessibility, yaitu dari kemampuan untuk mengakses sumber energi infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik; (iii) Affordability yaitu dari keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi; (iv) Acceptability yaitu berdasarkan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat. (d) Indeks ketahanan air. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah,

terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dengan demikian, capaian target yang diharapkan dapat terpenuhi yaitu sebesar 70-80% kebutuhan akan distribusi jaringan mampu terpenuhi. Pembangunan berkelanjutan perlu didorong dengan pemanfaatan energi baru terbarukan, peran strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong hal tersebut adalah : (i) Penggunaan sumber daya energi surya untuk mengantisipasi kelangkaan energi listrik; (ii) Pengelolaan lingkungan daerah DAS dan wilayah aliran sungai untuk menjamin kelangkaan pasokan dan distribusi air bersih; (iii) Optimalisasi bauran energi untuk mendukung kelangsungan pembangunan; (iv) Optimalisasi pemanfaatan energi angin dan penggunaan energi biomassa untuk pengendalian pencemaran udara.

C. Transformasi Teknologi Digital

Transformasi teknologi digital terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan Masyarakat Indonesia mengikuti tren perkembangan dunia dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini.

Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai peranan utamanya, individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, termasuk dalam melakukan transaksi secara elektronik dimana saja. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum terbukti makin membaik dengan meningkatnya nilai indeks literasi digital dari tahun 2020 sebesar 3,46 poin, kemudian tahun 2021 naik menjadi 3,49 poin (naik 0,03 poin), selanjutnya tahun 2022 berhasil naik 0,05 poin dari 3,49 menjadi 3,54 poin yang menempatkan Indonesia berada pada kategori “sedang” Indikator literasi digital yang dikur berdasarkan kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya

digital menjadi pijakan dalam melakukan pemetaan target sasaran serta pemetaan kebutuhan literasi masyarakat, agar program nasional Literasi Digital dapat dieksekusi secara efektif dan tepat sasaran.

Namun, tingkat literasi digital di Indonesia belum merata pada seluruh provinsi. Capaian indeks literasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 3,44 poin, yang masih berada dibawa capaian nasional, demikian juga pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan belum termasuk dalam 15 Provinsi dengan indeks literasi digital terbaik, sehingga hal ini merupakan tantangan mengingat bahwa salah satu sisi positif dari transformasi teknologi digital adalah masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

D. IKN dan Pemerataan Pembangunan

Kedudukan dan fungsi strategis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal sebagai motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN Dalam rangka mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan di Sulawesi Selatan antara lain melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum. pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga. Aspek daya saing, kendala makro dan fiskal serta aspek pembiayaan menjadi faktor penghambat. Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Soekarno dan Pelabuhan Parepare menjadi sarana untuk mengintegrasikan penumpang transit hub wilayah KTI dan logistik ke pulau Kalimantan (IKN). peluang Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan kesempatan untuk membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini didukung dengan potensi dan penyiapan sumber daya yang berkualitas.

Sulawesi Selatan sebagai Prioritas Industri berdasarkan Koridor Ekonomi antara lain dalam Industri berbasis sumber daya alam (agro dan hilirisasi tambang), industri barang konsumsi berkelanjutan, industri kreatif (film, animasi dan visual arts, kuliner).

E. Penguatan SDM Dan Kesejahteraan Sosial

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mulai tahun 2019 dan selanjutnya menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan, Pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan- perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Kota Parepare dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Kota Parepare sebagai kota maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam.

Salah satu yang menjadi masalah di hampir seluruh daerah yaitu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dengan pendekatan pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh, kemiskinan di Indonesia secara statistik mengalami penurunan. Berdasarkan angka yang dirilis BPS, perlu ditekankan bahwa wilayah perdesaan masih mendominasi tingginya persentase kemiskinan. Dikarenakan adanya ketimpangan antara desa dan kota. Di Kota Parepare, tingkat kemiskinan selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kota Parepare sebesar 5,40 (7,93 ribu jiwa) yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 5,41 (8,01 ribu jiwa) dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,34 (7,98 ribu jiwa).

Pemerintah telah menargetkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Parepare. Dalam mendukung target pemerintah tersebut, beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan pemberian bantuan usaha serta pelatihan kewirausahaan dan pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka mendorong kesejahteraan mereka. Dalam upaya penanganan kemiskinan dibutuhkan adanya keterlibatan multipihak dan koordinasi lintas sektor. Dengan partisipasi masyarakat secara aktif diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin dapat berjalan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah yang berperan sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk Kesehatan, Akses dan kualitas pendidikan, Perlindungan Sosial dan kebutuhan akan pangan.

Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Hal ini mengingat bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terkait erat dengan segala aspek kehidupan. Kesehatan juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah dan indeks kesehatan yang dapat dilihat dari angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup Kota Parepare selama rentang lima tahun terakhir (2019- 2023) menunjukkan tren peningkatan, dimana AHH Kota Parepare Tahun 2019 sebesar 71,27 tahun meningkat menjadi 71,78 tahun pada tahun 2023. Peningkatan AHH ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan Kota Parepare selama 5 tahun tahun terakhir.

Peningkatan layanan kesehatan menjadi tugas pemerintah Kota Parepare untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup sehat. Caranya dengan memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau untuk semua anggota masyarakat yang kian bertambah. Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan adanya sosialisasi dan promosi di bidang kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk

mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga serta lingkungannya secara mandiri dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Permasalahan pelayanan dasar bidang kesehatan yang dijelaskan sebelumnya, seperti keterlambatan pasien dalam memeriksakan diri secara dini ke pelayanan kesehatan dan adanya tambahan penyakit komplikasi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penularan DBD, makin berkembangnya sumber penularan HIV yang berasal dari berbagai faktor risiko, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penularan HIV/AIDS yang menimbulkan stigma dan diskriminasi pada ODHA, dan sebagainya menunjukkan bahwa sosialisasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat masih belum berjalan efektif.

Selain Kesehatan, juga perlu adanya perlindungan sosial bagi Masyarakat. Dimana perlindungan sosial merupakan Upaya pemerintah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Perlindungan sosial dalam rencana Pembangunan nasional diartikan sebagai suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi Masyarakat miskin, terutama kelompok Masyarakat yang paling miskin (*the poorest*) dan kelompok Masyarakat miskin (*the poor*). Perlindungan sosial memberikan akses pada Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, Kesehatan dan Pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu perlindungan sosial juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin.

Akses dan kualitas Pendidikan juga merupakan isu yang sama pentingnya. Untuk itu, permasalahan keduanya mesti diperbaiki dan ditingkatkan bersamaan. Pembangunan pendidikan di Kota Parepare menunjukkan tren peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Parepare dalam lima tahun terakhir (2019-2023). Rata-rata lama sekolah di Kota Parepare tahun 2019 sebesar 10,45 tahun meningkat di tahun 2023 menjadi 10,70 tahun, dengan kata lain bahwa lamanya anak bersekolah sampai kelas X (kelas 1 SMA). Meskipun terjadi peningkatan, nyatanya rata-rata anak belum bisa menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang pendidikan menengah atas. Berberapa permasalahan pelayanan dasar bidang pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya

masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, seperti banyaknya siswa yang tidak bersekolah dan berhenti/putus bersekolah karena tuntutan ekonomi dan masih adanya orangtua yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting, pengaruh lingkungan, masalah ekonomi yang menyebabkan anak membantu orangtua mencari nafkah.

Sedangkan harapan lama sekolah di Kota Parepare tahun 2019 sebesar 14,50 tahun dan meningkat di tahun 2023 menjadi 14,54 tahun, artinya secara rata-rata anak yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah hanya sampai Diploma II. Sebagai pusat pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota Parepare telah membangun Institut BJ. Habibie yang berbasis sains dan teknologi. Dengan adanya perguruan tinggi tersebut, diharapkan dapat memudahkan akses pendidikan bagi pelajar baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah Kota Parepare untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sistem kurikulum pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia dan tuntutan pasar kerja. Kurikulum pendidikan harus memasukkan bidang ilmu yang relevan dengan perkembangan teknologi dan industri, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya yang baik. Dengan demikian, lulusan pendidikan dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, serta menjadi warga negara yang berkualitas.

Selanjutnya, Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah, oleh karena itu ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintah. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan.

Lembaga kajian Nagara Institute mencatat, ada fakta bahwa situasi pangan global sedang tidak baik-baik saja. Ancaman krisis pangan ini salah satunya tergambar dari populasi manusia yang terus meningkat signifikan, sementara volume produksi pangan penuh dengan ketidakpastian. Di saat yang sama, terus terjadi alih fungsi lahan pertanian secara masif. Lahan yang tersisa pun kualitasnya terus mengalami penurunan. Sehingga, defisit pangan dalam negeri bukan hal yang

mustahil bisa terjadi.

Tidak hanya itu, masalah lainnya yaitu kerap terjadi instabilitas dan disparitas antara pasokan dan harga pangan baik antar-wilayah maupun antar-waktu. Situasi tersebut tidak hanya merugikan petani di tingkat hulu, tapi juga memberatkan konsumen di tingkat hilir.

Pengelolaan cadangan pangan dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi krisis pangan dan stabilisasi harga serta antisipasi bencana alam. Kerawanan bencana alam secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dari sisi produksi pangan, bencana alam seperti banjir dan kekeringan akan menimbulkan kerusakan pada tanaman yang akan mempengaruhi ketersediaannya untuk dikonsumsi. Dari sisi distribusi, bencana alam dapat merusak prasarana dan sarana transportasi, serta sarana logistik pangan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pasokan pangan ke lokasi bencana terganggu. Keadaan ini akan mengakibatkan hambatan akses fisik bagi masyarakat korban bencana. Disamping itu, bencana alam juga mengakibatkan kehilangan atau kerusakan harta benda bagi masyarakat korban bencana, yang pada gilirannya akan menurunkan akses ekonomi terhadap bahan pangan karena menurunnya daya beli para korban bencana. Dalam konteks inilah cadangan pangan perlu dikembangkan untuk mengantisipasi dampak dari bencana alam terhadap kerawanan pangan bagi para korban bencana.

Penguatan cadangan pangan juga dilakukan dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat rawan pangan. Kondisi kemiskinan masyarakat memperkuat justifikasi bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan pangan guna meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pangan, utamanya akses terhadap pangan pokok. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi tentang jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah (pada semua tingkatan), cadangan pangan swasta dan cadangan pangan masyarakat agar pengelolaan cadangan pangan menjadi suatu sistem yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, baik kerawanan pangan yang bersifat transien (dampak bencana dan gejolak harga), maupun kerawanan pangan kronis (dampak kemiskinan).

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas SDM dan teknologi di sektor pertanian. Sementara untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian, pemerintah juga perlu membenahi masalah pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi. Dalam jangka panjang, harus ada pembangunan/investasi pada fasilitas produksi bahan

baku pupuk. Selain itu, harus ada perbaikan sistem subsidi pupuk dan jaminan ketersediaan variasi kombinasi pupuk untuk kesesuaian dengan kondisi geografis setiap daerah. Infrastruktur transportasi dan ekosistem logistik pangan juga ikut mendapat sorotan. Perlu adanya peningkatan akses jalan yang menghubungkan sentra produksi pangan dengan simpul transportasi. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk pengembangan angkutan pangan seperti tol laut dan meningkatkan peran BUMN bidang transportasi.

Penguatan Infrastruktur, Kewilayahan, Lingkungan Hidup Keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana transportasi. Sarana dan prasarana tersebut menjadi pendorong bagi berputarnya roda perdagangan dan industri. Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai prasarana transportasi darat mempunyai arti yang sangat penting, mengingat fungsinya untuk memperlancar arus barang dan orang dari satu tempat ketempat lain dan arus barang dari sumber-sumber produksi ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu, kegunaan jembatan dan jalan raya antara lain memperlancar pertumbuhan perekonomian sebuah bangsa; pemerataan perekonomian; kelancaran lalu lintas; pertumbuhan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) daerah dan sebagainya. Adanya jembatan atau jalan raya juga memiliki fungsi sebagai penghubung; keamanan sebuah daerah dapat lebih merata; pertukaran budaya antar daerah dan mempercepat aktivitas masyarakat di wilayahnya.

Salah satu akses utama jalur Trans Sulawesi di Parepare adalah Jembatan Sumpang Minangae, namun jembatan tersebut dinilai sudah sangat tidak memadai. Hal ini menimbulkan kemacetan dan berdampak pada ketidaknyamanan pengguna infrastruktur jalan dan jembatan pada umumnya. Pembangunan jembatan kembar sebagai alternatif jembatan Sumpang Minangae yang mulai dibangun sejak tahun 2022 diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemacetan tersebut. Untuk lebih memudahkan akses dari daerah lain diperlukan dukungan sarana dan prasarana transportasi lainnya seperti pembangunan jalan dan pembangunan rel kereta api. Jalan merupakan faktor utama yang mendukung mobilitas atau pergerakan dari suatu daerah ke daerah yang lainnya, oleh karena itu sudah sebaiknya dilakukan penyediaan jalan yang baik. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan secara umum dalam keadaan baik, sudah menggunakan perkerasan namun sebagian jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau

permukiman. Dibutuhkannya akses Jalan baru diluar eksisting untuk melayani permukiman, sebagai penghubung dengan sistem jalan perkotaan. Masih terdapat jalan lingkungan dengan lebar < 1,5 meter, tidak sesuai dengan standar layak jalan lingkungan. Jalan tersebut harus ditingkatkan agar perkembangan ekonomi, wilayah dan perpindahan orang serta barang dapat dilayani dengan baik. Pemeliharaan dan peningkatan jalan tersebut memerlukan program penanganan yang tepat sehingga dana pemeliharaan dan peningkatan dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Pembangunan rel kereta api juga dapat mendukung percepatan pembangunan suatu daerah. Pemerintah telah lama merencanakan pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi Makassar–Parepare. Proyek yang dibangun dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha ini diharapkan akan mampu mendorong konektivitas nasional. Proyek Strategis Nasional Kereta Api Makassar-Parepare yang mulai dikerjakan sejak tahun 2014 lalu akhirnya mulai terwujud di Sulawesi Selatan. Tahun 2022, rute sepanjang 84 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Maros dan Barru sudah dioperasikan secara terbatas.

Pada tahap selanjutnya, proyek pembangunan kereta api ini akan dilanjutkan untuk rute dari Mandai menuju Makassar serta dari Barru menuju Parepare. Dengan adanya sarana dan prasarana transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan arus lalu lintas barang dan penumpang yang mampu meningkatkan perekonomian serta daya saing daerah.

Dengan adanya Konsep smart city membuat layanan e- government dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat. Dengan begitu, ini bisa meningkatkan produktivitas daerah atau daya saing ekonomi. Smart city juga membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya. Konsep itu juga menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan. Lingkungan juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Manfaat lain konsep smart city berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Smart city akan meningkatkan pelayanan kesehatan.

Disisi lain Penataan kawasan permukiman kumuh juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Permasalahan pada

Lingkungan Perumahan dan Permukiman di Kota Parepare adalah masih adanya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, menurunnya kualitas lingkungan permukiman, kualitas perumahan dan permukiman masih belum memenuhi standar pelayanan yang memadai seperti terbatasnya ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, tempat usaha dan perdagangan, adanya perumahan yang terbangun oleh pihak pengembang, belum dilengkapi sarana dan prasarana layak, tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum diimbangi kemampuan penyediaan, baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, perumahan dan permukiman yang spesifik, unik, tradisional, dan bersejarah juga semakin rawan keberlanjutannya, padahal merupakan asset budaya bangsa yang perlu dijaga kelestariannya, belum diwujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan sebagai respon dari New Urban Agenda khususnya Agenda Perumahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar untuk menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan (kota yang inklusif tanpa permukiman kumuh), kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap PHBS, Tidak sesuai jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinnya (terjadi backlog).

Permasalahan lingkungan yang masih menjadi tantangan pengelolaan perkotaan erat kaitannya dengan layanan sanitasi dan air bersih bagi masyarakat. Menjamin ketersediaan pelayanan sanitasi dan air bersih untuk semua merupakan target SDG's 2030. Sanitasi dan air bersih yang dikelola dengan aman diakui sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesehatan, gizi, dan produktivitas masyarakat, dan merupakan target eksplisit Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) keenam. Oleh karena itu, mencapai SDG 6 memerlukan strategi yang lebih dekat untuk menjangkau anak-anak dan keluarga Indonesia yang paling miskin dengan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pasokan air, sanitasi dan kebersihan (WASH) yang dikelola dengan aman.

Permasalahan sanitasi yang terjadi dan berhubungan langsung dengan masyarakat di Kota Parepare adalah buangan air limbah terbuang langsung ke saluran atau terbuang ke lahan terbuka sehingga akan menimbulkan pencemaran air tanah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah sehingga menimbulkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang dapat mengakibatkan

gangguan kesehatan, belum dipahami dan diterapkannya PHBS pada masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kualitas hidup serta derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kondisi sanitasi kota diperlukan adanya sistem pengelolaan air limbah (SPAL). Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kota Parepare pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan peningkatan fungsi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah ada.

Salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan perkotaan adalah penyediaan air minum karena merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan rumah tangga merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Parepare dalam penyediaan air bersih dan layak adalah banyaknya permukiman baru yang lokasinya belum dapat diakses oleh jaringan air bersih dari PDAM. Ketersediaan air baku sangat terbatas, terdapat penampungan air/ bak pembagi/ reservoir yang sudah tidak berfungsi/ difungsikan karena terkendala pengelolaan dan pemeliharaan. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen kuat dalam pemenuhan ketersediaan air bersih dan air minum yang layak dengan kualitas yang sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan disiapkannya pendanaan penyertaan modal ke PDAM Parepare untuk membangun sarana dan prasarana air bersih dengan membangun sistem jaringan perpipaan yang lebih baik, pembangunan reservoir dan penjernihan sumber air tanah dalam yang sudah dikaji dan diteliti kapasitas air bakunya. Untuk program jangka panjang Pemerintah Kota Parepare beserta Pemerintah Kabupaten sekitar yang didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berupaya untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih melalui Sistem Pengelolaan Air Minum Skala Regional (SPAM Regional) Ajatappareng yang akan dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang, dan Pemerintah Kabupaten Sidrap.

Disisi lain kondisi jaringan drainase Kota Parepare pada lokasi permukiman memiliki kualitas rusak/ tidak berfungsi baik sehingga air tidak mengalir dengan lancar dan menimbulkan genangan pada waktu musim hujan, kondisi saluran drainase yang mengalami sedimentasi yang diakibatkan dari sampah, masih adanya

daerah yang tidak terdapat saluran drainase. Akses drainase tersier tidak terhubung ke akses drainase sekunder dan primer, drainase yang berada di jalur jalan areri (jalan provinsi) bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga drainase tidak diintervensi (menunggu pendanaan provinsi atau Pusat).

Dalam kehidupan ini, permasalahan lingkungan hidup tidak terlepas dari keterkaitan antara ketersediaan sumber daya alam (air, tanah, udara) dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Lingkungan hidup (Environment) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya) yang mempengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No. 32 Th. 2009). Pengambilan sumber daya alam dengan tidak benar sangatlah merugikan lingkungan, misalnya pengambilan ikan dengan peledak, tambang batubara yang menghasilkan lubang, polusi udara dan kerusakan terumbu karang akibat distribusi.

Disisi lain kita juga harus memperhatikan pemanasan global dimana peristiwa tersebut merupakan meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Adanya pemanasan global tentu sangat mempengaruhi alam dan juga keberlangsungan hidup para makhluk di dalamnya. penyebab terjadinya pemanasan global adalah akibat adanya efek rumah kaca (greenhouse effect). Terjadinya efek rumah kaca bersumber dari aktivitas manusia, seperti pembakaran limbah pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, pembakaran lahan dan lain sebagainya.

Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena global karena penyebabnya bersifat global, disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia. Selain itu, dampaknya juga bersifat global, dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim yang ditandai dengan berubahnya temperatur, presipitasi dan kenaikan air laut yang selanjutnya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, pertanian, hutan, area pesisir, sumber daya air, spesies dan area alami, permintaan energi, transportasi dan lain-lain menghendaki solusi yang bersifat global, namun dalam bentuk aksi lokal di seluruh dunia. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya dalam mengantisipasi dan meminimalisasi dampak perubahan iklim.

Permasalahan sampah Kota Parepare masih belum selesai dan bisa semakin mengkhawatirkan sebab pertumbuhan jumlah sampah yang juga masih belum dapat

dikendalikan. Dimana penyebabnya adalah sampah perumahan dibuang disembarang tempat, di jalan, selokan dan dilahan kosong bahkan di bakar, makin tingginya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat akibat laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan aktivitas penduduk belum dapat didukung oleh keberadaan sarana persampahan (TPS), penanganan sampah selalu terfokus pada timbulan sampah (pengangkutan dari TPS ke TPA), masih kurang dilakukan pengelolaan sampah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah TPS cenderung menjadi tempat penumpukan sampah yang memberi pencemaran udara dan bau pada masyarakat sekitar, mengganggu keindahan, sehingga masyarakat enggan jika disekitar lingkungannya terdapat TPS, moda pengangkutan sampah sudah tidak layak operasi sehingga mempengaruhi jadwal pengambilan sampah jika moda angkutan rusak.

Disisi lain pemerintah juga harus memperhatikan pengelolaan RTH yang kurang maksimal yang dapat mengakibatkan banjir. Dimana kendala RTH di Kota Parepare adalah terbatasnya lahan untuk dijadikan RTH, kurangnya RTH pribadi (halaman hijau), masih rendahnya proporsi ruang terbuka hijau. Transparansi dan besaran anggaran kebijakan lingkungan yang diperuntukkan terkait pengembangan perkotaan juga belum maksimal dilakukan oleh pemerintah setempat. Masyarakat kota, sektor usaha dan bisnis sering memberikan kontribusi cukup besar dari pemasukan dari pajak dan retribusi lainnya bagi pendapatan (PAD) pemerintah kota. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam klausul UU itu disebutkan, jumlah RTH di setiap kota harus sebesar 30 persen dari luas kota tersebut. RTH di setiap kota memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi ekologis, sosial ekonomi dan evakuasi.

3.2.2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah Kualitas infrastruktur publik. Kualitas infrastruktur publik perlu ditingkatkan termasuk mengembangkan transportasi umum, memperluas jaringan jalan dan meningkatkan kualitas jalan, menyediakan area parkir yang cukup untuk kendaraan pribadi dan bersepeda. Selain transportasi, Kota Parepare juga harus memastikan bahwa fasilitas wisata sudah tersedia dan dibangun dengan standar yang tinggi. Hal ini termasuk

pengembangan hotel dan penginapan, pusat rekreasi, taman dan fasilitas umum lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerja sama dengan daerah lain atau kerja sama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergitas dan saling menguntungkan. Kerja sama daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kota Parepare telah banyak melaksanakan kerjasama daerah di berbagai bidang baik dengan lembaga pemerintah, dengan lembaga non pemerintah maupun dengan pihak ketiga. Banyak alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kerjasama, namun intinya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan tujuan akhir ialah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dalam pembangunan regional, investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan agar menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. Investasi dapat mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan teknologi dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena terbukanya lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan masyarakat sehingga ekonomi regional meningkat.

Pemerintah Kota Parepare tengah merancang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu yang menjadi sasaran adalah optimalisasi Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) dan revitalisasi Terminal Peti Kemas Cappa Ujung. Tidak hanya itu, banyaknya lokasi wisata seperti Anjungan Cempae, Tonrangeng River Side, Monumen Cinta Habibie-Ainun, sampai Stadion Gelora BJ Habibie menjadikan Kota Parepare sebagai kota tujuan bagi wisatawan dari luar daerah. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menjadi daya Tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare juga menysasar sektor jasa dan kuliner sebagai tumpuan investasi. Kedua sektor tersebut dianggap strategis dalam mendorong perekonomian. Keberlanjutan ekonomi melihat bagaimana kita dapat mempertahankan ekonomi yang kuat dengan tetap menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan sosial. Ini berarti menciptakan lapangan kerja, mempromosikan

inovasi, dan menggunakan sumber daya secara efisien.

Dalam hal pembangunan ekonomi, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini berarti menciptakan kebijakan dan praktik yang mendorong pertumbuhan ekonomi sambil melindungi sumber daya alam dan memastikan keadilan sosial. Pembangunan sosial, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat menciptakan institusi dan praktik inklusif yang memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Ini termasuk menyediakan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya; melindungi hak asasi manusia; dan mempromosikan kesetaraan gender. Dan dalam hal perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan mengharuskan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dari degradasi lebih lanjut. Ini termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kualitas udara dan air.

Selanjutnya, Kota Parepare sebagai kota jasa dan niaga sudah tentu mempunyai aktivitas pelaku perjalanan penumpang kapal yang bervariasi. Ada 4 pelabuhan di Kota Parepare untuk mendukung industri dan perekonomian yaitu Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Lontange dan Pelabuhan Cempae Parepare. Namun Pelabuhan Nusantara menjadi salah satu pelabuhan utama yang menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal besar milik pelni. Keberadaan Pelabuhan laut menjadikan Parepare sebagai sentra ekonomi terutama ekspor dan impor komoditi di kawasan ajattapareng dan mendukung logistic ke IKN nantinya.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Keberadaan lembaga-lembaga negara yang sifatnya independen dan bertujuan mengawasi penegak hukum, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional, belum optimal membantu berjalannya reformasi di tubuh penegak hukum. Sejumlah faktor menjadi penyebabnya, mulai dari keterbatasan anggaran, upaya pelemahan lembaga, hingga desain kelembagaan yang masih lemah. Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta

penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama baik oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Good Governance menitikberatkan fokusnya kepada masyarakat, dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintahan juga berusaha untuk memenuhi hak-hak rakyat, dan menjalankan pemerintahan serta negara yang berlandaskan asas demokrasi. Sehingga, adanya good governance akan meningkatkan proses demokratisasi yang nantinya akan berdampak pada kehidupan bernegara. Lembaga yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan diperoleh kinerja yang baik. Pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik selalu melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (Participation), Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law), Transparansi (Transparency), Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (Consensus), Kesetaraan (Equity), Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), Akuntabilitas (Accountability), dan Visi Strategis (Strategic Vision).

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, perlu didorong oleh penggunaan teknologi yang dapat memudahkan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan andal, maka diperlukan Tata kelola dan sistem manajemen berbasis elektronik di tingkat nasional. Tata kelola dan pengelolaan system pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kota Parepare sebagaimana yang dirasakan oleh daerah lain di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Govt. Belum optimalnya dukungan kebijakan serta tidak sinerginya antara kemampuan Sumber Daya Manusia dan pembangunan infrastruktur menjadi kendala terhambatnya implementasi SPBE/e-Govt. Implementasi perencanaan pengembangan SPBE/e-Govt yang berjalan lambat, hal ini akibat pada minimnya alokasi anggaran yang mendukung pengembangan SPBE/e-Govt di Kota Parepare. Selain alokasi anggaran, pelayanan publik harus didukung dengan SDM-SDM unggul yang mampu

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital. Tantangan ke depan terkait pelayanan publik semakin menarik karena kehidupan masyarakat telah sangat berubah dimana mereka menuntut layanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan transparan. Negara harus lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kenyamanan dan merangsang masyarakat lebih inovatif, kreatif, produktif serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kolaborasi, komitmen dan inovasi dalam pemberian layanan publik sangat diperlukan dan kondisi yang sekarang dihadapi menjadi pendorong untuk melakukan inovasi ke arah digital melayani menuju pemerintahan digital masa depan.

Nomor	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan	Isu Strategi Kota Parepare
1	Bonus Demografi	Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam belum optimal	Penguatan SDM dan Kesejahteraan Sosial
2	Pembangunan belum berkelanjutan	Kesenjangan Konektivitas antar wilayah	Penguatan Infrastruktur, kewilayahan, lingkungan hidup
3	Transformasi Teknologi Digital	Pengembangan system trasformasi wilayah	Pembangunan ekonomi berkelanjutan
4	IKN dan pemerataan pembangunan	Peran strategis sebagai motor penggerak ekonom	Tata Kelola Pemerintahan yang baik
5		Optimalisasi wilayah pesisir	
6		Produktivitas dan hilirisasi yang rendah	
7		Pengwilayahan komoditas berbasis ketahanan pangan	

3.3. Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang

Dalam era globalisasi dan transformasi digital saat ini, riset dan inovasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan ditingkat mikro seharusnya menjadi fokus utama untuk mempercepat ekonomi daerah melalui riset dan inovasi. Namun, berbagai hambatan harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Keterbatasan infrastruktur penelitian, kurangnya pendanaan, kurangnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta, kekurangan keterampilan SDM, dan kesulitan dalam keberlanjutan adalah beberapa dari masalah tersebut. Terlepas dari hambatan tersebut, ada peluang untuk mengatasinya diantaranya.

3.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih menjadi peluang penting untuk mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi berbasis riset dan inovasi. Hal ini merupakan potensi atau keunggulan yang dapat dijadikan landasan untuk mendorong sektor ekonomi berbasis pengetahuan, meningkatkan daya saing daerah, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam pengembangan riset dan inovasi dapat mempercepat proses penemuan dan pengembangan teknologi baru. Melalui pemahaman yang mendalam tentang metode penelitian, analisis data, dan keahlian teknis, sumber daya manusia dimaksud mampu menjalankan riset yang relevan, mengidentifikasi peluang inovatif, dan merancang solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapi oleh daerah. Keunggulan ini memberikan daya bangkit bagi sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan.

Keunggulan sumber daya manusia yang terampil dalam riset dan inovasi dapat menarik investasi dan pengembangan sektor berbasis pengetahuan. Daerah dengan tenaga kerja yang berkualitas dalam bidang riset dan inovasi menjadi magnet bagi perusahaan dan investor yang ingin memanfaatkan keahlian ini. Investasi dalam penelitian dan pengembangan, laboratorium riset, dan pusat inovasi dapat muncul di daerah tersebut, yang pada gilirannya menciptakan peluang kerja, pertumbuhan industri, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam riset dan inovasi juga dapat berperan sebagai agen perubahan dan penggerak kolaborasi di daerah. Sumber daya dimaksud dapat membangun jaringan kerja yang kuat antara universitas, lembaga penelitian, sektor swasta, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan penciptaan inovasi bersama yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, sumber daya yang terampil dan terlatih juga dapat memainkan peran sebagai mentor atau pelatih bagi generasi muda yang berpotensi, mendorong perkembangan keterampilan dan minat dalam riset dan inovasi.

Dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam pengembangan riset dan inovasi, daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor berbasis pengetahuan, penarikan

investasi, peningkatan kolaborasi, dan pengembangan lapangan kerja yang berkualitas. Penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ini melalui pendidikan, pelatihan, fasilitas penelitian yang memadai, dan kebijakan yang mendorong inovasi. Dengan demikian, daerah dapat menjadi pusat inovasi yang berdaya saing dan berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.3.2. Alternatif Pendanaan

Pendanaan alternatif seperti sumber dana swasta, kemitraan public swasta, atau skema pendanaan berbasis proyek memainkan peran penting dalam mengatasi kendala pendanaan dalam riset dan inovasi. Sumber daya finansial yang memadai adalah elemen krusial dalam mendorong kegiatan riset dan pengembangan inovatif yang berkelanjutan. Sumber dana swasta dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan dalam mendorong riset dan inovasi. Perusahaan swasta yang berminat untuk memanfaatkan potensi riset dan inovasi daerah dapat berinvestasi langsung dalam proyek riset atau mendirikan pusat penelitian dan inovasi. Investasi ini dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan itu sendiri serta memperkuat daya saing dan inovasi dalam lingkup industri tersebut.

Selain itu, kemitraan public swasta juga dapat memberikan pendanaan yang penting untuk riset dan inovasi. Melalui kemitraan ini, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perusahaan atau asosiasi industri dalam mendanai proyek riset dan inovasi yang saling menguntungkan. Kemitraan semacam ini dapat membantu membagi beban pendanaan, mempercepat komersialisasi inovasi, dan meningkatkan keberlanjutan proyek yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan daerah.

Skema pendanaan berbasis proyek juga menjadi pilihan yang menarik untuk mendukung riset dan inovasi. Pendanaan berbasis proyek mencakup pengajuan proposal dan persaingan untuk mendapatkan dana dalam rangka proyek riset dan inovasi tertentu. Proses ini mendorong kejelasan tujuan, keandalan, dan kualitas proyek yang didanai, sambil memberikan kesempatan bagi peneliti dan inovator yang berpotensi untuk mengakses sumber pendanaan yang dapat membantu mereka mewujudkan ide-ide inovatif mereka. Skema pendanaan berbasis proyek dapat diperoleh melalui berbagai macam pendanaan hibah kompetisi baik nasional maupun internasional. Besaran dana dari hibah kompetisi bervariasi, mulai dari 100 juta hingga bernilai milyaran.

Dengan memanfaatkan pendanaan alternatif ini, daerah dapat mengatasi kendala pendanaan dalam riset dan inovasi. Melibatkan sumber dana swasta, kemitraan publik-swasta, atau mengikuti skema pendanaan berbasis proyek membuka pintu untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya finansial yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Penting bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mendorong terciptanya kerangka kerja yang mendukung pendanaan alternatif ini, serta menjalin kemitraan yang kuat dengan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek riset dan inovasi yang dilakukan.

Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan dukungan pendanaan terhadap sembilan perusahaan pemula atau start-up yang tengah mengembangkan produk riset ataupun inovasinya. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong semua pihak terjun ke dunia penelitian sekaligus memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. BRIN membuat skema pendanaan perusahaan pemula berbasis riset (PPBR) untuk mendukung perusahaan pemula yang tidak hanya fokus pada inovasi perangkat keras. Sebab, saat ini banyak potensi pengembangan perusahaan pemula yang juga berbasis data dan rekayasa sosial. Ini merupakan peluang sangat baik dalam kolaborasi pengembangan riset dan inovasi daerah.

3.3.3. Kemitraan dan Kolaborasi

Kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian dapat memungkinkan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian untuk mengatasi kekurangan dan tantangan penelitian dan menghasilkan solusi inovatif yang efektif. Melalui kemitraan, pemerintah dapat menyediakan sumber daya finansial melalui anggaran belanja pemerintah, akses data dan informasi, serta kebijakan yang mendukung pengembangan riset dan inovasi. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan masyarakat dan masalah yang dihadapi oleh daerah. Di sisi lain, sektor swasta membawa pengetahuan dan keahlian industri, serta sumber daya finansial yang dapat diinvestasikan dalam riset dan pengembangan. Pihak swasta dapat membantu mempercepat komersialisasi inovasi, mengidentifikasi peluang pasar, dan memastikan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Lembaga penelitian, seperti universitas atau pusat riset, berkontribusi dengan pengetahuan ilmiah yang mendalam, keahlian penelitian, dan fasilitas penelitian yang canggih. Lembaga penelitian dapat melakukan riset yang mendalam untuk memecahkan

tantangan spesifik, mengembangkan teknologi baru, atau mengidentifikasi peluang inovatif. Melalui kemitraan dengan sektor publik dan swasta, lembaga penelitian dapat memberikan pengetahuan dan temuan inovasi ke dalam praktik yang relevan secara komersial, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian menjadi inti dari kolaborasi yang efektif. Dengan memanfaatkan keunggulan dan kompetensi masing-masing pihak, kolaborasi ini dapat mengatasi kekurangan infrastruktur penelitian yang dihadapi di daerah. Melalui kemitraan dan kolaborasi yang solid antara sektor publik, swasta, dan lembaga penelitian, daerah dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing pihak, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan menghasilkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan daerah. Dalam hal ini, kolaborasi yang berkesinambungan serta saling menguntungkan menjadi kunci untuk mengatasi kekurangan tantangan penelitian dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inovatif.

3.3.4. Pendekatan Lintas Sektor

Pendekatan lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan merupakan pendekatan yang kuat dalam mengatasi hambatan komunikasi dalam kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks percepatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi, kolaborasi antara sektor publik, swasta, akademik, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan lintas sektor melibatkan integrasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai penghubung dan fasilitator dalam memfasilitasi dialog dan pertukaran ide di antara pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi ini, berbagai sektor dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mengatasi masalah bersama dan mencapai tujuan bersama.

Pendekatan lintas sektor dapat mengatasi hambatan komunikasi yang sering terjadi antara sektor-sektor yang berbeda. Perbedaan bahasa, budaya organisasi, dan kepentingan seringkali menjadi hambatan dalam membangun pemahaman yang mendalam dan kolaborasi yang efektif. Dengan pendekatan lintas sektor, pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog terbuka, menciptakan forum diskusi, dan

mempromosikan saling pengertian diantara pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan timbulnya kesamaan visi dan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan, kebutuhan, dan harapan yang saling terkait. Melalui pendekatan lintas sektor, pemerintah daerah dapat mengumpulkan keahlian dan kepentingan dari berbagai sektor, sehingga menciptakan kebijakan yang holistik dan terintegrasi. Kebijakan yang dihasilkan melalui kolaborasi lintas sektor akan mempertimbangkan berbagai aspek dan perspektif, serta mampu menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga dapat mendorong terciptanya inovasi yang lebih baik melalui kolaborasi dalam penelitian, pengembangan produk, dan penerapan teknologi baru.

Dengan menerapkan pendekatan lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, daerah dapat mengatasi hambatan komunikasi, mempromosikan kolaborasi yang lebih baik, dan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai sektor. Kolaborasi yang kuat antara sektor publik, swasta, akademik, dan masyarakat akan menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penting bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi dialog dan mempromosikan kerjasama lintas-sektor melalui forum diskusi, kegiatan kolaboratif, dan kebijakan yang mendukung sinergi antara sektor-sektor tersebut.

3.3.5. Regulasi

Regulasi memiliki peran mendukung riset dan inovasi yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif khususnya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi. Misalnya, pemberian insentif fiskal mampu mendorong investasi dalam riset dan inovasi. Dengan memberikan insentif seperti pengurangan pajak atau keringanan bea masuk untuk peralatan penelitian, pemerintah daerah dapat merangsang perusahaan dan institusi untuk meningkatkan aktivitas riset dan inovasi. Insentif fiskal tersebut dapat membantu mengatasi kendala pendanaan dan mendorong penelitian yang inovatif, serta mempercepat adopsi teknologi baru di sektor industri.

Perlindungan kekayaan intelektual juga sangat penting dalam menciptakan kondisi ekologi lingkungan yang kondusif bagi pengembangan riset dan inovasi. Dengan melindungi hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, pemerintah daerah memberikan insentif dan perlindungan kepada inventor untuk melanjutkan riset dan pengembangan serta mengkomersialisasikan hasil inovasi mereka tanpa takut dicuri atau disalahgunakan. Perlindungan kekayaan intelektual memberikan

kepastian hukum yang memungkinkan para inventor untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari inovasi yang dihasilkan, mendorong investasi dalam riset dan inovasi, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Regulasi riset dan inovasi juga dapat mencakup penyederhanaan prosedur administratif, pendanaan yang konsisten dan berkelanjutan untuk penelitian, dan kerangka kerja yang memfasilitasi transfer teknologi dari dunia akademik ke sektor industri. Regulasi yang cepat dan tepat dapat mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademik, serta mempercepat adopsi inovasi di dunia industry.

Dengan memanfaatkan peluang yang tersebut, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan riset dan inovasi hingga berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kebijakan yang tepat, termasuk insentif fiskal dan perlindungan kekayaan intelektual, daerah dapat mendorong inovasi, mendorong investasi dalam riset dan inovasi, serta mempercepat adopsi teknologi baru di sektor industri. Penting bagi pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang progresif dan sesuai dengan konteks daerah mereka, sehingga menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui nota kesepahaman dalam rangka mendukung penuh upaya mengintegrasikan serta mendayaguna hasil riset dan inovasi nasional dalam rangka perkembangan hukum dan hak asasi manusia. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi sumber daya dan kompetensi yang dimiliki Kemenkumham dan BRIN guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Regulasi pada tingkat nasional akan mempermudah pemerintah daerah dalam menyusun regulasi dan kebijakan tindak lanjut dalam pengembangan riset dan inovasi. Hal ini tentunya menjadi peluang yang sangat baik bagi pengembangan riset dan inovasi di tingkat daerah, khususnya di Kota Parepare.



BAB 4

Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2021 telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Di dalam implementasinya, diatur pula pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) yang berada pada level pemerintah provinsi/kota atau kabupaten. Pembentukan badan riset pada tingkat pemerintah provinsi/kota atau kabupaten diharapkan dapat menjawab tantangan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing dan inovasi nasional agar menjadi semakin kompleks dan dinamis serta sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan aparatur sipil negara pada era digital seperti sekarang. Seperti yang telah diketahui, berdasarkan dari Laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) menyebutkan Indonesia berada di peringkat 87 dari 132 negara. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah karena banyak pilar inovasi seperti luaran kreativitas (peringkat 91), aspek SDM dan riset (peringkat 91) serta kelembagaan (peringkat 107) masih rendah. Oleh sebab itu, diharapkan pembentukan BRIDA dapat menjadi katalis positif untuk mendongkrak posisi Indonesia dalam hal pengkajian dan penerapan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kemajuan sebuah negara dan daerah tidak akan terjadi serta merta atau dengan sendirinya, melainkan harus dilakukan dengan mencari gagasan-gagasan baru. Pengembangan gagasan ini harus senantiasa dilakukan, baik oleh swasta maupun pemerintah, agar terciptanya inovasi yang dapat meningkatkan kinerja. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah pusat saja yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya inovasi di segala bidang pemerintahan, baik untuk peningkatan pelayanan publik, peningkatan tatakelola pemerintahan daerah, maupun peningkatan produktivitas masyarakat. Pada dasarnya, inovasi dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

sehingga daerah-daerah dapat mengalami kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Berbagai peraturan perundangan yang ada menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan inovasi, memiliki peran yang sangat strategis bagi pembangunan nasional. Undang-undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Inovasi merupakan buah dari sebuah proses kreatif, berupa penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbanjirap) atau riset.

Oleh karena itu diperlukan adanya upaya memacu kreativitas di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah akan menjadi pembeda antardaerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Selanjutnya, di dalam UU No 11 tahun 2019, khususnya Pasal 6, menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional antara lain untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Sedangkan pada Pasal 41 menjelaskan bahwa hasil dari proses kreatif berupa penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa peran ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi landasan bagi penyelenggaraan, termasuk di dalamnya perencanaan, pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan atau knowledge based policy; atau dalam bentuk yang lebih operasional disebut kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy. Untuk menerapkan dan mengembangkan riset dan hasil riset serta inovasi dalam pembangunan, digunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi di daerah. Ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah kondisi yang menjadi pendukung atau yang melatarbelakangi berkembangnya riset dan penggunaan hasil riset bagi pembangunan di daerah. Kerangka ini digunakan untuk mengelaborasi bagaimana memperkuat dan pengembangan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya riset dan hasil riset serta inovasi dalam pembangunan di Kota Parepare.

Ekosistem riset dan inovasi di daerah mengacu pada hubungan antara elemen-elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di tingkat daerah (Pasal 1 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah). Pada intinya, ekosistem ini merupakan pola interaksi antara berbagai elemen yang mendorong terbentuknya riset dan inovasi di daerah. Melalui BRIN, Pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki dan memperkuat ekosistem riset dan inovasi di tingkat lokal. Dengan ekosistem yang kuat, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang didasarkan pada riset dan inovasi. Hal ini akan membantu mempercepat pembangunan daerah, terutama dalam penerapan inovasi teknologi. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, ekosistem riset dan inovasi di daerah mencakup beberapa elemen: (1) kebijakan dan infrastruktur riset inovasi di daerah; (2) kapasitas kelembagaan dan dukungan riset inovasi di daerah; (3) kemitraan riset inovasi di daerah; (4) budaya riset inovasi di daerah; (5) keterpaduan riset inovasi di daerah; dan (6) keselarasan dengan perkembangan global. Analisis kesenjangan diperlukan untuk menilai perbedaan antara standar ekosistem yang direkomendasikan oleh BRIN dan kondisi yang ada saat ini, sehingga pemerintah daerah melalui BRIDA dapat melakukan perbaikan dan pengembangan berdasarkan analisis ini.

4.1. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah

Perkembangan jumlah penduduk di Kota Parepare, yang disertai peningkatan urbanisasi, memunculkan tantangan besar terhadap kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan akan papan dan fasilitas pendukung lainnya. Kebutuhan ini mencakup penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan umum masyarakat, yang memerlukan pembangunan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan menjaga kelangsungan hidup masyarakat di perkotaan serta mendukung pencapaian kota yang berkelanjutan (sustainable city). Salah satu sektor penting yang menopang pembangunan Kota Parepare adalah transportasi. Sarana dan prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan memainkan peran kunci dalam memperlancar aktivitas ekonomi, meningkatkan PDRB daerah, dan menghubungkan masyarakat.

Namun, Kota Parepare masih menghadapi krisis transportasi darat dan laut, terutama dalam akses ke RS Hasri Ainun dan Jembatan Sumpang Minangae yang sudah tidak memadai. Untuk mengatasi hal ini, pembangunan jembatan kembar dan rekayasa lalu lintas bagi kendaraan berat sedang diupayakan. Selain itu, pembangunan

infrastruktur air bersih dan sanitasi yang berkualitas juga menjadi perhatian utama dalam rangka mencapai target SDG 6, yaitu menjamin akses air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat. Tantangan dalam penyediaan air bersih mencakup keterbatasan sumber air baku dan sistem perpipaan, terutama bagi permukiman baru. Pemerintah Kota Parepare terus berupaya memperbaiki kualitas air bersih dengan mendukung program jangka panjang seperti Sistem Pengelolaan Air Minum Skala Regional (SPAM Regional) Ajatappareng.

Kebijakan infrastruktur dan riset di Parepare harus berfokus pada inovasi yang mendukung solusi atas berbagai tantangan tersebut. Kebijakan berbasis riset dan inovasi diharapkan dapat menyediakan data yang relevan untuk membentuk keputusan pembangunan yang lebih efektif. Pemerintah Kota Parepare melalui Bappeda berperan penting dalam mengelola riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah, seperti mengatasi masalah transportasi, pengelolaan air, hingga solusi pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan utama. Penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam perencanaan pembangunan Kota Parepare diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, riset dan inovasi di Kota Parepare harus selaras dengan kebijakan pembangunan, menciptakan solusi praktis bagi berbagai permasalahan perkotaan seperti transportasi, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan lingkungan. Melalui kerjasama lintas sektoral, pengembangan infrastruktur yang didasarkan pada bukti ilmiah akan mampu menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan di Kota Parepare.

Kawasan Parepare memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar 11,55 persen yang disumbangkan terbesar oleh PDRB ADHB Kabupaten Pinrang sebesar 3,97 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan di Kawasan Parepare adalah Kota Parepare dengan kontribusi sebesar 1,45 persen. Kawasan Parepare berposisi sebagai Kawasan Strategis Nasional Parepare yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri berbasis inovasi riset dan teknologi dan lumbung pangan yang diarahkan untuk mendukung IKN. Kawasan Parepare memiliki letak geografi yang strategis yaitu dilalui oleh wilayah ALKI II yang terhubung dengan IKN melalui kawasan andalan laut Selat

Makassar. Untuk memanfaatkan potensi tersebut maka dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan serta kereta api terutama untuk angkutan barang.

Kawasan Parepare diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Selat Makassar dan Lumbung Pangan Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Hijau Mendukung IKN. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan Kawasan Parepare diarahkan pada prioritas berikut.

Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing SDM serta pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Enrekang.

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan kawasan sentra industri berbasis komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan kehutanan yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi di Kabupaten Enrekang, Sidenreng Rappang dan Barru; pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap di Kabupaten Pinrang dan Barru untuk mendukung IKN; pengembangan ekonomi hijau terutama pengembangan kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan.

Ketiga, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler dan berkelanjutan serta penguatan kawasan konservasi pesisir di kabupaten Barru termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan terutama di Kabupaten Sidrap.

Keempat, pengembangan sarana dan prasarana pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah di Kota Parepare; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan Parepare serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) serta Tempat Pengelolaan Sampah 3R berbasis regional.

Kelima, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi dan dampak perubahan iklim serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.

4.2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah

Pengembangan kelembagaan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Parepare menjadi fondasi penting dalam mendukung digitalisasi layanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset serta inovasi di Kota Parepare. Digitalisasi seluruh aspek layanan publik akan mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data yang dapat digunakan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan infrastruktur kelembagaan yang kuat dan berbasis teknologi, riset serta inovasi di Kota Parepare dapat berkembang lebih pesat, menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan lokal, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Digitalisasi juga memungkinkan penyebaran hasil riset dan inovasi secara lebih efektif, mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berbasis data, serta memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di era digital.

Ekosistem riset dan inovasi di daerah tumbuh berdasarkan kapasitas kelembagaan dan daya dukungnya. Kelembagaan dan daya dukung yang dimaksud adalah sistem dan mekanisme interaksi organisasi dengan lingkungannya yang diatur melalui tata aturan yang mengikat untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan riset dan inovasi di daerah. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi daerah ditentukan oleh dua indikator antara lain adalah penguatan kolaborasi riset dan inovasi dan penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi.

No	Indikator	Target	Kondisi Riil
1	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	- Terwujudnya kolaborasi tata kelola riset dan inovasi daerah antara BAPPEDA dengan pemangku kepentingan	- Tercapai, dengan perlu adanya peningkatan peran dan keterlibatan pemangku kepentingan riset dan inovasi
2	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	- Tersedia sarana pendukung riset dan inovasi di daerah antara lain perpustakaan, ruang baca, pusat studi, jaringan internet, dan teknologi informasi.	- Tersedia, dengan perlu adanya peningkatan sarana pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi.

Kolaborasi riset dan inovasi di Kota Parepare telah terlaksana dengan baik yaitu melibatkan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi ini dilaksanakan pada program kegiatan kajian, riset dan inovasi melalui kompetisi INOTEK (Inovasi dan Teknologi). Pada kolaborasi kajian, perangkat daerah dilibatkan pada tahap pembahasan dokumen sejak laporan pendahuluan, laporan antara, hingga laporan akhir. Akan tetapi, kolaborasi ini akan lebih baik jika kolaborasi bisa dilaksanakan lebih intensif misalnya pada tahap pelaksanaan kajian sehingga hasil kajian lebih implementatif dan teknis. Selanjutnya, sebagai sarana penunjang, keberadaan perpustakaan, ruang baca, pusat studi, dan teknologi informasi juga mampu mendorong ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik. Perpustakaan dan ruang baca telah menjadi kebutuhan dasar pendidikan yang berhasil diadakan oleh Pemerintah Kota Parepare. Hanya saja, sarana pendukung pusat studi dan teknologi informasi yang belum tersedia dengan baik. Tentunya, hal ini selaras dengan potensi dan target sasaran pembangunan daerah Kota Parepare.

4.3. Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah

Ekosistem riset dan inovasi di daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat daerah yang solid dan harmonis. BAPPEDA sebagai penyelenggara pusat riset dan inovasi di daerah butuh bermitra dengan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil riset dan inovasi. Dalam elemen kemitraan ini, ada 3 indikator kunci dalam menciptakan kemitraan riset dan inovasi daerah yang solid dan harmonis, yaitu kemitraan antarkelembagaan, difusi inovasi, dan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi.

No	Indikator	Target	Kondisi Riil
1	Penguatan kemitraan antarlembaga	- Terselenggara kerjasama antara lembaga riset daerah, dan Lembaga profesional lainnya - OPD terkait,	- Terselenggara, dengan perlu peningkatan intensitas terutama dengan OPD terkait untuk pelaksanaan dan implementasi hasil riset dan inovasi
2	Peningkatan difusi inovasi	- Terwujud perkembangan dan penyebaran isu dan atensi terhadap pengembangan inovasi di daerah	- Terwujud, belum merata
3	Peningkatan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi	- Terpublikasi hasil riset dan inovasi kepada OPD terkait dan masyarakat umum - Terimplementasi kebijakan	- Terpublikasi melalui SIDA tapi terbatas pada abstrak dan simpulan hasil (update hasil 2

No	Indikator	Target	Kondisi Riil
	kepada pelaku inovasi	publik berbasis hasil riset dan inovasi	tahun lalu) - Terimplementasi sebagian

Aktivitas riset dan inovasi di Kota Parepare telah berjalan dengan baik. Kemitraan BAPPEDA Kota Parepare dengan perangkat daerah berlansung sejak penyampaian usulan tema kajian, riset, dan inovasi. Sebagian usulan telah terlaksana sesuai dengan prioritas, arah kebijakan, dan isu strategis pemerintah daerah. Hal lain yang menentukan adalah prioritas kegiatan sesuai kapasitas anggaran yang dikelola. Catatan penting lainnya adalah perlu adanya peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi daerah yang telah diciptakan. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa sebagian hasil riset dan inovasi tidak diimplementasikan oleh perangkat daerah sebagai pengguna hasil riset dan inovasi. Kemudian, ini pula yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik berbasis hasil riset yang belum optimal di Kota Parepare. Masalah-masalah yang muncul dari belum optimalnya implementasi hasil riset dan inovasi di Kota Parepare adalah keterputusan komunikasi antar perangkat daerah, pemahaman perangkat daerah yang belum komprehensif, dan monitoring evaluasi atas implementasi hasil riset dan inovasi daerah.

Kemitraan riset juga diukur berdasarkan penyebaran isu dan atensi terhadap inovasi dan riset strategis daerah (difusi inovasi dan riset). BAPPEDA Kota Parepare telah melakukan difusi inovasi dan riset melalui berbagai kegiatan kompetisi, pameran, publikasi lainnya. Hanya saja, difusi ini belum mengarah pada isu strategis yang spesifik sedang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Parepare. Diseminasi hasil riset juga telah dilakukan dengan mempublikasikan hasil riset dan inovasi di SIDA BAPPEDA Kota Parepare meskipun terbatas pada judul, abstrak, dan sebagian deskripsi. Kedepan, hal ini perlu dipublikasikan lebih terbuka untuk dapat diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat. Selain itu, publikasi hasil riset dan inovasi melalui jurnal milik BAPPEDA Kota Parepare juga perlu perbaikan terutama pada konsistensi penerbitan dan perluasan kontributor jurnal.

4.4. Budaya Riset dan Inovasi di Daerah

Budaya riset dan inovasi di daerah memegang peran penting untuk menciptakan keberlanjutan riset dan inovasi di daerah. Budaya ini memastikan pola perilaku dan nilai yang dianut dalam konteks ekosistem riset dan inovasi di daerah terus berlansung dan

berkembang. Sebagaimana definisi budaya sebagai nilai yang dilimpahkan turun temurun, budaya riset dan inovasi di daerah juga diharapkan mampu membangun nilai ekosistem riset dan inovasi di daerah yang tersebar di masyarakat dan dilimpahkan turun temurun. Oleh karena itu, indikator dari elemen ini antara lain promosi dan kampanye inovasi, apresiasi prestasi inovasi, pengembangan perusahaan pemula berbasis riset, dan inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi di masyarakat.

Pembentukan budaya riset dan inovasi di daerah dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme. Salah satunya dengan promosi dan kampanye riset dan inovasi di daerah. Promosi dan kampanye ini bertujuan untuk menciptakan partisipasi dan perilaku untuk mengembangkan riset dan inovasi di daerah. BAPPEDA Kota Parepare telah melakukan promosi dan kampanye melalui program kompetisi INOTEK, pameran inovasi, dan diseminasi hasil riset dan inovasi. Ini pun dilakukan meluas bagi perangkat daerah dan masyarakat umum, dan berjenjang dari masyarakat umum dan pelajar di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Ini diharapkan mampu mendorong budaya riset dan inovasi di daerah yang terus tumbuh dan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, apresiasi terhadap prestasi para inovator juga dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kapasitas anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

No	Indikator	Target	Kondisi Riil
1	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggara promosi dan kampanye inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dan - Terselenggara melalui kegiatan INOTEK, pameran inovasi, dan masyarakat Kota Parepare 	Terselenggara melalui kegiatan INOTEK, pameran inovasi, dan diseminasi hasil riset dan inovasi
2	Apresiasi prestasi inovasi	- Terselenggara kegiatan kompetisi dan apresiasi hasil inovasi Perangkat Daerah dan masyarakat Kota Parepare	Terselenggara melalui kegiatan INOTEK, pameran inovasi, dan diseminasi hasil riset dan inovasi
3	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	- Terlaksana upaya inisiasi dan peran serta pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan perusahaan berbasis riset	Belum terlaksana
4	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Terinventarisasi data - karya pengetahuan dan teknologi masyarakat	<p>Terinventaris data dengan baik</p> <p>Terealisasi</p>

No	Indikator	Target	Kondisi Riil
		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kegiatan untuk - mendorong pengembangan pengetahuan dan teknologi masyarakat - Terdapat kegiatan untuk melindungi hasil pengetahuan dan teknologi masyarakat 	Belum terealisasi

Dalam rangka menguatkan budaya riset dan inovasi, keberadaan berbagai institusi riset dan inovasi yang lebih beragam dapat meningkatkan kualitas ekosistem riset dan inovasi. Saat ini, perkembangan perusahaan pemula berbasis riset tengah mendapat atensi dan animo yang besar di masyarakat. Pemerintah daerah dapat mendorong penciptaan dan pengembangan perusahaan pemula berbasis riset dengan membangun kemistraan yang lebih dinamis. Perusahaan pemula berbasis riset ini terutama jika berada di daerah tentunya kebijakan ini harus didasarkan pada potensi dan kapasitas pemerintah daerah. Terakhir, inventarisasi data karya pengetahuan dan teknologi masyarakat yang telah terealisasi perlu dipertahankan secara berkelanjutan. Hal lain yang urgen untuk ditambahkan dan ditingkatkan adalah perlindungan terhadap hasil pengetahuan dan teknologi masyarakat. Sebagaimana dibahas di beberapa bagian sebelumnya, pengetahuan dan teknologi masyarakat termasuk hasil riset dan inovasi perlu perlindungan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak pate, hak merek, dan sebagainya. Ini menjamin hasil riset dan inovasi dapat digunakan secara jangka panjang. Selain itu, ini juga menjamin hak karya bagi para pencipta dan inovator yang telah berkarya sebagai bentuk apresiasi yang terbaik.

4.5. Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Konsep Smart City Kreatif umumnya mengacu pada sebuah kota yang memprioritaskan dan mendorong inovasi, kreativitas, dan kemajuan ilmiah sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam visi ini, kota-kota tersebut berperan sebagai pusat yang menginspirasi, mendukung, dan memberdayakan para pemikir, peneliti, dan pengusaha untuk menciptakan solusi-solusi baru yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Kota-kota yang mengadopsi konsep ini seringkali berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga ilmiah, universitas,

industri kreatif, dan bisnis. Mereka menciptakan ruang-ruang kolaboratif, inkubator, dan pusat inovasi untuk memfasilitasi pertukaran ide, penelitian bersama, dan pengembangan produk atau layanan yang inovatif.

Pengembangan Kota Parepare sebagai Smart City Kreatif didukung dengan adanya berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang mewadahi dan menunjang perkembangan sains. Langkah ini memastikan adanya akses terhadap pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan penemuan baru.

Selanjutnya, dalam bidang kreativitas, Kota Parepare diunggulkan dengan berbagai potensi yang sudah ada. Selama beberapa tahun terakhir, Kota Parepare telah menunjukkan potensi ekonomi kreatif yang cukup besar, terutama pada subsektor kuliner, kriya, dan fesyen. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekonomi kreatif.

Kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan memanfaatkan platform digital, media sosial, dan teknologi informasi lainnya, mereka dapat meningkatkan visibilitas produk dan layanan mereka serta memperluas jangkauan pasar.

Dengan demikian, ekonomi kreatif Kota Parepare diarahkan untuk terus memegang prinsip kerkeadilan dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera, pelayanan publik yang modern, serta sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dicapai melalui dukungan dan kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian di Kota Parepare. Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, Kota Parepare dapat menjadi pusat inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal dan menyumbang pada pembangunan yang berkelanjutan secara nasional.

Dalam melanjutkan upaya untuk mengembangkan Kota Parepare sebagai Kota Smart City. Dengan adanya Konsep smart city membuat layanan e- government dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat. Dengan begitu, ini bisa meningkatkan produktivitas daerah atau daya saing ekonomi. Smart city juga membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya. Konsep itu juga menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan. Lingkungan juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang

lebih maju. Manfaat lain konsep smart city berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Smart city akan meningkatkan pelayanan kesehatan. beberapa langkah strategis dapat diambil dalam penerapan smart city:

- a. Penguatan Infrastruktur Riset dan Inovasi: Investasi dalam infrastruktur riset dan inovasi seperti laboratorium modern, pusat inovasi, dan inkubator bisnis akan memfasilitasi kolaborasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri. Hal ini akan mempercepat lahirnya ide-ide baru dan produk inovatif.
- b. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Memperluas akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kota Parepare. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan teknis, manajemen bisnis, dan kewirausahaan.
- c. Pengembangan Ekosistem Kreatif: Mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif dengan menyediakan ruang kerja bersama, galeri seni, pusat pertunjukan, dan pasar kreatif. Hal ini akan memberikan peluang bagi para seniman, desainer, dan pelaku industri kreatif lainnya untuk berkumpul, berkolaborasi, dan memamerkan karya-karya mereka.
- d. Dukungan Kebijakan dan Regulasi: Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual, insentif pajak, dan fasilitasi perizinan usaha. Kebijakan yang progresif dan ramah-inovasi akan mendorong investasi dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
- e. Promosi dan Pemasaran Berbasis Teknologi: Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan dari sektor ekonomi kreatif Kota Parepare ke pasar lokal, nasional, dan internasional. Hal ini akan membuka peluang ekspansi pasar dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha kreatif.
- f. Kolaborasi Antar-sektor dan Pihak-pihak Terkait: Mendorong kolaborasi aktif antara sektor publik, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan ekonomi kreatif Kota Parepare. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat upaya bersama untuk mencapai visi smart city yang berkelanjutan.

4.6. Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global

Ekosistem riset dan inovasi daerah butuh mengakomodir isu internasional yang dapat mempengaruhi kondisi di daerah. Keterkaitan dengan dunia internasional cukup penting untuk dilakukan bukan hanya mengantisipasi kemungkinan krisis dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kerangka pikir riset dan inovasi, ketekaitan dengan isu internasional termasuk mengakomodir metode riset dan inovasi terbaru, seperti perkembangan teknologi dan pendekatan ilmiah lainnya. Elemen penyelarasan dengan perkembangan global perlu dipertimbangkan untuk memberikan perspektif yang beragam dalam melaksanakan riset dan inovasi di daerah.

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Megatren global yang dapat mempengaruhi perkembangan Kota Parepare.

World economic forum global risk report 2024 mengemukakan sejumlah risiko global yang perlu diantisipasi dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Diantara risiko tersebut adalah cuaca ekstrem, perubahan kritikal ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem, krisis SDA, misinformasi dan disinformasi, dampak buruk AI, involuntary migrasi, keamanan cyber, polarisasi sosial dan polusi.

Berdasarkan The Global Risk Report 2023 yang dipublikasikan oleh World Economic Forum, dunia dalam lingkup global akan mendapat risiko yang rentan muncul dalam rentang waktu yang beragam, dari sekarang, tahun depan maupun lima hingga 10 tahun kedepan. Risiko-risiko tersebut dibagi dalam lima aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, geopolitik, sosial, dan teknologi.

4.6.1. Geopolitik dan Geoekonomi Dunia

Dinamika geopolitik global ke depan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan

memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Konflik Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, Timur Tengah dan Laut China Selatan. Konflik ini akan berdampak besar bagi kawasan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Kondisi yang sama dengan mencermati Geoekonomi Global, dimana nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Peran negara maju, khususnya yang masuk G7 akan mengecil. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang, akan tetapi dalam jangka panjang pendapatan per kapita negara-negara berkembang diperkirakan akan terus melejit menyamai negara-negara maju. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara

berkembang. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang, termasuk Indonesia.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Indonesia dituntut untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang tepat, sehingga peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Dalam perspektif itulah, reformasi sosial, reformasi ekonomi dan reformasi tata kelola menjadi keniscayaan untuk Indonesia secara menyeluruh, hingga ke level pemerintahan terendah, agar mampu mengambil peran dalam perkembangan geo ekonomi global. Bila tidak, Indonesia hanya akan menjadi obyek perebutan sumberdaya negara-negara besar di dunia dan tidak akan pernah bisa keluar dari middle income trap.

4.6.2. *Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity (VUCA).*

Gabungan situasi dunia yang menggambarkan suatu keadaan yang mengalami perubahan secara cepat (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), serba kompleks (*complexity*) dan menimbulkan kebingungan/keunikan (*ambiguity*). Kondisi yang menggambarkan lingkungan bisnis yang labil, berubah amat cepat dan terjadi dalam skala besar, sulitnya memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi, tantangan menjadi lebih rumit karena multifaktor yang saling terkait serta ketidakjelasan suatu kejadian dan

mata rantai akibatnya yang membingungkan. Meskipun pada awalnya hal ini diawali dengan kondisi yang dialami oleh dunia bisnis, tetapi dalam perkembangannya justru memberi pengaruh dan dampak yang signifikan pada sektor publik. Bukan hanya pada tuntutan pelayanan publik yang harus disediakan dan diberikan, tetapi juga perspektif kebijakan dan dukungan infrastruktur yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga mampu memberikan jaminan kepastian kepada para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya pada semua lapangan usaha. Situasi VUCA menuntut pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk merumuskan kebijakan dan layanan publik yang menjadi arahan pengembangan kegiatan bisnis dunia usaha dan masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan visi pembangunan diinginkan pada setiap tahapan pembangunan yang dijalankan.

4.6.3. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Pada suatu kondisi terjadi El-Nino, kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. Pada kondisi yang terjadi sebaliknya La-Nina, kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanaman sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan.

Perubahan iklim sangat berdampak di kehidupan masyarakat pada semua daerah, termasuk Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan.

Tingkat risiko bencana di Sulawesi Selatan dengan kelas risiko tinggi adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan resiko tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

Pada bagian akhir ini, ekosistem riset dan inovasi daerah butuh mengakomodir isu internasional yang dapat mempengaruhi kondisi di daerah. Keterkaitan dengan dunia internasional cukup penting untuk dilakukan bukan hanya mengantisipasi kemungkinan krisis dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kerangka pikir riset dan inovasi, ketekaitan dengan isu internasional termasuk mengakomodir metode riset dan inovasi terbaru, seperti perkembangan teknologi dan pendekatan ilmiah lainnya. Elemen penyesuaian dengan perkembangan global perlu dipertimbangkan untuk memberikan perspektif yang beragam dalam melaksanakan riset dan inovasi di daerah.

No	Indikator	Target	Kondisi Riil
1	Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Adaptasi dan penyesuaian isu internasional terhadap kegiatan riset dan inovasi di daerah	Belum terealisasi
2	Penguatan Kerjasama internasional	Terdapat Kerjasama internasional dalam kegiatan riset dan inovasi di daerah	Belum terealisasi

Upaya penyesuaian riset dan inovasi daerah dengan perkembangan global belum dikembangkan secara optimal. Adaptasi isu internasional tampaknya belum menjadi variabel utama dalam penentuan arah kebijakan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Kerjasama internasional juga belum terlaksana karena berbagai kendala akses. Realisasi penyesuaian dengan perkembangan global yang belum tercapai dikarenakan oleh berbagai faktor di daerah. Pertama, kapasitas anggaran yang tidak memungkinkan untuk memperoleh kerjasama internasional. Kedua, kapasitas sumber daya manusia riset dan inovasi di perangkat daerah yang telah kelebihan beban kinerja sehingga tidak memungkinkan untuk mengembangkan jaringan kerjasama internasional. Ketiga, jaringan kerjasama dan kemitraan yang belum meluas hingga internasional. Sebenarnya, jaringan kerjasama dan kemitraan dapat dikembangkan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menjadikan daerah Kota Parepare sebagai obyek riset dan inovasi dalam kerjasama internasional.



BAB 5

Strategi Riset dan Inovasi Daerah

BAB V

STRATEGI RISET DAN INOVASI DAERAH

Strategi riset dan inovasi daerah didasarkan pada kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah. Maka, strategi ini sejalan dengan analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah pada bagian sebelumnya. Selain itu, strategi ini juga mengelaborasi kesenjangan ekosistem riset dan inovasi dengan tantangan dan peluang yang ada. Pada dasarnya, strategi ini berupaya menguatkan, membangun, dan mengembangkan kekurangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Kota Parepare memiliki ekosistem riset dan inovasi daerah yang baik. Kekurangan yang paling besar adalah pada elemen kebijakan dan infrastruktur. Pada bagian ini, kekurangan elemen dan indikator ekosistem riset dan inovasi daerah akan dibahas untuk menjadi strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah di Kota Parepare

Dalam bab ini, dijelaskan bahwa peningkatan kapabilitas riset dan inovasi merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kota Parepare, sebagai salah satu pusat ekonomi dan pendidikan di Jawa Barat, memiliki potensi besar dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi tantangan-tantangan lokal yang kompleks, seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial.

Strategi yang diuraikan dalam bab ini menekankan pada penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor industri. Kerja sama lintas sektor ini dianggap krusial untuk menciptakan ekosistem inovasi yang dinamis, di mana hasil riset dapat diimplementasikan secara efektif dalam kebijakan publik maupun diadopsi oleh sektor industri. Selain itu, kebijakan yang mendukung riset dan inovasi di daerah juga perlu diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peneliti dan inovator lokal agar dapat berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu fokus utama dalam strategi ini adalah pengembangan infrastruktur riset yang memadai, seperti laboratorium penelitian, pusat inovasi, dan fasilitas inkubator bisnis. Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi riset yang lebih produktif dan inovatif, memungkinkan para peneliti untuk melakukan eksperimen dan uji coba teknologi dengan dukungan fasilitas yang lengkap. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital dan platform daring juga menjadi bagian integral dalam memperluas

jangkauan riset dan inovasi, memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi antara para peneliti dan inovator.

Strategi riset dan inovasi di Kota Parepare juga mencakup pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas peneliti dan tenaga ahli di berbagai bidang. Program pelatihan, sertifikasi, dan beasiswa riset diusulkan sebagai bagian dari strategi untuk memastikan bahwa peneliti dan inovator di daerah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan terbaru di dunia riset dan teknologi. Penguatan SDM ini juga akan mendukung upaya daerah dalam menarik minat investor untuk berinvestasi pada sektor-sektor berbasis riset dan inovasi.

Keseluruhan strategi yang dirumuskan dalam bab ini diarahkan untuk menjadikan Kota Parepare sebagai pusat riset dan inovasi yang unggul di tingkat regional. Dengan fokus pada kolaborasi, infrastruktur yang memadai, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia, strategi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Parepare. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

5.1. Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

Elemen kebijakan dan infrastruktur riset serta inovasi di Kota Parepare masih memiliki beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian dan perbaikan, terutama dalam hal infrastruktur riset dan inovasi di daerah. Kekurangan ini bukanlah hal yang unik bagi Kota Parepare, melainkan juga dialami oleh banyak pemerintah daerah lainnya. Pembangunan infrastruktur riset dan inovasi memang memerlukan anggaran yang besar karena mencakup pengembangan fasilitas fisik, seperti laboratorium, pusat penelitian, dan ruang inkubasi bagi pengembangan teknologi serta inovasi. Namun, pengadaan dan pengembangan infrastruktur semacam ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan; perlu ada analisis yang mendalam dan penyesuaian dengan kebutuhan khusus riset dan inovasi di Kota Parepare. Mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya, strategi pengadaan infrastruktur tersebut tidak harus mencakup pengadaan baru secara keseluruhan. Sebaliknya, Kota Parepare perlu menerapkan pendekatan yang lebih cermat dan bijaksana dengan memaksimalkan perekayasaan dan pemanfaatan sumber daya infrastruktur yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk

mengoptimalkan infrastruktur yang ada melalui perbaikan, peningkatan kapasitas, dan penataan ulang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan riset dan inovasi tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Dengan cara ini, keberadaan infrastruktur riset dan inovasi dapat ditingkatkan secara signifikan, sambil tetap menjaga efisiensi anggaran dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Strategi ini tidak hanya akan memperkuat fondasi infrastruktur riset dan inovasi di Kota Parepare, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan dengan cara yang paling efektif untuk mendorong kemajuan riset dan inovasi yang berkelanjutan..

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Reformasi kebijakan riset inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia peraturan daerah dan mengenai pemajuan IPTEK dan Riset Inovasi Daerah - Belum tersedia rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK, riset, dan inovasi daerah terbaru 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penerbitan peraturan daerah mengenai pemajuan IPTEK dan Riset Inovasi di Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan dinamika kinerja antar perangkat daerah - Penyusunan dan penerbitan rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah tahun 2024-2026
2	Penataan basis data riset dan inovasi	Akses terbatas pada basis data riset dan inovasi yang terbuka dan mudah diakses	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka akses diseminasi riset dan inovasi - Melakukan pembaharuan hasil riset dan inovasi daerah
3	Pengembangan infrastruktur dasar riset	Belum tersedia infrastruktur dasar riset meliputi inovasi laboratorium, kebun raya, studio riset dan fasilitas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan laboratorium Kesehatan daerah (Labkesda) - Pengadaan laboratorium dasar untuk riset dan inovasi daerah - Pengadaan studio riset dan/atau pusat kajian - Pengembangan kebun raya di hutan kota Kota Parepare atau taman yang telah dimiliki
4	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum tersedia laboratorium dan/atau inkubator kekayaan intelektual di daerah	Penyediaan laboratorium dan/atau studio hak kekayaan intelektual di daerah dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada di BAPPEDA atau fasilitas kelitbangannya

5.2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah

Kapasitas kelembagaan riset dan inovasi di Kota Parepare sangat bergantung pada kemitraan yang efektif antara BAPPEDA, sebagai penyelenggara utama riset dan inovasi, dengan berbagai perangkat daerah lainnya. Kolaborasi yang kuat antara BAPPEDA dan perangkat daerah ini sangat penting karena memungkinkan sinergi yang lebih baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan menerapkan hasil riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah. Namun, untuk meningkatkan dampak dan relevansi riset serta inovasi yang dilakukan, perlu ada upaya yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi aktif dari perangkat daerah dalam berbagai kegiatan riset yang dikelola oleh BAPPEDA. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan adalah penggunaan model peneliti campuran atau "blended researcher," di mana para ahli dari perangkat daerah dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan proses riset dan inovasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan perspektif yang lebih luas dan mendalam dari berbagai bidang keahlian bisa diperoleh, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas riset dan inovasi menjadi lebih aplikatif dan sesuai dengan konteks lokal.

Selain kolaborasi yang lebih erat, langkah strategis lain yang harus ditempuh adalah meningkatkan penerapan hasil riset dan inovasi di Kota Parepare. Hal ini sangat penting agar hasil riset tidak hanya menjadi dokumen atau laporan ilmiah semata, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, program, atau inisiatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan proses evaluasi dan pengukuran secara berkala terhadap hasil riset yang telah diterapkan maupun yang belum. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil riset telah diimplementasikan, dampak yang dihasilkan, dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini dapat dijadikan bahan masukan yang sangat berharga bagi BAPPEDA dalam merancang perbaikan dan penyesuaian strategi riset dan inovasi di masa mendatang. Dengan demikian, ekosistem riset dan inovasi di Kota Parepare dapat menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah, serta mampu menghasilkan solusi yang tepat guna dan berdampak positif bagi masyarakat.

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	- Terdapat kolaborasi tata kelola riset dan inovasi daerah antara BAPPEDA dengan pemangku kepentingan	- Peningkatan peran dan keterlibatan pemangku kepentingan riset dan inovasi - Peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah - Inisiasi evaluasi capaian implementasi hasil riset dan inovasi di daerah - Pengadaan pelatihan metode riset bagi perangkat daerah
2	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	- Adanya kekurangan sarana pendukung riset dan inovasi terutama pusat studi dan teknologi informasi	- Peningkatan sarana pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi

5.3. Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah

Riset dan inovasi mencakup berbagai aspek yang kompleks dan memerlukan alokasi sumber daya yang besar untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan riset dan inovasi melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, baik yang berasal dari sektor swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat, yang kemudian dikoordinasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Kota Parepare telah memanfaatkan pendekatan kolaboratif ini dengan menjalin kemitraan strategis bersama berbagai pihak, termasuk lembaga riset swasta, institusi akademis, perangkat daerah, dan masyarakat. Namun, untuk memaksimalkan dampak riset dan inovasi, intensitas kemitraan ini perlu ditingkatkan, khususnya dengan perguruan tinggi. Peningkatan ini bisa diwujudkan melalui mekanisme pendanaan eksternal yang lebih efektif, seperti program *Matching Fund* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) serta platform Kedaireka yang mempertemukan inovator dengan mitra potensial. Selain itu, penguatan kemitraan juga perlu difokuskan pada upaya implementasi hasil riset dan inovasi, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Parepare perlu merumuskan kebijakan yang lebih banyak didasarkan pada hasil riset dan inovasi untuk memastikan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

Dalam hal penyebaran inovasi dan diseminasi hasil riset, peran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) sangat penting sebagai pengelola data dan hasil riset di Kota Parepare. BAPPEDA perlu membuka akses terhadap data dan hasil riset yang telah dihasilkan, sehingga perangkat daerah serta masyarakat umum dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk berbagai keperluan. Dengan akses yang lebih terbuka, perangkat daerah bisa menggunakan dokumen-dokumen hasil riset ini untuk menyusun kebijakan yang lebih berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dari akses tersebut, terutama dalam mengembangkan budaya riset dan inovasi. Akses yang lebih luas terhadap literatur dan hasil riset yang dipublikasikan oleh BAPPEDA akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengedukasi diri dan terlibat aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak kolaborasi dan inovasi di tingkat lokal.

Mekanisme kolaborasi ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan riset dan inovasi di Kota Parepare. Dalam konteks ini, perguruan tinggi dan lembaga penelitian swasta tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan pengetahuan tetapi juga sebagai mitra strategis yang dapat berkontribusi dalam pendanaan dan penerapan hasil riset. Dengan mengoptimalkan kemitraan ini, hasil riset dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang lebih efektif serta menghasilkan inovasi yang memiliki dampak nyata di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Parepare untuk terus mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam siklus riset dan inovasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan penerapan.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat perangkat daerah maupun di lembaga riset yang terlibat. Perangkat daerah perlu dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan riset dan inovasi, baik sebagai penyelenggara, mitra, atau pengguna akhir. Pendekatan ini akan memperkaya perspektif dan meningkatkan relevansi riset dengan kebutuhan lokal, sehingga hasilnya lebih mudah diimplementasikan dan berdampak positif. Di sisi lain, lembaga riset dan inovasi perlu terus meningkatkan kualitas dan relevansi riset yang dihasilkan, termasuk melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.

Dengan upaya bersama ini, Kota Parepare diharapkan dapat menjadi model bagi

kota-kota lain dalam pengembangan riset dan inovasi berbasis kolaborasi. Hal ini akan memperkuat posisi Kota Parepare sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat regional dan nasional. Selain itu, dengan meningkatnya kualitas riset dan inovasi, Kota Parepare juga dapat lebih siap menghadapi tantangan-tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan sosial, dengan solusi yang berbasis data dan pengetahuan.

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggara Kerjasama antara Lembaga riset daerah, OPD terkait, dan Lembaga riset professional lainnya - Kurangnya intensitas kemitraan BAPPEDA dengan perangkat daerah terkait untuk dan implementasi hasil riset dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kerjasama riset dan inovasi dengan Lembaga riset dan perguruan tinggi untuk meningkatkan pendanaan dan kegiatan riset dan inovasi eksternal - Peningkatan peran dan keterlibatan pemangku kepentingan riset dan inovasi - Peningkatan pelaksanaan implementasi hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah - Inisiasi evaluasi capaian implementasi hasil riset dan inovasi di daerah
2	Peningkatan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum merata perkembangan dan penyebaran informasi dan atensi terhadap pengembangan inovasi di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kebutuhan inovasi di daerah - Penyebaran informasi rencana inovasi prioritas di daerah
3	Peningkatan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi hasil riset dan inovasi yang terbatas - Belum optimal implementasi kebijakan publik berbasis hasil riset dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi terbuka diseminasi hasil riset dan inovasi melalui SIDa Kota Parepare sehingga dapat diakses secara luas oleh perangkat daerah dan masyarakat - Peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi melalui evaluasi dan monitoring penggunaan hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah

5.4. Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah

Budaya merupakan elemen penting dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan ekosistem riset dan inovasi di suatu daerah. Sebuah masyarakat yang memiliki budaya yang terbuka dan progresif terhadap ilmu pengetahuan cenderung lebih

mendukung keberlanjutan riset dan inovasi, sehingga memastikan bahwa kegiatan-kegiatan inovatif ini dapat terus berjalan dan berkembang. Ketika masyarakat memiliki apresiasi yang tinggi terhadap riset dan inovasi, partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi juga akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat ekosistem tersebut. Dengan demikian, membangun dan memupuk budaya riset dan inovasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan di tingkat lokal. Kota Parepare, misalnya, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong terciptanya budaya riset dan inovasi ini melalui beragam inisiatif, seperti mengadakan kompetisi inovasi, menggelar penelitian kolaboratif, serta menyelenggarakan pameran dan festival inovasi. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan potensi inovasi di daerah, tetapi juga untuk mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam proses riset, sehingga tercipta ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini perlu terus ditingkatkan agar riset dan inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kota Parepare.

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Promosi dan kampanye inovasi	- Sudah ada kegiatan promosi dan kampanye inovasi di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kota Parepare.	- Perluasan dan penguatan promosi melalui artikel media dan website pemerintah.
2	Apresiasi prestasi inovasi	- Telah diselenggarakan kompetisi apresiasi hasil inovasi di tingkat perangkat daerah dan masyarakat.	- Peningkatan apresiasi hasil inovasi dengan publikasi dan penghargaan.
3	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Terdapat data pengetahuan dan teknologi yang terinventarisasi. - Ada kegiatan untuk mendorong pengembangan pengetahuan dan teknologi masyarakat. - Terdapat kegiatan untuk melindungi pengetahuan teknologi masyarakat	- Peningkatan keterbukaan akses hasil riset dan inovasi di daerah. - Penguatan keterpaduan kegiatan INOTEK dengan kebijakan pemerintah dan arah kebijakan riset serta inovasi daerah. - Inisiasi studio hak kekayaan intelektual dan layanan hasil pendaftaran paten, merk dan hak cipta dan HAKI lainnya

5.5. Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Kegiatan riset dan inovasi yang efektif adalah kegiatan yang disesuaikan dengan potensi lokal, produk unggulan, serta tantangan dan permasalahan spesifik yang dihadapi daerah. Penelitian dan inovasi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan kondisi aktual daerah cenderung menghasilkan solusi yang lebih relevan dan tepat sasaran. Riset yang terarah ini tidak hanya mendukung penyelesaian masalah lokal tetapi juga meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan produk dan layanan yang unik. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah, termasuk Kota Parepare, untuk memastikan bahwa agenda riset dan inovasi yang dijalankan sejalan dengan keunggulan dan kebutuhan lokal, agar hasilnya benar-benar bermanfaat dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Dalam konteks Kota Parepare, memperkuat keterpaduan antara riset dan inovasi dengan strategi pembangunan daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan dampak dari upaya-upaya tersebut. Pemerintah Kota Parepare perlu memfokuskan pengembangan riset dan inovasi yang relevan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan pendek, termasuk dalam hal penyusunan kebijakan. Dengan mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam kebijakan pembangunan, Kota Parepare dapat memaksimalkan potensi ilmiah dan teknologinya untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Hal ini akan memastikan bahwa inisiatif pembangunan yang dilaksanakan benar-benar didasarkan pada data yang valid dan hasil riset yang telah teruji, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat guna dan berkelanjutan.

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan di daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	- Terdapat konsepsi untuk menyelaraskan kegiatan pengembangan riset dan inovasi dengan kebutuhan dan/atau permasalahan di daerah	- Penyelarasan tema dan arah riset dan inovasi dengan kegiatan riset inovasi di BAPPEDA salah satunya kegiatan INOTEK untuk perangkat daerah dan masyarakat. Tema dan arah riset dan inovasi harus sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Parepare
2	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	- Belum terdapat peta produk unggulan di Kota Parepare, teralisasi hanya peta	- Analisis dan pemetaan produk unggulan daerah sebagai arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah - Inisiasi dan pengembangan riset

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
		potensi dan investasi. - Belum terselenggara kegiatan riset dan inovasi berbasis produk unggulan daerah	dan inovasi dengan menindak lanjuti analisis dan peta produk unggulan daerah - Inisiasi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah
3	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	- Terdapat kesesuaian dan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	- Sudah baik

5.6. Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global

Riset dan inovasi di tingkat daerah perlu mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, terutama yang berkembang di tingkat global. Inovasi dan pengembangan pengetahuan di negara-negara maju sering kali lebih dahulu muncul, membawa tren dan temuan baru yang bisa menjadi referensi atau acuan. Oleh karena itu, sangat penting bagi daerah, seperti Kota Parepare, untuk mengikuti dan belajar dari perkembangan global ini agar tidak tertinggal. Dalam konteks ini, BAPPEDA berperan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan riset dan inovasi di daerah mencakup elemen kebaruan yang bersumber dari perkembangan internasional. Mengintegrasikan perspektif global ini akan membantu memperkaya hasil riset dan inovasi daerah sehingga menjadi lebih relevan dan kompetitif.

Sebagai bagian dari upaya ini, BAPPEDA dapat memasukkan persyaratan khusus yang mencerminkan aspek-aspek kebaruan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar negeri ke dalam berbagai program dan kegiatan riset serta inovasi yang dilaksanakan. Ini dapat dilakukan, misalnya, dalam kegiatan INOTEK atau proyek riset dan inovasi lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kegiatan riset dan inovasi di Kota Parepare dapat mendorong kolaborasi internasional, meningkatkan kualitas penelitian, dan menghasilkan inovasi yang tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Hal ini akan memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tetap up-to-date dengan tren global, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Parepare.

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	- Adaptasi dan penyesuaian isu internasional terhadap kegiatan riset dan inovasi di daerah	- Penyesuaian secara proporsional tema dan arah riset dan inovasi Kota Parepare dengan isu internasional - Mengintegrasikan literatur, teori, konsep, dan inovasi internasional terbaru dalam setiap agenda riset dan inovasi di Kota Parepare

5.7. Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Ekosistem riset dan inovasi di Kota Parepare telah dianalisis secara komprehensif sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mencakup enam elemen utama yang menjadi landasan ekosistem tersebut. Analisis ini mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem riset dan inovasi di tingkat daerah. Namun, untuk mencapai efektivitas kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran yang optimal, perlu ditetapkan strategi prioritas dalam pengembangan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi di Kota Parepare. Strategi-strategi prioritas ini berfungsi sebagai peta jalan yang jelas dan terstruktur, yang akan memandu arah pengembangan riset dan inovasi, sehingga menghasilkan perencanaan dan kebijakan yang lebih berbasis bukti ilmiah. Dengan adanya fokus yang lebih tajam pada strategi prioritas, diharapkan kegiatan riset dan inovasi di Kota Parepare akan menjadi lebih terarah dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Selain itu, strategi prioritas pengembangan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi ini juga dirancang dengan menetapkan target-target pelaksanaan yang bersifat tahunan, yang menjadi acuan bagi BAPPEDA Kota Parepare dalam mengimplementasikan penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi. Penetapan indikator kinerja dan keterlibatan berbagai perangkat daerah terkait juga menjadi bagian integral dari strategi ini, guna memastikan terciptanya sinergi yang kuat antar perangkat daerah dalam mendukung penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi. Strategi ini mencakup penetapan target dan indikator capaian yang jelas dan terukur, yang memungkinkan proses evaluasi dan upaya pencapaian target dilakukan secara lebih pasti dan optimal. Dengan demikian, strategi prioritas ini tidak hanya memberikan arah yang jelas tetapi juga memastikan bahwa hasil yang dicapai dapat diukur dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

No	Rencana Strategis	Kebijakan	Tema Riset dan Output Untuk Kebijakan				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatkan Daya saing sumber daya manusia	Pendidikan	Pemenuhan wajib belajar 12 tahun	Akselerasi kurikulum pendidikan berbasis IT untuk peningkatan literasi	Penguatan kapasitas tenaga pendidik yang moderen dan adaptif	Pengembangan kurikulum berbasis sains kreatif dan berorientasi pada design thinking	Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dan ekosistem pendidikan
		Kemaslahatan kerukunan beragama dan kebudayaan	Penyusunan peta jalan kemaslahatan dan budaya	Implementasi kebijakan sebagai suport system keberagaman	Penguatan kapasitas jejaring oragnisasi budaya dan agama	Penyusunan rood map kajian kemaslahatan	Mlakukan evaluasi luaran dan keberlanjutan
		Daya saing ketenagakerjaan	Peningkatan kapasitas dan lapangan pekerjaan	Memperkuat jejaring sekolah menengah kejuruan dengan DUDI	Pengembangan pelatihan kerja mendukung "remote working" dan bahasa	Pengembangan kawasan strategis kota yang mendorong pembangunan ekonomi kreatif	Melaksanakan monitoring dan pengawasan serta pengembangan kebijakan
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial	Peningkatan perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan	Penataan regulasi dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar	Peningkatan keterampilan dan produktivitas masyarakat	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif	Monitoring dan evaluasi keanggotaan BPJS ketenagakerjaan khususnya bagi kelompok marginal
		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan mental	Peningkatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif	Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan

No	Rencana Strategis	Kebijakan	Tema Riset dan Output Untuk Kebijakan				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Peningkatan Pendapatan perkapita	Penguatan struktur penunjang ekonomi sektor strategis	Harmonisasi regulasi investasi ekonomi kreatif	Peningkatan produktivitas di berbagai sektor perekonomian melalui investasi di bidang teknologi,	Peningkatan peran science technopark IPB dalam industri kreatif	Penguatan kualitas produk berorientasi ekspor	Meningkatkan produktifitas global dalam sektor strategis
		Peningkatan produktivitas perekonomian daerah	Persiapan regulasi penbunjang produktivitas sektor ekonomi	Pembangunan inkubator bisnis industri kreatif	Penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Peningkatan diversifikasi bisnis BUMD	Monitoring dan pengawasan luaran dari produktivitas unggulan daerah
4	Peningkatan Daya Saing	Peningkatan jaringan kolaborasi dan kerjasama	Melakukan pemetaan dan pengkajian berbagai regulasi secara vertikal dan horizontal	Akseleras kolaboratif, dan sinergi antar lembaga dan masyarakat	Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat	Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif,	Evaluasi dan monitoring kebijakan yang sudah berlangsung
		Mewujudkan infrastruktur yang handal dan terintegasi	Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman	Peningkatan pemenuhan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri sains kreatif yang andal	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, mewujudkan taraf global (global city)
		Peningkatan kualitas layanan publik	Pembuatan perencanaan dan regulasi dalam mempercepat inovasi daerah	Optimalisasi kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart government	Revaluasi, penataan dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah	Penyusunan roadmap Sains kreatif	Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau yang berkelanjutan khususnya sistem angkutan umum

No	Rencana Strategis	Kebijakan	Tema Riset dan Output Untuk Kebijakan				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Pelestarian lingkungan berkelanjutan	Pemanfaatan energi terbarukan	Perumusan kebijakan secara intensif khususnya private sektor	Pemanfaatan teknologi yang digunakan pada sarana prasarana	Peningkatan dan pengawasan serta menjalin kerjasama kemitraan	Penerapan pengadaan hijau (green procurement)	Penetapan kebijakan yang mendukung implementasi circular economy
		Resiliansi terhadap perubahan iklim	Melakukan sosialisasi terkait kebijakan penunjang keberlanjutan ekosistem pelestarian lingkungan	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Menambah jejaring kemitraan baik NGO atau mitra instansi pelestarian lingkungan	Pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Inisiasi kerjasama pengelolaan sampah untuk mendukung ekonomi sirkuler



BAB 6

Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah

BAB VI

PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan kebijakan pembangunan yang berkualitas, yang harus didasarkan pada data hasil riset dan inovasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Parepare dihadapkan pada tantangan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkualitas, yakni kebijakan yang aplikatif dan berbasis bukti (*evidence*) terbaru, relevan, representatif, dan valid. Riset dan inovasi perlu dilakukan untuk menyediakan dasar ilmiah yang kuat dalam mengatasi masalah pembangunan, sehingga kebijakan yang diterapkan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Riset dan inovasi idealnya harus selaras dengan isu strategis dan target utama dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dengan data yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis ilmu pengetahuan dan bukti (*science and evidence*). Di Kota Parepare, riset dan inovasi diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan berbasis riset, dengan fokus pada menciptakan inovasi yang berdampak, serta meningkatkan manfaat riset bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, sistem penyebaran inovasi dan hasil riset terus dikembangkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di perangkat daerah.

Hasil riset dan inovasi, yang didasarkan pada data masyarakat, analisis yang mendalam, dan pengembangan inovasi, mendukung Pemerintah Kota Parepare dalam menentukan arah pembangunan di masa depan (*delivery mechanism*). Dalam proses ini, partisipasi masyarakat juga diutamakan dalam pelaksanaan riset dan inovasi, sehingga budaya riset dan inovasi dapat terus tumbuh di Kota Parepare. BAPPEDA Kota Parepare, sebagai pengelola riset dan inovasi, dapat berperan memberikan masukan yang relevan untuk mendukung target kebijakan pemerintah, bekerja sama dengan perangkat daerah dan mitra lainnya dalam pelaksanaan riset. Tujuannya adalah menciptakan kebijakan yang berbasis bukti dan pengetahuan (*evidence and knowledge-based policy*) guna mencapai target pembangunan di Kota Parepare.

6.1. Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Parepare Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah

No	Isu Strategis	Permasalahan Utama Daerah	Tema Riset					Tujuan	OPD yang Terlibat
			2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Penguatan SDM Dan Kesejahteraan Sosial	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Evaluasi Capaian Program Kesehatan Masyarakat (Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif)	Evaluasi Keterjangkauan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Studi Penerapan Standar Pelayanan Minimum Di Kota Parepare	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas	Strategi pengendalian Angka kematian Ibu dan Bayi	Meningkatnya Indeks Kesehatan Masyarakat Yang Optimal	Dinas Kesehatan
		Rendahnya kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan masyarakat	Evaluasi Capaian Program Pendidikan Kota Parepare	Mewujudkan kompetensi guru dalam mendukung program Pendidikan yang berkualitas	Menyongsong Indonesia Emas melalui Penyiapan SDM dan pemenuhan infrastruktur Pendidikan yang berkualitas	Efektivitas pemberian bantuan pendidikan bagi Anak Putus Sekolah	Penanganan anak putus sekolah di Kota Parepare	Meningkatkan capaian indeks Pendidikan di Kota Parepare	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum optimalnya layanan perlindungan	Evaluasi cakupan kepesertaan jaminan sosial	Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk peningkatan	Model Pemberian Bantuan Sosial yang Akuntabel	Penanganan Kemiskinan melalui penyiapan	Membangun kemandirian Masyarakat yang berdaya saing	Menurunnya angka kemiskinan ekstrem menjadi Zero	Bagian Kesejahteraan

		sosial yang adaptif		jaminan ketenagakerjaan		kompetensi masyarakat			Dinas Tenaga Kerja Dinas Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum optimalnya kualitas ketahanan keluarga	Peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga	Sinergitas program ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas	Kolaborasi antar stakeholder dalam mewujudkan ketahanan keluarga	Model Inovasi Ketahanan Keluarga yang mandiri dan inovatif	Optimalisasi Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Ketahanan Keluarga	Peningkatan Kualitas ketahanan keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Belum Optimalnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Evaluasi Tindakan kekerasan Anak berdasarkan dampak dan penyebab	Optimalisasi Edukasi Kekerasan anak dalam lingkup Domestik	Strategi pedampingan kasus kekerasan anak	Peran Bimbingan dan Pengawasan menuju Kota Layak Anak	Penggunaan Layanan Pengaduan yang adaptif dan sesuai kebutuhan Masyarakat	Terselenggaranya pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai hukum yang berlaku	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
		Lambatnya Penurunan	Sistem edukasi Masyarakat	Kesetaraan akses	Persepsi budaya	Urgensi penurunan	Sinergitas Stakeholder	Peningkatan pemahaman	Dinas Pemberday

		Ketimpangan Gender dan Implementasi Inklusi Sosial	terkait penanganan gender	perempuan dan kelompok rentan dalam memperoleh peluang pekerjaan	patriarki di Kota Parepare	ketimpangan gender	dalam menurunkan angka ketimpangan gender	gender di kalangan Masyarakat Parepare	aan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Penguatan Infrastruktur, Kewilayahan, Lingkungan Hidup, Ekonomi berkelanjutan	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestic dan global	Evaluasi Pusat-Pusat Pertumbuhan di Lingkup Kota Parepare	Penataan infrastruktur konektivitas antar Daerah dalam mobilisasi pertukaran produk	Strategi peningkatan ekspor barang dan jasa	Identifikasi kebutuhan pasar International terhadap ketersediaan produk lokal	Skema Kerjasama antar daerah dalam penyediaan kuantitas produk	Penataan pertumbuhan serta pemenuhan infrastruktur dan tumbuhnya ekonomi secara merata	Dinas Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan; Bagian Ekonomi Bagian Organisasi	
	Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas	Penyiapan Masyarakat dalam mendukung Kawasan konservasi	Penanganan Pengelolaan Sampah yang terencana dan terpadu	Penyediaan sanitasi air bersih melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan	Sinergitas penanganan sampah secara terpadu dan terintegasi	Prilaku Pola hidup sehat Masyarakat Kota Parepare	Meningkatkan layanan hidup berkualitas dan Tingkat kesadaran Masyarakat yang tinggi dalam menjaga lingkungan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan	Analisa ketersediaan pangan dalam mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat	Penyiapan petani milenia di sektor pangan	Sistem Kedaulatan pangan yang berkelanjutan	Uji Kualitas air bersih sebagai syarat pengendalian lingkungan	Pengolahan sumber daya alam melalui diversifikasi pangan lokal	Meningkatkan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan menuju Lingkungan	Dinas Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan Bagian ekonomi	

		kemandirian pangan						yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam pembangunan	Pengembangan potensi unggulan berbasis lahan berkelanjutan	Strategi alih fungsi lahan yang optimal dan berdampak	Pelestarian Kawasan lindung dan Kawasan kritis	Pemanfaatan lahan potensial yang berdaya guna dan berhasil	Penggunaan rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim	Dampak perubahan iklim terhadap Pembangunan Kota Parepare	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bagian Pembangunan
		Belum optimalnya moderasi beragama dan pemajuan budaya	Pola Pendidikan moderasi beragama	Penguatan nilai-nilai budaya Kota Parepare sektor pendidikan	Penguatan Keluarga dalam melestarikan nilai budaya lokal	Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Sinergitas Pemerintah daerah dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Peningkatan toleransi Masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan budaya	Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Masih rendahnya peran perkotaan sebagai pusat	Evaluasi Layanan Publik Kota Parepare berbasis inklusiv	Perencanaan Kota sebagai daerah layak huni dan berkelanjutan	Peningkatan peran perkotaan sebagai Kawasan bisnis	Sinkronisasi pola Pembangunan perkotaan sesuai dengan	Modernisasi Perkotaan menjadi penyangga IKN	Mewujudkan Kota sebagai Pusat Pertumbuhan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		pertumbuhan ekonomi				Layout Tata Ruang			Dinas Perdagangan Bagian Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup
		Kurang stabilnya kondisi ekonomi makro dan randahnya kapasitas fiskal daerah	Optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	Identifikasi ekonomi pada asset daerah baik peruntukkan ataupun sewa	Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah	Pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD)	Strategi meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan	Peningkatan kapasitas fiscal melalui pemanfaatan potensi daerah	Badan Keuangan Daerah Bagian Organisasi
		Belum optimalnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan	Pncapaian tingkat intensitas emisi menjadi Zero emission	Upaya menegakkan rehabilitasi bencana melalui pemanfaatan hunian sementara	Pemanfaatan teknologi berkelanjutan serta ramah lingkungan pada sektor ekonomi unggulan	Pengetahuan Masyarakat dalam mitigasi bencana	Penanggulangan bencana yang holistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Sosial
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Belum Optimalnya Daya Saing Digital	Penerapan SPBE sebagai basis peningkatan layanan pemerintahan	Tingkat literasi Masyarakat dalam memfungsikan digitalisasi pemerintahan	Integrasi data menuju platform digital yang adaptif	Tata Kelola digitalisasi pemerintahan	Perencanaan kota berbasis digitalisasi	Peningkatan layanan publik berbasis digital yang akuntabel dan responsiv	Bagian Organisasi Dinas Kominfo Bagian Pemerintahan

		Tata kelola pemerintahan yang belum berintegrasi, adaptif dan responsif terhadap perubahan	Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pelayanan publik;	Manajemen Aparatur Sumber Daya Manusia yang professional dan berakhlak	Transparansi pengelolaan anggaran daerah dalam program kegiatan OPD	Optimalisasi pelaporan Masyarakat dalam mendukung pelayanan yang cepat dan tepat	Strategi peningkatan tata Kelola pemerintahan yang adaptif	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Bagian Organisasi Bagian Pemerintahan Bagian Umum dan Kepegawain
		Belum optimalnya kualitas Hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi	Strategi penyiapan SDM dalam menghadapi serangan jaringan internet	Penegakkan hukum yang tegas di masyarakat	Penerapan pemerintahan yang baik dengan Analisa mind mapping	Penyiapan Kelurahan sebagai Kawasan Bebas Narkoba	Partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum di Kota Parepare	Terwujudnya jaminan hukum dalam pelayanan publik	Bagian Hukum dan Perundang-undangan Dinas Kominfo Bagian Pemerintahan

6.2. Peta Jalan Riset dan Inovasi Kota Parepare Dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah

No	Kategori	Produk Unggulan	Tema Inovasi untuk 2025	Tema Inovasi untuk 2026	Tema Inovasi untuk 2027	Tema Inovasi untuk 2028	Tema Inovasi untuk 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
1	Kuliner	Industri Produk Roti dan Kue	Digitalisasi UMKM kuliner lokal	Inovasi produk berbasis bahan lokal	Ekspansi pasar dengan branding khas	Sertifikasi halal dan internasional	Peningkatan akses pasar global	Menjadikan Parepare pusat roti & kue khas	Dinas Perdagangan, Dinas UMKM
2	Kuliner	Pengolahan dan Pengawetan Ikan	Diversifikasi produk olahan berbasis ikan	Sertifikasi produk olahan ikan	Penetrasi pasar nasional	Inovasi kemasan produk untuk ekspor	Ekspansi pasar global produk unggulan	Parepare sebagai pusat inovasi produk olahan ikan	Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan
3	Kuliner	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek	Pengembangan keripik khas berbasis lokal	Branding produk tradisional dengan digitalisasi	Ekspansi pasar online	Kemasan ramah lingkungan	Peningkatan inovasi rasa & varian	Menjadikan Parepare pusat makanan ringan tradisional	Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian

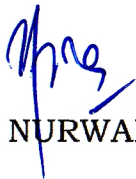
4	Fesyen	Fashion	Pelatihan desain berbasis modern	Digitalisasi pemasaran fesyen	Promosi dan pameran fesyen lokal	Kolaborasi dengan pelaku industri nasional	Ekspansi produk ke pasar internasional	Parepare menjadi pusat fesyen berbasis budaya lokal	Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata
5	Kuliner	Industri Minuman Ringan	Pengembangan produk berbahan lokal	Sertifikasi dan branding produk minuman khas	Penetrasi pasar nasional	Ekspansi produk melalui e-commerce	Branding minuman Parepare sebagai ikon lokal	Menjadikan Parepare pusat minuman khas lokal	Dinas Perdagangan, Dinas UMKM

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAREPARE**